



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2023 – 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042;
- d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara perlu dilakukan revisi; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322); dan
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023–2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang yang telah ditetapkan.
18. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
19. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
22. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
24. RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Luwu Utara.
25. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

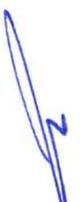


26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
31. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
32. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
33. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
34. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung



dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

35. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
36. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
37. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
38. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
39. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
40. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
42. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
43. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan



seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

44. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
45. Sistem Pusat Permukiman yang selanjutnya disebut Sistem Perkotaan adalah susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
46. Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
47. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
48. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
49. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
50. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

51. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
53. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yang selanjutnya disingkat PLTM adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan minihidro.
55. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
56. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
57. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
58. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
60. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat SPL B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
61. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
62. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut

ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

63. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
64. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
65. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
66. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
67. Agropolitan adalah pengembangan sektor pertanian dilakukan mulai dari hulu sampai hilir, yang dilakukan proses sehingga hasil pertanian mempunyai nilai jual lebih tinggi, termasuk didalamnya pengembangan industri pertanian.
68. Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah dengan pendekatan system dan manajemen kawasan dengan prinsip integritas, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.
69. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
70. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
71. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,



dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

72. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
73. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Wilayah Administrasi Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Rampi;
 - j. Kecamatan Mappedeceng;
 - k. Kecamatan Baebunta;
 - l. Kecamatan Tana Lili;
 - m. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - n. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - o. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis pada koordinat antara 1°56'50" sampai 2°55'0" Lintang Selatan dan antara 120°39'21" sampai 119°40'34" Bujur Timur.

- (3) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja.
- (4) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 742.241,8 ha (tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu koma delapan hektare).
- (5) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Materi
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 4

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agropolitan dan minapolitan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas:

- a. penetapan arahan fungsi perkotaan yang mendukung tujuan penataan ruang;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
- c. perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup;
- e. perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang berbasis Agropolitan dan Minapolitan; dan
- h. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.



Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

- (1) Strategi penetapan arahan fungsi perkotaan yang mendukung tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. mendukung penetapan Kawasan Perkotaan Masamba sebagai PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. menetapkan kawasan Pusat Pelayanan Kawasan yang melayani skala kecamatan;
 - c. menetapkan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan yang tersebar di luar ibu kota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan;
 - d. menggunakan hasil analisis hierarki, fungsi, dan jangkauan pusat-pusat pelayanan untuk mengarahkan fungsi pengembangan pusat pelayanan; dan
 - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif, dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat hingga ke daerah perdesaan;
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan permukiman perdesaan; dan



- e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- (3) Strategi perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan hutan lindung;
 - b. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan; dan
 - d. membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.
- (4) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
 - f. mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (5) Strategi perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
- 

- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- (6) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
- a. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - b. membatasi dan mengendalikan perkembangan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
 - c. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
- (7) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang berbasis Agropolitan dan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menetapkan Kawasan Perkotaan Sukamaju sebagai kawasan Agropolitan tanaman pangan serta Kawasan Perkotaan Marobo sebagai pusat pengembangan kawasan agroindustri;
- 

- c. menetapkan Kawasan Perkotaan Malangke sebagai pusat pengembangan kawasan Minapolitan; dan
 - d. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (8) Strategi pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten di Daerah, terdiri atas:
- a. Sistem Pusat Permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Permukiman di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Rencana Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
PKL
Pasal 9

PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Masamba yang secara administratif mencakup wilayah:

- a. sebagian Kecamatan Masamba;
- b. sebagian Kecamatan Baebunta; dan
- c. sebagian Kecamatan Mappedeceng.

Paragraf 2
Pusat Pelayanan Kawasan
Pasal 10

Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdapat di:

- a. Kawasan Perkotaan Bungapati di Kecamatan Tana Lili;
- b. Kawasan Perkotaan Malangke di Kecamatan Malangke;
- c. Kawasan Perkotaan Marobo di Kecamatan Sabbang;
- d. Kawasan Perkotaan Padang Balua di Kecamatan Seko;
dan
- e. Kawasan Perkotaan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju.

Paragraf 3
Pusat Pelayanan Lingkungan
Pasal 11

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdapat di:



- a. pusat Permukiman Perdesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone;
- b. pusat Permukiman Perdesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan;
- c. pusat Permukiman Perdesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng;
- d. pusat Permukiman Perdesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan;
- e. pusat Permukiman Perdesaan Limbong di Kecamatan Rongkong;
- f. pusat Permukiman Perdesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan;
- g. pusat Permukiman Perdesaan Onondoa di Kecamatan Rampi;
- h. pusat Permukiman Perdesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat; dan
- i. pusat Permukiman Perdesaan Salassa di Kecamatan Baebunta.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 13

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang; dan
- e. jembatan.



Pasal 14

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer, meliputi:
 - a. ruas BTS. KAB. LUWU – MASAMBA;
 - b. ruas BTS. KOTA PALOPO - BTS. KAB. LUWU UTARA; dan
 - c. ruas MASAMBA - BTS. KAB. LUWU TIMUR.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. ruas Eno (Seko) – Parahaleang – Batas Sulteng (Sigi) (Bone - Parahaleang);
 - b. ruas Eno (Seko) – Parahaleang – Batas Sulteng (Sigi) (Eno - Tanete);
 - c. ruas Eno (Seko) – Parahaleang – Batas Sulteng (Sigi) (Parahaleang - Batas Sul. Tengah);
 - d. ruas Jalan Lingkar Luar;
 - e. ruas Jalan Lingkar Luar (Amassangan - Cening);
 - f. ruas Jalan Lingkar Luar (Baebunta - Dadeko);
 - g. ruas Jalan Lingkar Luar (Bone-Bone - Tamuku);
 - h. ruas Jalan Lingkar Luar (Bungadidi - Poreang);
 - i. ruas Jalan Lingkar Luar (Cening - Kalitata);
 - j. ruas Jalan Lingkar Luar (Kaluku - Subur);
 - k. ruas Jalan Lingkar Luar (Kapidi - To'lada);
 - l. ruas Jalan Lingkar Luar (Lara - Kalitata);
 - m. ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Amassangan);
 - n. ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Malangke);
 - o. ruas Jalan Lingkar Luar (Malangke - Makitta);
 - p. ruas Jalan Lingkar Luar (Mario - Tolada);
 - q. ruas Jalan Lingkar Luar (Patila - Munte);
 - r. ruas Jalan Lingkar Luar (Pondan - Lara);
 - s. ruas Jalan Lingkar Luar (Pongko-Lino);
 - t. ruas Jalan Lingkar Luar (Poreang - Karondang);
 - u. ruas Jalan Lingkar Luar (Salulemo-Lara I);
 - v. ruas Jalan Lingkar Luar (Spontan - Lino);
 - w. ruas Jalan Lingkar Luar (Sumberwangi - Spontan);
 - x. ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Pongko);



- y. ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Tanah Takko');
 - z. ruas Jalan Lingkar Luar (To'lada - Rampoang);
 - aa. ruas Jalan Pesisir Teluk Bone;
 - ab. ruas Kalukku – Wonokerto;
 - ac. ruas Kambisa – Lettekang;
 - ad. ruas Kapidi – To'lada;
 - ae. ruas Mappedeceng – Kapidi;
 - af. ruas Mappedeceng – Kapidi – Mekarjaya – Sumber Wangi;
 - ag. ruas Mario – To'lada;
 - ah. ruas Masamba – Batas Mamuju (Eno - Singkalong);
 - ai. ruas Masamba – Batas Mamuju (Eno - Tanete);
 - aj. ruas Masamba – Batas Mamuju (Lore - Tedeboe);
 - ak. ruas Masamba – Batas Mamuju (Masamba - Pincara);
 - al. ruas Masamba – Batas Mamuju (Onondoa - Tede'boe);
 - am. ruas Masamba – Batas Mamuju (Pincara - Saluseba);
 - an. ruas Masamba – Batas Mamuju (Sae - Bts. Sulbar);
 - ao. ruas Masamba – Batas Mamuju (Saluseba - Onondoa);
 - ap. ruas Masamba – Batas Mamuju (Singkalong - Lore);
 - aq. ruas Masamba – Batas Mamuju (Sodangan - Eno);
 - ar. ruas Masamba – Batas Mamuju (Tallang - Sae);
 - as. ruas Masamba – Kambisa;
 - at. ruas Patila – Munte; dan
 - au. ruas Sabbang – Talang – Sae – Kaluku.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. ruas Baliase Radda (Lingkar Selatan);
 - b. ruas Jl. Tamansiswa – Lingkar Utara; dan
 - c. ruas Radda – Baliase (Lingkar Utara).
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (7) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melintasi seluruh kecamatan.
- (8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melintasi:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;

- g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Rampi;
 - j. Kecamatan Mappedeceng;
 - k. Kecamatan Baebunta; dan
 - l. Kecamatan Tana Lili.
- (9) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder.
- (11) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, melintasi:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Mappedeceng;
 - j. Kecamatan Baebunta;
 - k. Kecamatan Tana Lili;
 - l. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - m. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (12) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, melintasi:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Sukamaju;
 - f. Kecamatan Malangke Barat;
 - g. Kecamatan Mappedeceng;
 - h. Kecamatan Baebunta;
 - i. Kecamatan Tana Lili;
 - j. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - k. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - l. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (13) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 15

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, yaitu ruas Jalan Tol Poso – Tindantana – Palopo yang melintas di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Kecamatan Sukamaju Selatan; dan
 - e. Kecamatan Tana Lili.
- (2) Ruas Jalan Tol Poso – Tindantana – Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan bebas hambatan.

Pasal 16

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Masamba di Kecamatan Masamba.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Terminal Bone Bone di Kecamatan Bone Bone;
 - b. Terminal Malangke di Kecamatan Malangke;
 - c. Terminal Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Terminal Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng;
 - e. Terminal Sabbang di Kecamatan Sabbang;
 - f. Terminal Sabbang Selatan di Kecamatan Sabbang Selatan;
 - g. Terminal Seko di Kecamatan Seko; dan
 - h. Terminal Sukamaju di Kecamatan Sukamaju.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal penumpang.

Pasal 17

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
 - a. Terminal Barang Malangke di Kecamatan Malangke;



- b. Terminal Barang Sukamaju di Kecamatan Sukamaju; dan
 - c. Terminal Barang Tana Lili di Kecamatan Tana Lili.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal barang.

Pasal 18

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antarkota lintas Parepare – Belopa – Palopo – Masamba – Malili yang melintas di:
- a. Kecamatan Baebunta;
 - b. Kecamatan Baebunta Selatan;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sabbang Selatan;
 - e. Kecamatan Masamba;
 - f. Kecamatan Mappedeceng;
 - g. Kecamatan Sukamaju;
 - h. Kecamatan Bone Bone; dan
 - i. Kecamatan Tana Lili.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang yaitu Stasiun Masamba di Kecamatan Mappedeceng.
- (4) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi perkeretaapian.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelabuhan penyeberangan kelas III yaitu Pelabuhan Penyeberangan Munte di Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 - a. Pelabuhan Cappasolo/Malangke di Kecamatan Malangke (yang dikenal dengan nama Pelabuhan Malangke); dan
 - b. Pelabuhan Laut Munte di Kecamatan Tana Lili.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Terminal Khusus Energi Luwu Utara di Kecamatan Tana Lili.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Malangke di Kecamatan Malangke; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Bone-Bone di Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
Pasal 22

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, berupa bandar udara pengumpan meliputi:



- a. Bandar Udara Andi Jemma di Kecamatan Masamba;
- b. Bandar Udara Rampi di Kecamatan Rampi; dan
- c. Bandar Udara Seko di Kecamatan Seko.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 23

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

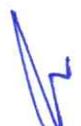
Paragraf 1
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Pasal 24

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan yaitu jaringan Distribusi Gas Sengkang – Pomala yang melintasi di:

- a. Kecamatan Malangke Barat;
- b. Kecamatan Malangke;
- c. Kecamatan Sukamaju Selatan;
- d. Kecamatan Bone Bone; dan
- e. Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pasal 25

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:



- a. PLTA;
 - b. PLTP; dan
 - c. pembangkit listrik lainnya.
- (3) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. PLTA Baliase di Kecamatan Masamba;
 - b. PLTA Salu Uro di Kecamatan Seko; dan
 - c. PLTA Seko 1 di Kecamatan Seko.
- (4) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. PLTP Limbong di Kecamatan Rongkong; dan
 - b. PLTP Pincara di Kecamatan Masamba.
- (5) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa
- (6) PLTM, terdiri dari:
- a. PLTM Baliase di Kecamatan Masamba;
 - b. PLTM Baliase A di Kecamatan Masamba;
 - c. PLTM Rongkong di Kecamatan Sabbang;
 - d. PLTM Rongkong 2 di Kecamatan Sabbang; dan
 - e. PLTM Rongkong 3 di Kecamatan Sabbang.
- (7) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pembangkitan tenaga listrik.
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berupa:
- a. SUTET; dan
 - b. SUTT.
- (10) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, yaitu SUTET Palopo – Wotu yang melintasi di:
- a. Kecamatan Malangke Barat;
 - b. Kecamatan Malangke;
 - c. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - d. Kecamatan Bone Bone; dan
 - e. Kecamatan Tana Lili.
- (11) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, yaitu SUTT Wotu – Masamba yang melintasi di:
- a. Kecamatan Mappedeceng;
 - b. Kecamatan Sukamaju;
 - c. Kecamatan Bone Bone; dan



- d. Kecamatan Tana Lili.
- (12) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berupa SUTM, yang melintasi di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Malangke Barat;
 - h. Kecamatan Mappedeceng;
 - i. Kecamatan Baebunta;
 - j. Kecamatan Tana Lili;
 - k. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - m. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (13) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, yaitu Gardu Induk Masamba di Kecamatan Mappedeceng.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sukamaju;
 - e. Kecamatan Mappedeceng;
 - f. Kecamatan Baebunta;
 - g. Kecamatan Tana Lili; dan
 - h. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler yang tersebar di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Sukamaju;



- f. Kecamatan Malangke Barat;
 - g. Kecamatan Mappedeceng;
 - h. Kecamatan Baebunta;
 - i. Kecamatan Tana Lili;
 - j. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - k. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - l. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Rongkong;
 - e. Kecamatan Sukamaju;
 - f. Kecamatan Seko;
 - g. Kecamatan Malangke Barat;
 - h. Kecamatan Rampi;
 - i. Kecamatan Mappedeceng;
 - j. Kecamatan Baebunta;
 - k. Kecamatan Tana Lili;
 - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - m. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;



- c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sukamaju;
 - e. Kecamatan Seko;
 - f. Kecamatan Malangke Barat;
 - g. Kecamatan Rampi;
 - h. Kecamatan Mappedeceng;
 - i. Kecamatan Baebunta;
 - j. Kecamatan Tana Lili;
 - k. Kecamatan Malangke;
 - l. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - m. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sukamaju;
 - e. Kecamatan Seko;
 - f. Kecamatan Malangke Barat;
 - g. Kecamatan Rampi;
 - h. Kecamatan Mappedeceng;
 - i. Kecamatan Baebunta;
 - j. Kecamatan Malangke;
 - k. Kecamatan Tana Lili;
 - l. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - m. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Malangke Barat;
 - h. Kecamatan Mappedeceng;
 - i. Kecamatan Baebunta;
 - j. Kecamatan Tana Lili;
 - k. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - m. Kecamatan Sabbang Selatan.



- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Sabbang;
 - c. Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Kecamatan Baebunta; dan
 - e. Kecamatan Tana Lili.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sukamaju;
 - e. Kecamatan Seko;
 - f. Kecamatan Mappedeceng;
 - g. Kecamatan Baebunta;
 - h. Kecamatan Tana Lili;
 - i. Kecamatan Sabbang Selatan; dan
 - j. Kecamatan Baebunta Selatan.
- (10) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 28

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. SPL B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 1
SPAM
Pasal 29

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Sabbang;
 - c. Kecamatan Sabbang Selatan;
 - d. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - e. Kecamatan Baebunta.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sukamaju;
 - e. Kecamatan Mappedeceng;
 - f. Kecamatan Baebunta; dan
 - g. Kecamatan Tana Lili.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Sukamaju;
 - f. Kecamatan Mappedeceng;
 - g. Kecamatan Baebunta;
 - h. Kecamatan Tana Lili; dan
 - i. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sukamaju;
 - d. Kecamatan Mappedeceng;
 - e. Kecamatan Baebunta; dan
 - f. Kecamatan Tana Lili.



- (7) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rencana unit produksi perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi penyediaan air minum.

Paragraf 2
SPAL
Pasal 30

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Rampi;
 - i. Kecamatan Mappedeceng;
 - j. Kecamatan Baebunta;
 - k. Kecamatan Tana Lili;
 - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - m. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa rencana sistem pengelolaan air limbah domestik perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan air limbah.

Paragraf 3
SPL B3
Pasal 31

- (1) SPL B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, yaitu SPL B3 Tana Lili di Kecamatan Tana Lili.
- (2) SPL B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan
Pasal 32

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. TPS3R Sabbang di Kecamatan Sabbang;
 - b. TPS3R Bukit Indah Patoloan di Kecamatan Bone Bone;
 - c. TPS3R KSM Bunga Masamba di Kecamatan Masamba; dan
 - d. TPS3R Sukamaju di Kecamatan Sukamaju.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. TPS Baebunta di Kecamatan Baebunta;
 - b. TPS Bone Bone di Kecamatan Bone Bone;
 - c. TPS Malangke di Kecamatan Malangke;
 - d. TPS Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat;
 - e. TPS Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng;
 - f. TPS Rampi di Kecamatan Rampi;
 - g. TPS Rongkong di Kecamatan Rongkong;
 - h. TPS Sabbang di Kecamatan Sabbang;
 - i. TPS Seko di Kecamatan Seko;
 - j. TPS Sukamaju di Kecamatan Sukamaju;
 - k. TPS Tana Lili di Kecamatan Tana Lili;
 - l. TPS BTN Andi Djemma di Kecamatan Masamba;
 - m. TPS Jl. A. Pattiware di Kecamatan Masamba;
 - n. TPS Kantor Gabungan Dinas di Kecamatan Masamba;
 - o. TPS Mako Brimob di Kecamatan Baebunta;
 - p. TPS Pasar Sentral di Kecamatan Masamba;
 - q. TPS Puri Fatimah Residen di Kecamatan Masamba; dan
 - r. TPS RSUD Andi Djemma di Kecamatan Masamba.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPA Meli yang terdapat di Kecamatan Baebunta.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi persampahan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
Pasal 33

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tersebar di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Mappedeceng;
 - j. Kecamatan Baebunta;
 - k. Kecamatan Tana Lili;
 - l. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - m. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Drainase
Pasal 34

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - c. Kecamatan Baebunta.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat di:



- a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - c. Kecamatan Baebunta.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdapat di:
- a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - c. Kecamatan Baebunta.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum Pasal 35

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten di Daerah, terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 36

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1 Badan Air Pasal 37

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas kurang lebih 3.742 ha (tiga ribu



tujuh ratus empat puluh dua hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap
Kawasan Bawahannya
Pasal 38

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 331.176 ha (tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Rampi;
 - j. Kecamatan Mappedeceng;
 - k. Kecamatan Baebunta;
 - l. Kecamatan Tana Lili;
 - m. Kecamatan Sukamaju Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 39

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c seluas kurang lebih 6.765 ha (enam ribu tujuh ratus enam puluh lima hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi
Pasal 40

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, berupa kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.



- (2) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa taman nasional dengan kode TN yaitu Taman Nasional Gandang Dewata seluas kurang lebih 100 ha (seratus hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Rongkong; dan
 - b. Kecamatan Seko.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem *Mangrove*
Pasal 41

- Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e seluas kurang lebih 326 ha (tiga ratus dua puluh enam hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Kecamatan Tana Lili; dan
 - e. Kecamatan Sukamaju Selatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 42

- Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
 - b. Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - c. Kawasan Pertanian dengan kode P;
 - d. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
 - e. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
 - f. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
 - h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
 - i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 43

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan



- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 156.714 ha (seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat belas hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Rampi;
 - j. Kecamatan Mappedeceng;
 - k. Kecamatan Baebunta;
 - l. Kecamatan Tana Lili;
 - m. Kecamatan Sukamaju Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.284 ha (tiga ribu dua ratus delapan puluh empat hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Rampi; dan
 - b. Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat
Pasal 44

Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b seluas kurang lebih 24.744 ha (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Bone Bone;
- b. Kecamatan Masamba;
- c. Kecamatan Sabbang;
- d. Kecamatan Rongkong;
- e. Kecamatan Sukamaju;
- f. Kecamatan Seko;
- g. Kecamatan Rampi;
- h. Kecamatan Mappedeceng;
- i. Kecamatan Baebunta; dan
- j. Kecamatan Sabbang Selatan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian
Pasal 45

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 32.492 ha (tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.273 ha (seribu dua ratus tujuh puluh tiga hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Kecamatan Rampi;
 - e. Kecamatan Tana Lili; dan
 - f. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 156.379 ha (seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 4.205 ha (empat ribu dua ratus lima hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Masamba; dan
 - b. Kecamatan Seko.
- (6) Pada kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan KP2B, seluas kurang lebih 27.446 ha (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Pada kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan KP2B, seluas kurang lebih 496 ha (empat ratus sembilan puluh enam hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;

- c. Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Kecamatan Rampi;
 - e. Kecamatan Tana Lili; dan
 - f. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (8) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 46

- (1) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, berupa kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 9.606 ha (sembilan ribu enam ratus enam hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Kecamatan Tana Lili; dan
 - e. Kecamatan Sukamaju Selatan.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 47

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT seluas kurang lebih 28 ha (dua puluh delapan hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - c. Kecamatan Baebunta.

- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2 ha (dua hektare) yang terdapat di Kecamatan Mappedeceng.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 48

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f seluas kurang lebih 461 ha (empat ratus enam puluh satu hektare) yang terdapat di Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman
Pasal 49

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.885 ha (tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Rampi;
 - j. Kecamatan Mappedeceng;
 - k. Kecamatan Baebunta; dan
 - l. Kecamatan Tana Lili.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.992 ha (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi
Pasal 50

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h seluas kurang lebih 120 ha (seratus dua puluh hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Masamba;
- b. Kecamatan Seko;
- c. Kecamatan Rampi; dan
- d. Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 51

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i seluas kurang lebih 7 ha (tujuh hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Malangke Barat;
 - g. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - h. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Khusus
Pasal 52

- (1) Pemanfaatan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, agar memperhatikan ketentuan khusus, terdiri atas:
 - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. KP2B;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan resapan air;
 - e. kawasan sempadan;
 - f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - g. kawasan pertambangan mineral dan batubara.



- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 5. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 6. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
 - b. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. wilayah yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan khusus KP2B ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - c. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - d. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - e. rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 - f. rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi; dan
 - g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



- (5) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan resapan air ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai;
 - c. sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 - d. sempadan ketenagalistrikan; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB VI
KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53

- (1) Kawasan strategis wilayah kabupaten di Daerah, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 dan tercantum dalam Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi
Pasal 54

Kawasan strategis provinsi yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan peternakan sapi SERA (Seko-Rampi) di Kecamatan Seko.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 55

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan pesisir dan Minapolitan di:
 1. Kecamatan Malangke; dan
 2. Kecamatan Malangke Barat.
 - b. kawasan pengembangan Agropolitan perkebunan di:
 1. Kecamatan Bone Bone;
 2. Kecamatan Masamba;
 3. Kecamatan Sabbang;



4. Kecamatan Rongkong;
 5. Kecamatan Sukamaju;
 6. Kecamatan Seko;
 7. Kecamatan Malangke Barat;
 8. Kecamatan Rampi;
 9. Kecamatan Mappedeceng;
 10. Kecamatan Baebunta;
 11. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 12. Kecamatan Sabbang Selatan.
- c. kawasan pengembangan Agropolitan pertanian di:
1. Kecamatan Bone Bone;
 2. Kecamatan Sukamaju;
 3. Kecamatan Mappedeceng;
 4. Kecamatan Tana Lili; dan
 5. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- d. Kawasan Industri Munte di Kecamatan Tana Lili.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
- a. Kawasan Budaya Rampi di Kecamatan Rampi; dan
 - b. kawasan bersejarah di:
 1. Kecamatan Malangke; dan
 2. Kecamatan Malangke Barat.

Pasal 56

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten mempertimbangkan:
 - a. nilai strategis kawasan;
 - b. delineasi kawasan;
 - c. tujuan pengembangan kawasan; dan
 - d. arahan pengembangan kawasan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten dalam menyusun RDTR.
- (2) Untuk operasionalisasi rencana kawasan strategis kabupaten dapat di detailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang RDTR.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW Kabupaten, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 58

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5
(Lima) Tahunan
Pasal 59

- (1) Penyusunan Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 1. Sistem Pusat Permukiman;

2. sistem jaringan transportasi;
 3. sistem jaringan energi;
 4. sistem jaringan telekomunikasi;
 5. sistem jaringan sumber daya air; dan
 6. sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kabupaten, meliputi:
1. Kawasan Lindung; dan
 2. Kawasan Budi Daya.
- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari:
- a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksana program utama, meliputi:
- a. pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan);
 - b. swasta; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi:
- a. tahap I (2023 – 2024);
 - b. tahap II (2025 – 2029);
 - c. tahap III (2030 – 2034);
 - d. tahap IV (2035 – 2039); dan
 - e. tahap V (2040 – 2042).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 60

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.



- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan/atau
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang, terdiri atas:



1. standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman; dan
 2. standar teknis sistem prasarana wilayah.
- b. ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang, terdiri atas:
1. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 2. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (5) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1

Standar Pelayanan Minimal Sistem Pusat Permukiman Pasal 63

- (1) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a angka 1, terdiri atas:
 - a. standar pelayanan minimal sebagai PKL;
 - b. standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi:
 - a. sarana pelayanan umum skala kabupaten;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. fasilitas pendidikan skala kabupaten;
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit umum atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - e. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;
 - f. terminal penumpang;
 - g. jaringan jalan dan jembatan;
 - h. jaringan kereta api;
 - i. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. sistem jaringan telekomunikasi;
 - k. sistem sumber daya air;
 - l. SPAM;
 - m. SPAL;
 - n. SPL B3;
 - o. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - p. sistem jaringan drainase; dan



- q. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi:
 - a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang;
 - f. pelabuhan laut;
 - g. jaringan jalan dan jembatan;
 - h. jaringan kereta api;
 - i. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. sistem jaringan telekomunikasi;
 - k. sistem sumber daya air;
 - l. SPAM;
 - m. SPAL;
 - n. SPL B3;
 - o. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - p. sistem jaringan drainase; dan
 - q. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, meliputi:
 - a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa kelurahan/desa;
 - c. fasilitas perkantoran kelurahan/desa;
 - d. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - e. sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. sistem sumber daya air;
 - g. SPAM;
 - h. SPAL;
 - i. SPL B3;
 - j. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - k. sistem jaringan drainase; dan
 - l. sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2

Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 64

Standar teknis sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;



- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

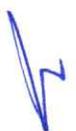
Pasal 65

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:
 - a. standar teknis sistem jaringan jalan;
 - b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
 - c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. standar teknis jalan umum;
 - b. standar teknis jalan tol;
 - c. standar teknis terminal penumpang;
 - d. standar teknis terminal barang; dan
 - e. standar teknis jembatan.
- (3) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. standar teknis jalan arteri;
 - b. standar teknis jalan kolektor;
 - c. standar teknis jalan lokal; dan
 - d. standar teknis jalan lingkungan.
- (4) Standar teknis jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu standar teknis jalan arteri primer, meliputi:
 - a. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - d. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - e. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan, kapasitas, dan keamanan tetap terpenuhi;

- f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan kecepatan, kapasitas, dan keamanan;
 - g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - h. standar teknis jalan arteri primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. standar teknis jalan kolektor primer, meliputi:
 - 1. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
 - 2. jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - 4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - 5. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - 6. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - 7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan kolektor sekunder, meliputi:
 - 1. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan lokal, atau antara pusat kegiatan lokal dengan pusat pelayanan kawasan;
 - 2. jalan kolektor sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan



4. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:
- a. standar teknis jalan lokal primer, meliputi:
 1. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. jalan lokal primer yang masuk kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 4. standar teknis jalan lokal primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan lokal sekunder, meliputi:
 1. menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. jalan lokal sekunder yang masuk kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 4. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari:
- a. standar teknis jalan lingkungan primer, meliputi:
 1. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 4. tidak diperuntukan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan



- jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
dan
5. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis jalan lingkungan sekunder, meliputi:
1. menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga);
 4. tidak diperuntukan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
dan
 5. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. trase jalan tol masih bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis jalan tol lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. standar teknis terminal penumpang tipe B, meliputi:
 1. melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau pedesaan;
 2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
 3. lokasi terminal B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis terminal penumpang tipe C, meliputi:
 1. melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan;
 2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
 3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang sebagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
 - b. digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. lokasi terminal barang lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan kelayakan jangka panjang serta estektika;
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar

- perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan serta pedoman penentuan beban impak bangunan perlindungan pilar jembatan;
 - e. didesain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
 - f. standar teknis jembatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan jalur kereta api; dan
 - b. standar teknis stasiun kereta api.
- (13) Standar teknis jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa standar teknis jaringan jalur kereta api umum yaitu standar teknis jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:
- a. jalan rel direncanakan sesuai dengan klasifikasi jalur untuk melewatkan berbagai jumlah angkutan barang dan/atau penumpang dalam suatu jangka waktu tertentu;
 - b. perencanaan konstruksi jalan rel harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan ekonomis;
 - c. secara teknis konstruksi jalan rel harus dapat dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan aman dengan tingkat kenyamanan tertentu;
 - d. sistem jalan rel terdiri dari konstruksi bagian atas dan konstruksi bagian bawah;
 - e. jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang;
 - f. trase jalur kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - g. standar teknis jaringan jalur kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (14) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa standar teknis stasiun penumpang, meliputi:
- a. pembangunan stasiun kereta api lokasinya sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api, menunjang operasional sistem perkeretaapian, tidak mengganggu lingkungan, memiliki tingkat keselamatan dan keamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang;
 - c. stasiun kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - d. standar teknis stasiun kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari standar teknis pelabuhan penyeberangan berupa standar teknis pelabuhan penyeberangan kelas III, meliputi:
- a. pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas III;
 - b. pelabuhan penyeberangan kelas III memuat ketentuan mengenai:
 1. kegiatan perusahaan; dan
 2. kelayakan teknis.
 - c. kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, berupa:
 1. pelayanan jasa kapal;
 2. pelayanan jasa penumpang;
 3. pelayanan jasa kendaraan; dan
 4. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
 - d. kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 memperhatikan kondisi geografi, *hidroceanografi*, *bathimetric*, dan topografi;
 - f. desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelabuhan penyeberangan kelas III ditentukan dengan memperhatikan volume operasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- h. standar teknis pelabuhan penyeberangan kelas III lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari standar teknis pelabuhan laut, berupa:
- a. standar teknis pelabuhan pengumpan;
 - b. standar teknis terminal khusus; dan
 - c. standar teknis pelabuhan perikanan.
- (17) Standar teknis pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a berupa standar teknis pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
- a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota;
 - b. persyaratan teknis kepelabuhanan meliputi studi kelayakan, desain teknis, dan kelayakan ekonomis dan finansial yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
- a. terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. persyaratan teknis terminal khusus meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis terminal khusus lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c berupa standar teknis Pangkalan Pendaratan Ikan, meliputi:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei *hidroceanografi*, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana, dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;
 - g. memiliki alokasi ruang tanah paling sedikit seluas 1 (satu) hektare; dan
 - h. standar teknis Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) Standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa standar teknis bandar udara pengumpan, meliputi:
- a. mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas;
 - b. bandar udara tujuan atau penunjang dari bandar udara pengumpul serta merupakan penunjang pelayanan kegiatan lokal;
 - c. peningkatan peran bandar udara pengumpan sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, serta prasarana memperkuat wawasan nusantara dengan memperhatikan kesinambungan dan keteraturan angkutan udara;
 - d. dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya, untuk melayani kepentingan umum yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis bandar udara pengumpan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan



- b. standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari standar teknis jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Standar teknis jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa standar teknis jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, meliputi:
- a. jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. pembangunan prasarana dan sarana pendukung jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - c. kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dengan persyaratan tidak mengganggu fungsi jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
- a. standar teknis PLTA;
 - b. standar teknis PLTP; dan
 - c. standar teknis pembangkit listrik lainnya.
- (6) Standar teknis PLTA sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air sungai atau tenaga air dari



- waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna;
- b. pemilihan lokasi PLTA dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer yang memanfaatkan tenaga air serta kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - c. lokasi PLTA sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - d. standar teknis PLTA lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis PLTP sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi;
 - b. pemilihan lokasi PLTP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer yang memanfaatkan energi panas bumi dan berada pada wilayah kerja panas bumi sesuai dengan cadangan panas bumi terbukti setelah eksplorasi dan/atau studi kelayakan;
 - c. lokasi PLTP sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - d. standar teknis PLTP lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c yang berbentuk PLTM, meliputi:
- a. pembangkit listrik yang memanfaatkan energi mekanik air dengan menggunakan turbin air yang terpasang pada generator listrik;
 - b. pemilihan lokasi PLTM dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer yang memanfaatkan energi mekanik air serta kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
- 

- c. lokasi PLTM sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - d. standar teknis PLTM lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
- a. standar teknis jaringan transmisi tenaga antarsistem;
 - b. standar teknis jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. standar teknis gardu induk.
- (10) Standar teknis jaringan transmisi tenaga antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, yaitu:
- a. standar teknis SUTET, meliputi:
 - 1. saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;
 - 2. topologi SUTET dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
 - 3. batasan ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan SUTET sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - 4. standar teknis SUTET lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis SUTT, meliputi:
 - 1. saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;
 - 2. topologi SUTT dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
 - 3. batasan ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang yang digunakan untuk



- melaksanakan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan SUTT sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
4. standar teknis SUTT lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, yaitu standar teknis SUTM, meliputi:
- a. saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan;
 - b. topologi SUTM dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis SUTM lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
- a. bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik;
 - b. gardu listrik dengan perkembangannya di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis gardu listrik lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan tetap; dan
 - b. standar teknis jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. standar teknis infrastruktur jaringan tetap berupa Stasiun Telepon Otomat (STO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar teknis jaringan kabel serat optik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis jaringan tetap lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa standar teknis jaringan bergerak seluler, meliputi:



- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara *Base Transceiver Station* (BTS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. standar teknis jaringan bergerak lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d terdiri atas standar teknis prasarana sumber daya air.
- (2) Standar teknis prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
 - b. standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
 - c. standar teknis bangunan sumber daya air.
- (3) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa standar teknis jaringan irigasi primer, standar teknis jaringan irigasi sekunder, dan standar teknis jaringan irigasi tersier, meliputi:
 - a. jaringan primer, tersier, dan sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan tingkat kelerengan lahan sebesar 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa standar teknis jaringan pengendalian banjir dan standar teknis bangunan pengendalian banjir, meliputi:
 - a. lokasi sistem pengendalian banjir memperhatikan faktor sosial ekonomi antara lain perkembangan wilayah dan rencana prasarana dan sarana wilayah;



- b. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
 - c. sistem pengendalian banjir dapat berupa bronjong kawat sesuai standar teknis terkait yang dapat disesuaikan sesuai metode struktur bangunan dan jaringan pengendalian banjir dari sektor terkait; dan
 - d. standar teknis sistem pengendalian banjir lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. sesuai dengan fungsi yang dibebankan pada bangunan;
 - b. mudah dalam perencanaan dan pelaksanaan;
 - c. murah dalam operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. standar teknis sistem bangunan sumber daya air lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, terdiri atas:
- a. standar teknis SPAM;
 - b. standar teknis SPAL;
 - c. standar teknis SPL B3;
 - d. standar teknis sistem jaringan persampahan;
 - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. standar teknis sistem drainase.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari standar teknis jaringan perpipaan berupa standar teknis unit air baku, standar teknis unit produksi, standar teknis unit distribusi, dan standar teknis unit pelayanan, meliputi:
- a. sarana dan prasarana pengambil dan/atau penyedia air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar teknis unit produksi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. standar teknis unit distribusi yaitu sarana pengaliran air minum dari unit produksi sampai unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. standar teknis unit pelayanan yaitu titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis jaringan perpipaan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik skala regional dan/atau perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelayanan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sistem pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengumpulan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan dari pelayanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengolahan sistem pengelolaan air limbah terpusat sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui pelayanan dan pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. lokasi IPLT dan pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis SPL B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:



- a. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dilakukan dengan pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, penimbunan limbah B3, dan/atau *dumping* (pembuangan) limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. satu kesatuan sarana dan prasarana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. setiap kawasan industri, pelabuhan umum, dan terminal khusus wajib menyediakan tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 terpisah dari barang bukan B3;
 - d. lokasi SPL B3 di luar kawasan lindung dan bebas banjir serta desain, teknologi, metode, proses dan kapasitas fasilitas pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan nama sumber, karakteristik, jumlah, limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis SPL B3 lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. standar teknis TPS3R;
 - b. standar teknis TPS; dan
 - c. standar teknis TPA.
- (6) Standar teknis TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - d. penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 - e. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - g. standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (7) Standar teknis TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penampung sampah sementara di TPS bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 - d. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - e. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - f. standar teknis TPS lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. penentuan lokasi TPA tidak berada pada lahan produktif dan kawasan lindung;
 - b. luas lahan dan kapasitas TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, jaringan listrik, drainase, air bersih, pagar pembatas dan kantor operasional;
 - d. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, sumur uji atau pantau penanganan gas dan zona penyangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
 - f. kegiatan yang dilakukan yaitu penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi dan penanganan gas;
 - g. fasilitas penunjang terdiri dari tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan dan tempat parkir; dan
 - h. standar teknis TPA lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana; dan
 - b. standar teknis tempat evakuasi bencana.
- (10) Standar teknis jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:



- a. jalur evakuasi sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 - b. jalur evakuasi dirancang menjauhi sumber bencana;
 - c. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
 - d. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 - e. standar teknis jalur evakuasi bencana lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 - b. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - c. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tempat evakuasi akhir terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - e. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. lokasi tempat evakuasi akhir berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 - g. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari standar teknis jaringan drainase primer, standar teknis jaringan drainase sekunder, dan standar teknis jaringan drainase tersier, meliputi:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder, jaringan drainase tersier, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. jaringan drainase primer atau saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;



- c. jaringan drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. jaringan drainase tersier untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder;
- e. kelayakan teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan, dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. standar teknis sistem drainase lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Pasal 70

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi badan air antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang pengelolaan air;



2. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pertambangan di badan air harus mengikuti aturan yang berlaku dari sektor terkait.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu, merusak, dan mencemari badan air;
 - d. ketentuan lain dalam Badan Air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam Badan Air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
 1. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung, dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung meliputi perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi dan gelombang pasang;
 - 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 4. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan pesisir;
 - 5. pengamanan sempadan sebagai ruang publik;
 - 6. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - 7. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
 - 8. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan sektor informal;



5. pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. jalur pipa gas dan air minum;
 8. bangunan serta jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dengan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai Kawasan Perlindungan Setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktifitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan;
 2. kegiatan budi daya lainnya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sempadan pantai;
 3. kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
 4. pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
1. bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
 2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 3. bangunan pengendalian banjir;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 5. prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana



- wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi untuk taman nasional, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam taman nasional, meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
 6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam taman nasional, meliputi:
 1. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 2. Pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi, energi panas, dan energi angin.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam taman nasional yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi,



- menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung, dan kelestarian lingkungan hidup serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
- d. ketentuan lain dalam taman nasional yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pelestarian kawasan *mangrove*; dan
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
 2. kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan ketat dan dilestarikan; dan
 3. fasilitas umum lainnya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi *mangrove*.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan kayu *mangrove*; dan
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem *mangrove*.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian; dan
 3. menara pengintai dan pos penjagaan.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya
Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 77

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap; dan
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. usaha pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan lainnya dilakukan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung, dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 2. kawasan hutan produksi tetap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemanfaatan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, infrastruktur proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*), dan energi dan/atau tanah obyek



- reforma agraria dengan memperhatikan kelerengan, jenis tanah dan curah hujan; dan
3. usaha pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi kegiatan lainnya yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
 1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pengembangan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan;
 2. kegiatan pengembangan usaha industri pertanian, perkebunan, tanaman hutan, dan peternakan;
 3. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan Rakyat serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 50%;
 4. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pembangunan fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan, dan peternakan; dan



6. kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan Rakyat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pengembangan budi daya lainnya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah;
- d. ketentuan lain dalam Kawasan Perkebunan Rakyat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:
 1. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 2. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng;
 - 2) kegiatan metode penanaman yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
 - 3) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.
 - b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
 - 2) melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidrologis kritis dengan jenis-jenis tanaman atau pohon cepat tumbuh dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh.



- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
 - e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng;
 - 2) kegiatan metode penanaman yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
 - 3) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan sempadan, memperhatikan fungsi kawasan sempadan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
4. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 3. kegiatan unit pengolahan hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 5. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 6. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan tanaman pangan; dan
 7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan

- tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KP2B memperhatikan:
 - a) kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:

- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 2) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan tanaman pangan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng; dan
 - 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
- f) kawasan rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi memperhatikan:



- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 4) tidak diizinkan bangunan baru pada jalur sesar aktif; dan
 - 5) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi kawasan gempa sesar aktif.
- g) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
 - c) kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 5. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan memperhatikan fungsi kawasan sempadan serta ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 6. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca panen;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hortikultura, meliputi:
 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
 3. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi tanaman hortikultura;
 4. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 5. kegiatan perikanan dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 6. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pengolahan hasil pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan pertanian, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan

- prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura;
- e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura, meliputi:
 - 1. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - 2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan KP2B memperhatikan:
 - a) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 3. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan hortikultura dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
 - b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;



- 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 2) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan hortikultura harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) penguatan lereng; dan
 - 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
- f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
 - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan



- c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 5. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - 2. kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 3. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan; dan
 - 4. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 - 1. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
 - 3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - 4. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - 5. kegiatan perikanan dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan

- tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
6. kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 7. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan perkebunan;
 8. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 2. kegiatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkebunan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan, meliputi:
1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:



- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan penanaman perkebunan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
 - 2) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng; dan
 - 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
- f) kawasan rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;



- 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 4) tidak diizinkan bangunan baru pada jalur sesar aktif; dan
 - 5) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi kawasan gempa sesar aktif.
- g) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
 - c) kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
 - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 5. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian



tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
dan

6. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peternakan meliputi kegiatan peternakan dan kegiatan penelitian maupun pengembangan peternakan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan peternakan, meliputi:
 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
 3. kegiatan pengolahan hasil peternakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan peternakan; dan
 6. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peternakan meliputi kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan peternakan, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;



- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peternakan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peternakan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan peternakan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peternakan, meliputi:
 1. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 2. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan peternakan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
 - 2) bangunan penunjang kegiatan peternakan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - c) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
 - d) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng; dan



- 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
 - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
 1. kegiatan perikanan budi daya; dan
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
 1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;



4. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
 1. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
 - 2) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - b) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.



- c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
 - c) kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
 - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan, meliputi:
 1. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses eksploitasi tambang.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan, meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan pertambangan;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan peledak memiliki jarak 1 (satu) kilometer dari Kawasan Permukiman dan tanpa peledakan memiliki jarak 500 (lima ratus) meter dari kawasan permukiman; dan
 2. kawasan peruntukan pertambangan batuan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan

ketentuan pendirian bangunan dan prasarana kawasan peruntukan pertambangan batuan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
 1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan ketentuan pendirian bangunan dan prasarana pembangkitan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan

- operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan sempadan, dengan ketentuan:
 - a) kegiatan yang secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal sepanjang tidak masuk dalam ruang bebas;
 - b) wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) penggalian tanah atau pekerjaan konstruksi lainnya dapat dilakukan sepanjang memenuhi jarak aman;
 - d) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi bangunan industri, pergudangan, serta sarana penunjang kegiatan industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penambahan sarana prasarana lain penunjang Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi dalam Kawasan Peruntukan Industri dengan syarat memiliki area penyangga untuk membatasi antara area industri dengan area permukiman serta kegiatan permukiman yang mendukung Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan industri dan

- penunjang kegiatan industri serta kegiatan industri yang tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
 2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertahanan dan penataan ruang;
 3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
 5. sumber air baku dan jaringan air bersih;
 6. jaringan listrik;
 7. jaringan telekomunikasi;
 8. ruang terbuka hijau;
 9. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 10. instalasi pengolahan limbah; dan
 11. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. ketentuan lain dalam Kawasan Peruntukan Industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 1. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 2. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:



- a) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
- b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
- c) menyediakan jalur evakuasi bencana;
- d) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 1. pembangunan perumahan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perkotaan yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pelestarian cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:



1. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan dan tidak mencemari lingkungan;
 2. kegiatan terminal penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan stasiun penumpang dan barang kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah, dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 6. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 7. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan yaitu pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun paling besar 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem

pengelolaan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;

3. penyediaan ruang terbuka hijau publik;
 4. penyediaan terminal penumpang tipe C; dan
 5. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. kawasan permukiman perkotaan sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau publik dengan alokasi ruang minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan permukiman yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan, maka ketinggian bangunan yang diizinkan dengan ketentuan:
 - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan tinggal landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (*superimpose*) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5 % (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian $(45+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
 - c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan $(45+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;

- d) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan $(150+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - e) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian $(45+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian $(80+H)$ atau $(100+H)$ atau $(105+H)$ atau $(120+H)$ atau $(145+H)$ (sesuai klasifikasi landas pacu);
 - f) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian $(45+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - g) terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, yang sekarang ini menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) ketentuan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:



- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
 - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
 - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
 - 5) lereng dengan kemiringan $> 15\%$ (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
 - 6) bangunan, jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
 - 7) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 8) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
 - 9) penyediaan sistem deteksi peringatan dini longsor; dan
 - 10) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi harus memperhatikan:
- 1) restorasi sungai;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir dan sistem jaringan drainase kota/perkotaan;
 - 3) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;



- 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 5) pembatasan bangunan baru;
 - 6) pembatasan pembangunan fasilitas umum; dan
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
 - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
 - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
 - 5) lereng dengan kemiringan $> 15\%$ (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
 - 6) bangunan, jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
 - 7) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 8) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;



- 9) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
dan
 - 10) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air, dengan ketentuan:
- a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, dengan ketentuan:
- a) memperhatikan fungsi kawasan sempadan;
 - b) permukiman eksisting diizinkan bersyarat dengan tidak menambah luasan;
 - c) tidak diizinkan pendirian permukiman baru;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - e) menyediakan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - f) menyediakan sistem tanggap bencana dan jalur evakuasi bencana;
 - g) mengikuti ketentuan teknis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - h) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang

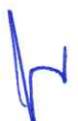


merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi dan tidak diizinkan untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan serta tidak mencemari lingkungan dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah, dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 3. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak



- mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 5. kegiatan terminal penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan stasiun penumpang dan barang kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelolaan tertentu untuk keperluan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan;
 9. kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi dan tidak diizinkan untuk diperpanjang kembali; dan
 10. kegiatan pertanian dan perikanan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman pedesaan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman pedesaan, meliputi:
1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman pedesaan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman pedesaan, meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengelolaan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;



3. penyediaan ruang terbuka hijau publik;
 4. penyediaan terminal penumpang tipe C; dan
 5. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. kawasan permukiman perdesaan sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau publik dengan alokasi ruang minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan permukiman yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan, maka ketinggian bangunan yang diizinkan dengan ketentuan:
 - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan tinggal landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (*superimpose*) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5 % (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian $(45+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
 - c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan $(45+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - d) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan

- (150+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
- e) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian (80+H) atau (100+H) atau (105+H) atau (120+H) atau (145+H) (sesuai klasifikasi landas pacu);
 - f) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - g) terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, yang sekarang ini menjadi penghalang akan tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) ketentuan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:



- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
 - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
 - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
 - 5) lereng dengan kemiringan $> 15\%$ (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
 - 6) bangunan, jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
 - 7) mengurangi tingkat kepadatan permukiman di daerah rawan bencana;
 - 8) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 9) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
 - 10) penyediaan sistem deteksi peringatan dini longsor; dan
 - 11) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi harus memperhatikan:
- 1) restorasi sungai;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir dan sistem jaringan drainase;
 - 3) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam



- pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
- 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 5) pembatasan bangunan baru;
 - 6) pembatasan pembangunan fasilitas umum; dan
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
 - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
 - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
 - 5) lereng dengan kemiringan $> 15\%$ (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
 - 6) bangunan, jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
 - 7) mengurangi tingkat kepadatan permukiman di daerah rawan bencana;



- 8) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 9) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - 10) penyediaan sistem deteksi peringatan dini; dan
 - 11) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f) kawasan rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 4) tidak diizinkan bangunan baru pada jalur sesar aktif; dan
 - 5) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi kawasan gempa sesar aktif.
- g) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
- a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan dengan ketentuan:
 - a) memperhatikan fungsi kawasan sempadan;
 - b) permukiman eksisting diizinkan bersyarat dengan tidak menambah luasan;
 - c) tidak diizinkan pendirian permukiman baru;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - e) menyediakan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - f) menyediakan sistem tanggap bencana dan jalur evakuasi bencana;
 - g) mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - h) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi dan tidak diizinkan untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya;



- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas yaitu fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional transportasi;
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan Transportasi yaitu dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
 - 1. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan, dengan ketentuan pendirian bangunan serta sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - 2. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - 2) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan

N

- 4) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
 - c) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 5) pembatasan bangunan baru; dan
 - 6) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
 - d) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
 - 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - 4) penyediaan sistem deteksi peringatan dini; dan
 - 5) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
- a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan



- e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
 - b) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemeliharaan aset-aset pertahanan;
 - 2. kegiatan bandara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan penyediaan kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
 - 4. kegiatan penyediaan rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan



3. kegiatan pertanian yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
 2. bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter;
 3. bebas dari tempat/ lokasi/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
 4. bebas dari kawasan industri bahan peledak.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. terdapat jaringan air, saluran listrik mandiri dan jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI;
 2. terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 (dua) jalur dengan kekuatan jalan 20 (dua puluh) ton untuk komando distrik militer;
 3. terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 4 (empat) jalur dengan kekuatan jalan 40 (empat puluh) ton untuk batalyon infanteri; dan
 4. sarana dan prasarana minimum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan lain dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan ketentuan pendirian bangunan dan prasarana pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;



2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir dan sistem jaringan drainase;
 - 2) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
 - b) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
 - 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - 4) penyediaan sistem deteksi peringatan dini; dan
 - 5) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan resapan air, meliputi:
 - a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan



- e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum
Pasal 86

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 87

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.



- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan/atau
 - b. 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.
- (7) Penilaian pelaksanaan KKPR menggunakan dokumen KKPR dan data pendukung yang diperoleh dari sistem OSS untuk KKPR berusaha.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (9) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (11) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (12) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR, maka KKPR dapat dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
Pasal 88

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum
Pasal 89

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c, merupakan
- 

- acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa penataan ruang; dan
 - d. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
 - (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
 - (4) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
 - (5) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Pasal 90

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4), dapat berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
 - (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- 

- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
Pasal 91

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5), dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau pemberian status tertentu.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.



- (4) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 92

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
 - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang dan tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 93

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 94

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;



- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka perangkat daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio, visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 95

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur



pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa:
- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR kabupaten;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang investasi.



Pasal 99

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang
- 

husus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.
- (3) Batas daerah yang digunakan dalam RTRW Kabupaten ini mengacu pada batas indikatif berdasarkan kesepakatan antar kabupaten, dimana batas wilayah definitif selanjutnya mengikuti ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, meliputi:
- a. batas daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - b. batas daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 213), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

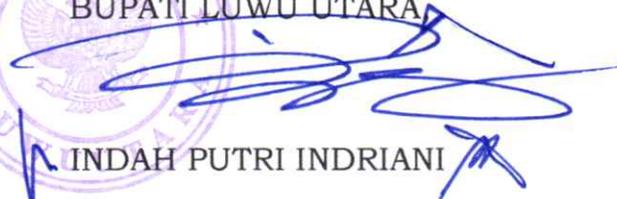
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2023

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM |  |


BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI

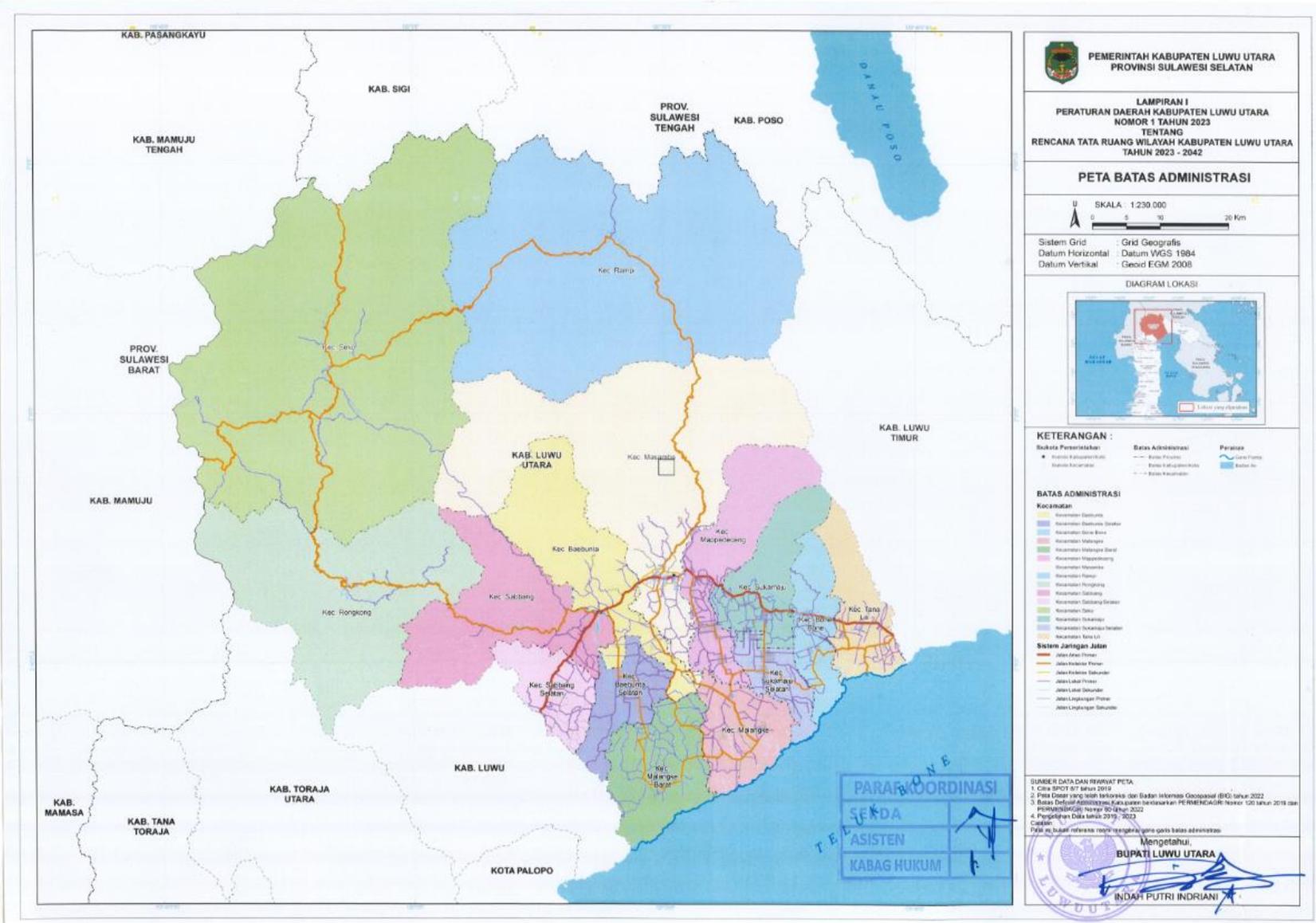
Diundangkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ARMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.01.003.23

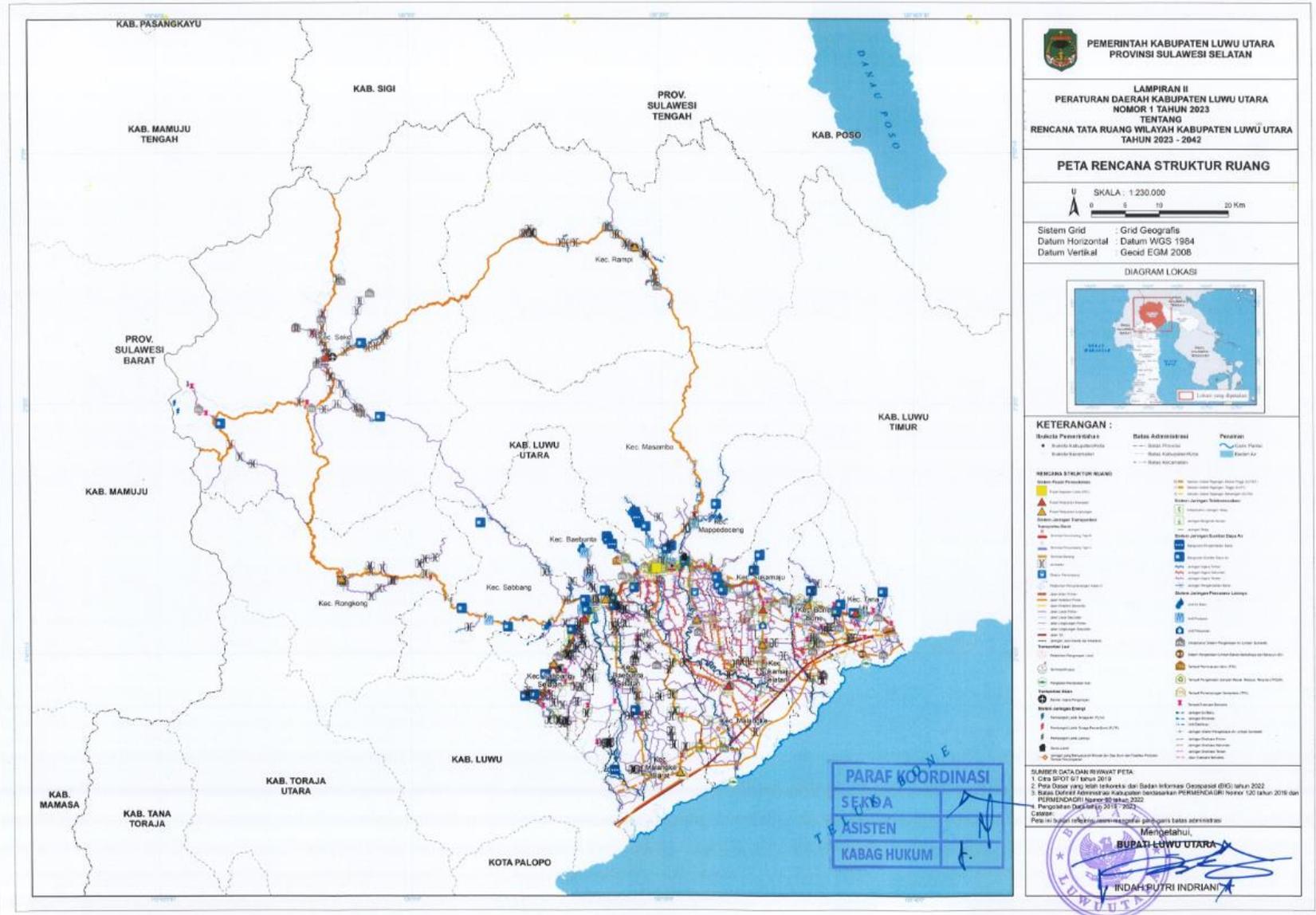
LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN LUWU UTARA



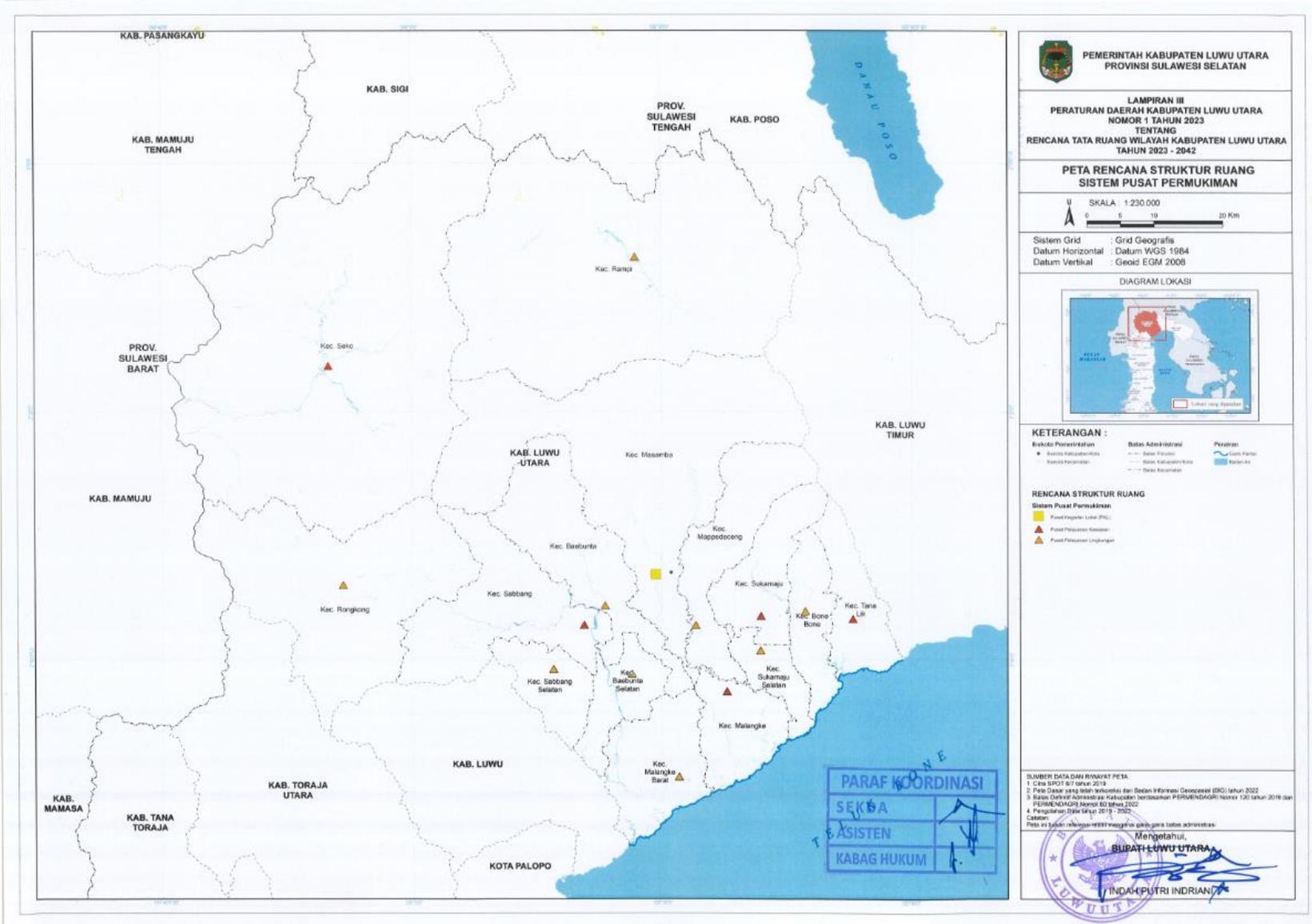
LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN LUWU UTARA



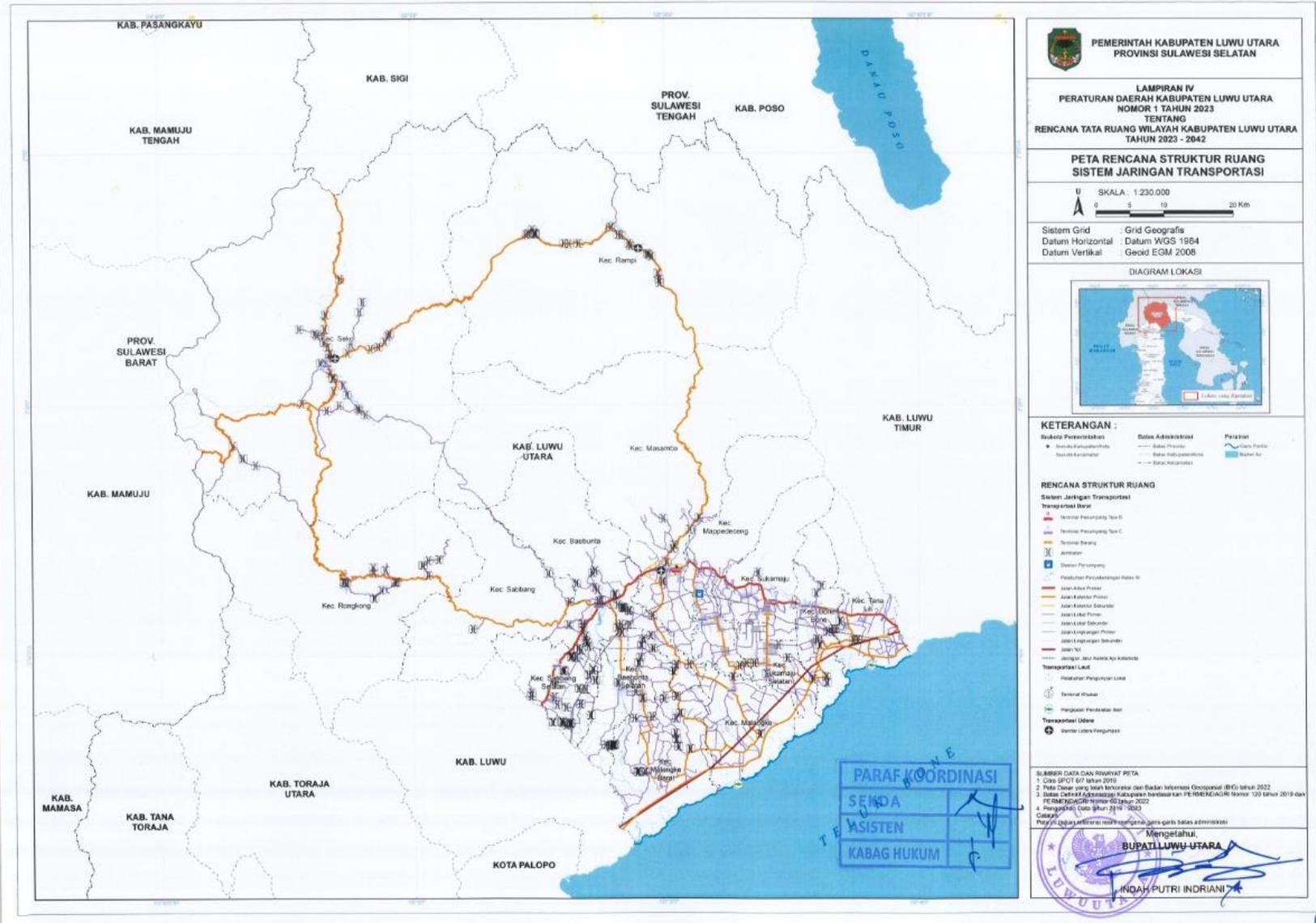
LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

JALAN LOKAL KABUPATEN LUWU UTARA

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|----|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | Jalan Lokal Primer | Kecamatan Baebunta | Awo-Awo - Marannu |
| 2 | | | Awo-Awo - Tolibukang |
| 3 | | | Babue - Putemata |
| 4 | | | Baebunta - Ponpes. Baburrahman |
| 5 | | | Baebunta - Rantepaccu |
| 6 | | | Baebunta - Salulemo |
| 7 | | | Baebunta-Salulemo |
| 8 | | | Bumi Harapan - Bolumpore |
| 9 | | | Bumi Harapan - Palandan |
| 10 | | | Bundaran Desa Salulemo |
| 11 | | | Lasumba- Muktitama |
| 12 | | | Makumpa - Kumbari |
| 13 | | | Makumpa - Sassa |
| 14 | | | Malimbu-Embonatana |
| 15 | | | Marampi - Sassa |
| 16 | | | Mario - Polewali |
| 17 | | | Palandan - Muktitama |
| 18 | | | Pongo - Mangkaluku |
| 19 | | | Radda - Meli |
| 20 | | | Radda - Perumahan Kelapa Gading |
| 21 | | | Radda - TPA Meli |
| 22 | | | Rantepaccu - Sassa |
| 23 | | | Rura Baru - To' Rea |
| 24 | | | Sabbang Loang - Patombe |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|----|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 25 | | Kecamatan Baebunta | Salassa - Sassa |
| 26 | | | Salulemo - Bolumpore |
| 27 | | | Salulemo - Bumi Harapan |
| 28 | | | Salulemo - Kariango |
| 29 | | | Salulemo-Lara I |
| 30 | | | Sassa - UPT Buso |
| 31 | | | Tandung - Putemata |
| 32 | | | Tarobok - Kadundung |
| 33 | | | Tarobok - Kariango |
| 34 | | | Tarobok - Petaian |
| 35 | | | Tarobok - Teteinduk |
| 36 | | | Awo-Awo - Marannu |
| 37 | | | Baebunta - Dadeko |
| 38 | | | Bakka - Pengkendekan |
| 39 | | Dadeko - Lawewe | |
| 40 | | Dandang - Teteuri | |
| 41 | | Lasumba- Muktitama | |
| 42 | | Lawewe - Limbong Wara | |
| 43 | | Lawewe - To'Galinggang | |
| 44 | | Lrg. 2B Dsn. Cempaka II | |
| 45 | | Muktijaya - Bringin Jaya (Lara I) | |
| 46 | | Muktitama - Jalan Belanda | |
| 47 | | Muktitama - Lara | |
| 48 | | Palandan - Muktitama | |

h

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|----|--------------|---------------------|------------------------------|
| 49 | | | Pengkendekan -Tinimpong |
| 50 | | | Salulemo-Lara I |
| 51 | | | Sarembo - Tinimpong |
| 52 | | | Talesse - Muktitama |
| 53 | | | Tandung - Babue |
| 54 | | | Tandung - Kalitata |
| 55 | | | Tandung - Lara |
| 56 | | | Tandung - Mukti Jaya |
| 57 | | | Tarobok - Kariango |
| 58 | | | Tarobok - Teteinduk |
| 59 | | | Tete Uri - Batualang |
| 60 | | | Tibusu - Beringin Jaya |
| 61 | | | Urukumpang - Cenning |
| 62 | | | Urukumpang - Londong Dou |
| 63 | | Kecamatan Bone Bone | Banyu Urip - Muktisari |
| 64 | | | Batang Tongka - Marobo |
| 65 | | | Bone-Bone - Pintu Air |
| 66 | | | Bone-Bone - Tamuku |
| 67 | | | Bone-Bone - UPT. Bantimurung |
| 68 | | | Jl. Kelinci |
| 69 | | | Lino - Kampung Bali |
| 70 | | | Muktisari - Landung |
| 71 | | | Muktisari - Mariri |
| 72 | | | Mulyorejo - Sukaraya |
| 73 | | | Patila - Makowong |
| 74 | | | Patila - Sidobinangun |
| 75 | | | Patoloan - DI. Kanjiro |
| 76 | | | Patoloan - Muktisari |
| 77 | | | Pembasean - Makowong |
| 78 | | | Pongko - Batang Tongka |
| 79 | | | Sadar - Kurui |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------------------|--|
| 80 | | | Seroja - Kebun Sawit |
| 81 | | | Sidobinangun - Sidomakmur |
| 82 | | | Sidomakmur - Jalan Pertanian |
| 83 | | | Sidomakmur - Kembang Makmur |
| 84 | | | Sidomakmur - Sidorukun |
| 85 | | | Sidomukti - Sidomakmur |
| 86 | | | Sukaraya - Sadar |
| 87 | | | Tamuku - Pongko |
| 88 | | | Tolangi - Landung |
| 89 | | Kecamatan Malangke | Belawa - Girikusuma |
| 90 | | | Belawa - Kampung Jawa |
| 91 | | | Biro - Tambak |
| 92 | | | Birue - Malangke Kecil |
| 93 | | | Gelombang - Salekoe |
| 94 | | | Jl. Desa Girikusuma - Kambisa - Tolada |
| 95 | | | Kambisa - Girikusuma |
| 96 | | | Lorong 2 Desa Tingkara |
| 97 | | | Makitta - Salekoe |
| 98 | | | Malangke - Makitta |
| 99 | | | Mario - To'lada |
| 100 | | | Pamombang - Salekoe |
| 101 | | | Pattimang - Biro |
| 102 | | | Pattimang - BPP. Malangke |
| 103 | | | Pattimang - Girikusuma |
| 104 | | | Pattimang - Pincepute |
| 105 | | | Petalandung - Girikusuma |
| 106 | | | Petalandung - Salubance |
| 107 | | | Petalandung - SDN. Salubance |
| 108 | | | Pince Pute - Tokke |
| 109 | | | Pincepute - PPI |
| 110 | | | Rampoang - Sumber Agung |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|-----------------------------|
| 111 | | | Sumber Agung Utara - To'Awo |
| 112 | | | Takkalala - Cappasolo |
| 113 | | | Takkalala - Salekoe |
| 114 | | | Tingkara - Putemata |
| 115 | | | To'lada - Benteng |
| 116 | | | To'lada - Girikusuma |
| 117 | | | To'lada - Lumu-Lumu |
| 118 | | | To'lada - Sumber Agung |
| 119 | | | Amassangan - Lante-Lante |
| 120 | | | Arusu - Kalitata |
| 121 | | | Baku-Baku - Kalitata |
| 122 | | | Baku-Baku - Katonantana |
| 123 | | | Bakung - Pembuniang |
| 124 | | | Batumasongko - Kalitata |
| 125 | | | Batumasongko - Tuara |
| 126 | | | Belawa - Lettekang |
| 127 | | | Biro - Tambak |
| 128 | | | Cenning - Layar Putih |
| 129 | | | Cenning - Pombakka |
| 130 | | | Dondo - Rantelangi |
| 131 | | | Kalitata - Mangkasa |
| 132 | | | Kalitata - Rawamakmur |
| 133 | | | Kalitata - Urukumpang |
| 134 | | | Kambisa - Girikusuma |
| 135 | | | Kambisa - Pangkunge |
| 136 | | | Kambuno - Tandung |
| 137 | | | Lawewe - Limbong Wara |
| 138 | | | Lettekang - Solo' |
| 139 | | | Lorong 2 Desa Tingkara |
| 140 | | | Panasae - Arusu |
| 141 | | | Panimbu - Kalitata |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|-------------------------------|
| 142 | | | Pattimang - Biro |
| 143 | | | Pembuniang - To'Tallang |
| 144 | | | Petalandung - Girikusuma |
| 145 | | | Petalandung - Salubance |
| 146 | | | Polejiwa - Arusu |
| 147 | | | Polejiwa - To'bolu |
| 148 | | | Pombakka - Bulu Londong |
| 149 | | | Pombakka - Sauru (Batas Luwu) |
| 150 | | | Pombakka - Welang-Pelang |
| 151 | | | Putemata - Petalandung |
| 152 | | | Tandung - Babue |
| 153 | | | Tandung - Kalitata |
| 154 | | | Tandung - Lara |
| 155 | | | Tandung - Putemata |
| 156 | | | Tandung - Tingkara |
| 157 | | | Tibusu - Beringin Jaya |
| 158 | | | Tingkara - Putemata |
| 159 | | | To Bakka - Kalitata |
| 160 | | | To'karua - To'katapi |
| 161 | | | To'katapi - Teppo |
| 162 | | | To'katapi - To'sipate |
| 163 | | | Tompe - Waelawi |
| 164 | | | To'tallang - Dondo |
| 165 | | | Udu - Petalandung |
| 166 | | | Urukumpang - Cenning |
| 167 | | | Urukumpang - Londong Dou |
| 168 | | | Waelawi - Labecce |
| 169 | | | Waelawi - TPI Waelawi |
| 170 | | | Waetuo - Lawani |
| 171 | | | Welang-Pelang - Lawaji |
| 172 | | | Benteng - Dusun Uja |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 173 | | | Beringin - Tambak Sari |
| 174 | | | Cendana Putih I - Kampung Bali |
| 175 | | | Cendana Putih I - Kapidi |
| 176 | | | Cendana Putih II - Cendana Putih I |
| 177 | | | Cendana Putih II - Jalan Pertanian |
| 178 | | | Dusun Uja 1 Desa Uraso |
| 179 | | | Dusun Uja 2 Desa Uraso |
| 180 | | | Galinggang - Sungai Baliase |
| 181 | | | Hasanah - Galinggang |
| 182 | | | Hasanah - Jembatan Gantung S. Uraso |
| 183 | | | Hasanah - Sungai Baliase |
| 184 | | | Jalan Samping SMP CP.I |
| 185 | | | Kampung Baru - Harapan |
| 186 | | | Kampung Baru - Kampung Bali |
| 187 | | Kecamatan Mappedeceng | Kampung Limbong - SMK 1 Masamba |
| 188 | | | Kapidi - Laira |
| 189 | | | Kapidi - To'lada |
| 190 | | | Kapidi - Ujung Matajang |
| 191 | | | Lampuawa - Cendana Putih I |
| 192 | | | Lampuawa - UPT. Pongkase |
| 193 | | | Lrg. 5 - Lrg. 6 Ds. Benteng |
| 194 | | | Mappedeceng - Nanna |
| 195 | | | Mappedeceng - Pandak |
| 196 | | | Mappedeceng - SMK 1 Masamba |
| 197 | | | Nanna - Kebun Rakyat |
| 198 | | | Porodoa - UPT Sepakat |
| 199 | | | Sumber Harum - Kebun Sawit |
| 200 | | | Sumberwangi - Mangale |
| 201 | | | Tambaksari - Industri Batu Bata |
| 202 | | | Tambaksari - Kampung Baru |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| 203 | | | Tanggul Mekar Jaya - Hasanah |
| 204 | | | Tarra Tallu - Jalan Pertanian |
| 205 | | | Tarra Tallu - Kaletio |
| 206 | | | Tarra Tallu - To'naka |
| 207 | | | To'naka - Cendana Putih I |
| 208 | | | To'naka - Uja |
| 209 | | | Transad - Sukadamai |
| 210 | | | Tulung Indah - Cendana Putih I |
| 211 | | | Ujung Matajang - Cendana Putih |
| 212 | | | Ujung Matajang - Galinggang |
| 213 | | | Uraso - Dusun Uja |
| 214 | | | Uraso - Kampung Bali |
| 215 | | | Uraso - Salumasapi |
| 216 | | | Uraso - SMPN. 3 Mappedeceng |
| 217 | | | Uraso - Uja |
| 218 | | Kecamatan Masamba | Balebo - Maipi |
| 219 | | | Baliase - Lingkar Selatan |
| 220 | | | Baliase - Pombakka |
| 221 | | | Bonde - Sumilin |
| 222 | | | Indokoro - Pongo |
| 223 | | | Jl. Eboni |
| 224 | | | Jl. Lingkungan Baliase 12 |
| 225 | | | Kapidi - Laira |
| 226 | | | Kasimbong - Laba |
| 227 | | | Kasimbong - Pasar Sentral Masamba |
| 228 | | | Laba - Lapapa |
| 229 | | | Lantang Tallang - Balakala |
| 230 | | | Lantang Tallang - UPT Lantang Tallang |
| 231 | | | Lumi - Kampung Kurra |
| 232 | | | Maipi - UPT. Maipi |
| 233 | | | Malimbu-Embonatana |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| 234 | | | Mappedeceng - Pandak |
| 235 | | | Mario - Polewali |
| 236 | | | Pincara - Salubomban |
| 237 | | | Pongo - Bolumpore |
| 238 | | | Pongo - Jemb. Gantung Pongo |
| 239 | | | Pongo - Mario |
| 240 | | | Rompu - Pombakka |
| 241 | | | Rompu - To'radda |
| 242 | | | Rura Baru - To' Rea |
| 243 | | | Salubomban - Patikala |
| 244 | | | Sumilin - Jalan Tani |
| 245 | | | Taman Siswa - Lingkar Selatan |
| 246 | | | Tingkara - Putemata |
| 247 | | | Tondok Tua - Sumilin |
| 248 | | Kecamatan Rampi | Onondoa - Batas Sul. Tengah |
| 249 | | | Ampolo - Salurante |
| 250 | | | Kanandede - Balanalu |
| 251 | | | Kanandede - Salukanan |
| 252 | | | Kanandede - Uri |
| 253 | | | Komba - Lassa |
| 254 | | Kecamatan Rongkong | Mabusa - Kariango |
| 255 | | | Makarate - Minanga |
| 256 | | | Rinding Allo - Manganan |
| 257 | | | Salu Tallang - Ampollo |
| 258 | | | Salu Tallang - Uri |
| 259 | | | Salutallang - Uri |
| 260 | | | Bakka - Pengkendekan |
| 261 | | Kecamatan Sabbang | Jl. Pasar Sabbang |
| 262 | | | Kantor Desa Pengkendekan - Tinimpong |
| 263 | | | Malimbu-Embonatana |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|-----------------------------|
| 264 | | | Marobo - BPP. Sabang |
| 265 | | | Masarang - Tumandi |
| 266 | | | Padang Sarre - Tinimpong |
| 267 | | | Pengkendekan -Tinimpong |
| 268 | | | Pongo - Mangkaluku |
| 269 | | | Rambakulu - Saremba |
| 270 | | | Sabbang - Po'legen |
| 271 | | | Salulimbong - Marobo |
| 272 | | | Salulimbong - Masarang |
| 273 | | | Salulimbong - SMA 1 Sabbang |
| 274 | | | Saremba - Tinimpong |
| 275 | | | Saremba-Mekarsari Jaya |
| 276 | | | Tandung - Salupaku |
| 277 | | | Tarobok - Kadundung |
| 278 | | | To'Ledan - Tinimpong |
| 279 | | | Batualang - Bone Subur |
| 280 | | | Dandang - Teteuri |
| 281 | | | Kalotok - Batualang |
| 282 | | | Kampung Baru - Rantepasang |
| 283 | | | Mari-Mari - To'Borong |
| 284 | | | Pompaniki - Kalotok |
| 285 | | | Pompaniki - Pongsamena |
| 286 | | | Pompaniki - To'angka |
| 287 | | | Rambakulu - Rante Bone |
| 288 | | | Rambakulu - Saremba |
| 289 | | | Saluampak - To'Katimbang |
| 290 | | | Saremba-Mekarsari Jaya |
| 291 | | | Tarue - Rante Bone |
| 292 | | | Tete Uri - Batualang |
| 293 | | | To'bebesuk - Mekarsari Jaya |
| 294 | | | To'borung - Batualang |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------|
| 295 | | | To'Ledan - Tinimpong |
| 296 | | | To'angka - Sarambualla |
| 297 | | | Torpedo Jaya -Rambakulu |
| 298 | | Kecamatan Seko | Bone - Parahaleang |
| 299 | | | Eno - Tanete |
| 300 | | | Hoyane - Patahe |
| 301 | | | Kampung Baru - Lengkong |
| 302 | | | Lodang - Padang Raya |
| 303 | | | Lodang - Tabang |
| 304 | | | Longa - Pohayaang |
| 305 | | | Mabusa - Kariango |
| 306 | | | Malimbu-Embonatana |
| 307 | | | Padang Raya - Bengke |
| 308 | | | Palandoan - Lambiri |
| 309 | | | Pokapaang - Hoyane |
| 310 | | | Pokapaang - Poak-Poak |
| 311 | | | Poyahaang - Pokapaang |
| 312 | | | Sae - Busak |
| 313 | | Singkalong - Lore | |
| 314 | | Sodangan - Lodang | |
| 315 | | Tanete - Bana | |
| 316 | | Kecamatan Sukamaju | Bone-Bone - UPT. Bantimurung |
| 317 | | | Buntu - Pamangkaan |
| 318 | | | Buntu - Tulung Indah |
| 319 | | | Cakaruddu - Buntu |
| 320 | | | Cakaruddu - Ketulungan |
| 321 | | | Cakaruddu - Wonosari |
| 322 | | | Jalan Samping SMP CP.I |
| 323 | | | Kaluku - Ketulungan |
| 324 | | | Kaluku - Sitinggil |
| 325 | | | Kaluku - SMA 1 Sukamaju |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------|
| 326 | | | Kaluku - Sukamaju |
| 327 | | | Kaluku - Tamboke |
| 328 | | | Kaluku - Torape |
| 329 | | | Kaluku - Tulung Sari |
| 330 | | | Ketulungan - Mulyasari |
| 331 | | | Lampuawa - Batas Desa Minanga Tallu |
| 332 | | | Lampuawa - Cendana Putih I |
| 333 | | | Lampuawa - Kalotik |
| 334 | | | Lampuawa - Salubuah |
| 335 | | | Lorong 10 Desa Tulung Sari |
| 336 | | | Lorong 2 Saptamarga - Sungai |
| 337 | | | Malengko - Tolangi |
| 338 | | | Minanga Tallu - Kampung Bali |
| 339 | | | Minanga Tallu - Kebun Sawit |
| 340 | | | Minanga Tallu - SMKN.1 Sukamaju |
| 341 | | | Mulyasari - Kalatiri |
| 342 | | | Mulyasari - Sukadamai |
| 343 | | | Pamangkaan - Gambara |
| 344 | | | Salulemo - Saptamarga |
| 345 | | | Salulemo - Sukamaju |
| 346 | | | Salulemo - Tolangi |
| 347 | | | Sidoraharjo - Malengko |
| 348 | | | Sidoraharjo - Mulyorejo |
| 349 | | | Sitinggil - Salulemo |
| 350 | | | SMA 1 Sukamaju - Salulemo |
| 351 | | | Sukadamai - Sidoraharjo |
| 352 | | | Sukadamai - Sukamukti |
| 353 | | | Sukamaju - Sukadamai |
| 354 | | | Sukamaju - Tolangi |
| 355 | | | Tamboke - Bendungan Kanjiro |
| 356 | | | Tamboke - Ketulungan |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas | |
|-----|--------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 357 | | | Tolangi - Landung | |
| 358 | | | Transad - Sukadamai | |
| 359 | | | Tulung Indah - Cendana Putih I | |
| 360 | | | Tulung Indah - Ketulungan | |
| 361 | | | Tulung Sari - Wonosari | |
| 362 | | | Wonosari - Sukamaju | |
| 363 | | | Wonosari - Waetuo | |
| 364 | | Kecamatan Sukamaju Selatan | Hasanah - Jembatan Gantung S. Uraso | |
| 365 | | | Kaluku - Subur | |
| 366 | | | Ladongi - Asorongan | |
| 367 | | | Ladongi - Latireng | |
| 368 | | | Ladongi - Palempa | |
| 369 | | | Lino - Kampung Bali | |
| 370 | | | Lino - Ladongi | |
| 371 | | | Mulyorejo - Banyuwangi | |
| 372 | | | Mulyorejo - Sukaraya | |
| 373 | | | Pamangkaan - Gambara | |
| 374 | | | Paomacang - Lino | |
| 375 | | | Rawamangun - Paomacang | |
| 376 | | | Sidoraharjo - Banyuwangi | |
| 377 | | | Sidoraharjo - Malengko | |
| 378 | | | Sidoraharjo - Mulyorejo | |
| 379 | | | Subur - Palempa | |
| 380 | | | Subur - Tallang-Tallang | |
| 381 | | | Sukadamai - Sidoraharjo | |
| 382 | | | Sukadamai - Sukamukti | |
| 383 | | | Sukaharapan - Bali Tengu | |
| 384 | | | Transad - Sukadamai | |
| 385 | | | Kecamatan Tana Lili | Bungadidi - Kapipe |
| 386 | | | | Bungadidi - Kebun Sawit |
| 387 | | | | Bungadidi - Poreang |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|-----------------------------|
| 388 | | | Bungadidi - Rantepulio |
| 389 | | | Bungadidi - Salusappang |
| 390 | | | Bungadidi - Tanete |
| 391 | | | Bungadidi - Ujung Tanah |
| 392 | | | Jl. Desa Poreang |
| 393 | | | Kapipe - BPP Tana Lili |
| 394 | | | Kapipe - Kebun Hibrida |
| 395 | | | Karondang - Bungato |
| 396 | | | Karondang - Tambak |
| 397 | | | Lorong 3 Kampung Bali |
| 398 | | | Minna - Patiai |
| 399 | | | Minna - Sumberdadi |
| 400 | | | Minna - Transad |
| 401 | | | Patiai - Kebun Sawit |
| 402 | | | Patiai - Rampoang |
| 403 | | | Patila - Balato |
| 404 | | | Patila - Kebun Pemuda |
| 405 | | | Patila - Lorong Binduru |
| 406 | | | Patila - Makowong |
| 407 | | | Patila - Sidobinangun |
| 408 | | | Poreang - Goppa |
| 409 | | | Poreang - SDN Poreang |
| 410 | | | Poreang - Ujung Tanah |
| 411 | | | Rampoang - Kebun Sawit |
| 412 | | | Rantepulio - Salusappang |
| 413 | | | SDN Poreang - Tanete |
| 414 | | | Sidobinangun - Sidomakmur |
| 415 | | | Sidobinangun - Sumberdadi |
| 416 | | | Sidomakmur - Kembang Makmur |
| 417 | | | Sidomakmur - Sidorukun |
| 418 | | | Sidomakmur - Tanah Tako |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|----------------------|---------------------|---|
| 419 | | | Sidomukti - Sidomakmur |
| 420 | | | Tanete - Poreang |
| 421 | | | Ujung Tanah - Jalan Pertanian |
| 1 | Jalan Lokal Sekunder | Kecamatan Baebunta | Jl. Elang Lingkungan Sanrasirua |
| 2 | | | Jl. Kakaktua Lingkungan Sanrasirua |
| 3 | | | Jl. Lingkungan Benteng |
| 4 | | | Jl. Lingkungan Salassa |
| 5 | | | Jl. Lingkungan Salassa - Benteng |
| 6 | | | Jl. Lingkungan Salassa-Benteng |
| 7 | | | Jl. Lingkungan Sambua 1 |
| 8 | | | Jl. Lingkungan Sambua 2 |
| 9 | | | Jl. Lingkungan Sanrasirua 1 |
| 10 | | | Jl. Lingkungan Sanrasirua 2 |
| 11 | | | Jl. Lingkungan Sanrasirua 3 |
| 12 | | | Jl. Lingkungan Sansrasirua - Sambua |
| 13 | | | Jl. Mesjid Nurul Amir Ling. Sanrasirua |
| 14 | | | Jl. SDN Limpomajang |
| 15 | | | Jl. SDN Sabbang Loang |
| 16 | | | Jl. SMAN 1 Baebunta |
| 17 | | | Salassa - Kebun Kakao |
| 18 | | | Salassa - Limpomajang |
| 19 | | | Salassa - Rantemalino |
| 20 | | | Salassa - Tarobok |
| 21 | | Kecamatan Bone Bone | DI. Kanjiro - Jl. Cengkeh |
| 22 | | | Jl. Belakang Pasar Bone-Bone - Jl. Tani |
| 23 | | | Jl. Cengkeh - Perumnas BTN |
| 24 | | | Jl. Depan Kantor Desa Patoloan |
| 25 | | | Jl. Depan Ponpes. Al-Falah - Tambang |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|----|--------------|--------|---|
| 26 | | | Jl. Depan Puskesmas - Mesjid Dusun Kanjiro |
| 27 | | | Jl. Durian |
| 28 | | | Jl. Harimau - Muktisari |
| 29 | | | Jl. Husaini - Saluran Irigasi |
| 30 | | | Jl. Kartini - Jl. S. Hasanuddin |
| 31 | | | Jl. Mangga - Perumnas BTN |
| 32 | | | Jl. Matirowali - Bantimurung |
| 33 | | | Jl. Matirowali - Dusun Bamba |
| 34 | | | Jl. Nangka |
| 35 | | | Jl. P. Diponegoro - Jl. Tani |
| 36 | | | Jl. Pekuburan - Makam |
| 37 | | | Jl. Ponpes Al-Falah |
| 38 | | | Jl. Puskesmas - Jl. Inspeksi DI Kanjiro |
| 39 | | | Jl. Rajawali -Sungai Kecil |
| 40 | | | Jl. S. Hasanuddin - SMA 1 Bone-Bone |
| 41 | | | Jl. Samping Lapangan Bone-Bone - Gudang |
| 42 | | | Jl. Samping Puskesmas - Lapangan |
| 43 | | | Lorong I - Jl. S. Hasanuddin |
| 44 | | | Lorong I Dusun Karang Kel. Bone-Bone |
| 45 | | | Lorong II Dsn. Tanimba - Jl. S. Hasanuddin |
| 46 | | | Lorong II Dusun Karang Kel. Bone-Bone |
| 47 | | | Lorong III A - Perumnas. BTN |
| 48 | | | Lorong III B - Kebun Sawit |
| 49 | | | Lorong IV Dsn. Tanimba - Mushollah Ar Rasyd |
| 50 | | | Lorong V Dsn. Tanimba - Jl. Tani |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas | |
|----|--------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 51 | | | Lorong VI Dsn. Tanimba - Jl. S. Hasanuddin | |
| 52 | | | Pasar Bone-Bone - Jl. Tani | |
| 53 | | | Perumnas BTN - Makam/Kebun Sawit | |
| 54 | | Kecamatan Malangke | Jl. Anggrek | |
| 55 | | | Jl. Batang Lumbang | |
| 56 | | | Jl. Kamboja | |
| 57 | | | Jl. Kenanga | |
| 58 | | | Jl. Mawar | |
| 59 | | | Jl. Melati | |
| 60 | | | Jl. Pelajar | |
| 61 | | | Jl. Pelajar - Jl. Teratai | |
| 62 | | | Jl. Pemuda | |
| 63 | | | Jl. Rambutan | |
| 64 | | | Jl. Rambutan - Jl. Teratai | |
| 65 | | | Jl. SMAN Malangke | |
| 66 | | | Jl. Teratai | |
| 67 | | | Kecamatan Malangke Barat | Amasangan - Pelabuhan Pao |
| 68 | | | | Baku-Baku - Kebun Sawit |
| 69 | | | | Baku-Baku - Labunao |
| 70 | | Jl. Abdul Halid | | |
| 71 | | Jl. Dusun Salaka 1 | | |
| 72 | | Jl. Dusun Salaka 2 | | |
| 73 | | Jl. Hantep | | |
| 74 | | Jl. La Sunu | | |
| 75 | | Jl. La Ubba | | |
| 76 | | Jl. Made Ali | | |
| 77 | | Jl. Petta Bolong | | |
| 78 | | Jl. Polsek Malangke Barat | | |
| 79 | | Jl. To' Semmaele | | |
| 80 | | | Jln. Dsn. Karondang 1 Ds. CP. II | |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--|--------------------------------|
| 81 | | Kecamatan Mappedeceng | Lorong 1 Desa Cendana Putih II |
| 82 | | | Lorong 2 Desa Cendana Putih II |
| 83 | | | Lorong 3 Desa Cendana Putih II |
| 84 | | | Lorong 4 Desa Cendana Putih II |
| 85 | | | Lorong 5 CP. II - Jalan Tani |
| 86 | | | Lorong 5 Desa Cendana Putih II |
| 87 | | | Lorong A Desa Cendana Putih II |
| 88 | | | Lorong B Desa Cendana Putih II |
| 89 | | | Kecamatan Masamba |
| 90 | | Hotel Natural - Tower | |
| 91 | | Jl. A. Pattiwara | |
| 92 | | Jl. Andi Attas | |
| 93 | | Jl. Andi Attas I | |
| 94 | | Jl. Andi Kasim | |
| 95 | | Jl. Baso Andi Rahim | |
| 96 | | Jl. Batara | |
| 97 | | Jl. Belanda | |
| 98 | | Jl. Beringin | |
| 99 | | Jl. Beringin I | |
| 100 | | Jl. Bhayangkara | |
| 101 | | Jl. Budi Utomo | |
| 102 | | Jl. Cendana | |
| 103 | | Jl. Cendana I | |
| 104 | | Jl. Damar | |
| 105 | | Jl. Damar 1 | |
| 106 | | Jl. Depan Polres Masamba | |
| 107 | | Jl. Depan SPBU Kapunna - Lingkar Selatan | |
| 108 | | Jl. Dewi Sartika | |
| 109 | | Jl. Dirgantara | |
| 110 | | Jl. DR. Sutomo | |
| 111 | | Jl. Durian | |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------|
| 112 | | | Jl. Eboni |
| 113 | | | Jl. HM. Kasim Kasmad |
| 114 | | | Jl. HOS Cokroaminoto |
| 115 | | | Jl. HOS. Cokroaminoto |
| 116 | | | Jl. Jambu |
| 117 | | | Jl. Kalapi |
| 118 | | | Jl. Kampung Jawa |
| 119 | | | Jl. Kantor Lurah Baliase |
| 120 | | | Jl. Kartini |
| 121 | | | Jl. Kartini - Jl. KH.Ahmad Dahlan |
| 122 | | | Jl. Kayu Bitti |
| 123 | | | Jl. Kayu Bitti I |
| 124 | | | Jl. Keadilan |
| 125 | | | Jl. Kebangkitan |
| 126 | | | Jl. Kel. Baliase I |
| 127 | | | Jl. Kel. Baliase II |
| 128 | | | Jl. Kel. Baliase III |
| 129 | | | Jl. Kel. Baliase IV |
| 130 | | | Jl. Kel. Baliase V |
| 131 | | | Jl. Kel. Baliase VI |
| 132 | | | Jl. Kel. Baliase VIII |
| 133 | | | Jl. Kelapa |
| 134 | | | Jl. Kenanga |
| 135 | | | Jl. Kenanga I |
| 136 | | | Jl. KH. Ahmad Dahlan |
| 137 | | | Jl. Ki Hajar Dewantara |
| 138 | | | Jl. Lagaligo |
| 139 | | | Jl. Lamarancina |
| 140 | | | Jl. Lamaranginang - Lingkar Selatan |
| 141 | | | Jl. Langsung |
| 142 | | | Jl. Lapangan Baloli |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|---|
| 143 | | | Jl. Lapangan Baloli I |
| 144 | | | Jl. Ling. Kapuna - Lingkar Utara |
| 145 | | | Jl. Lingkungan Baliase 10 |
| 146 | | | Jl. Lingkungan Baliase 11 |
| 147 | | | Jl. Lingkungan Desa Kamiri 4 |
| 148 | | | Jl. Lingkungan Desa Pandak |
| 149 | | | Jl. Lingkungan Kamiri 1 |
| 150 | | | Jl. Lingkungan Kamiri 2 |
| 151 | | | Jl. Lingkungan Kamiri 3 |
| 152 | | | Jl. Lingkungan Kasimbong 1 |
| 153 | | | Jl. Lingkungan Kasimbong 2 |
| 154 | | | Jl. Lingkungan Pontakden Kel. Kasimbong |
| 155 | | | Jl. Liwasarana Kel. Kasimbong |
| 156 | | | Jl. Mahoni |
| 157 | | | Jl. Makam Umum |
| 158 | | | Jl. Masamba Affair |
| 159 | | | Jl. Meranti |
| 160 | | | Jl. Meranti I |
| 161 | | | Jl. Mesjid Jammi |
| 162 | | | Jl. Mujahidin |
| 163 | | | Jl. Nanakan |
| 164 | | | Jl. Nangka |
| 165 | | | Jl. Nenas |
| 166 | | | Jl. Otonomi |
| 167 | | | Jl. Pajora |
| 168 | | | Jl. Pasar Sentral Masamba I |
| 169 | | | Jl. Pasar Sentral Masamba II |
| 170 | | | Jl. Pasar Sentral Masamba III |
| 171 | | | Jl. Pasar Sentral Masamba IV |
| 172 | | | Jl. Pasar Sentral Masamba V |
| 173 | | | Jl. PDAM Masamba |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|---|
| 174 | | | Jl. Pemuda |
| 175 | | | Jl. Pemuda - Lingkar Utara |
| 176 | | | Jl. Pemuda I |
| 177 | | | Jl. Pendidikan |
| 178 | | | Jl. Perum. Bunga Masamba - Lingkar Selatan |
| 179 | | | Jl. Perum. Simpursiang |
| 180 | | | Jl. Potlot |
| 181 | | | Jl. Pramuka |
| 182 | | | Jl. Rambutan |
| 183 | | | Jl. S. Baliase |
| 184 | | | Jl. Salak |
| 185 | | | Jl. Salawati Daud |
| 186 | | | Jl. Samping Hotel Natural |
| 187 | | | Jl. Samping Hotel Natural I |
| 188 | | | Jl. Samping SD Matoto |
| 189 | | | Jl. Samping SMA 1 Masamba |
| 190 | | | Jl. Samping Taman Kota |
| 191 | | | Jl. Sawerigading |
| 192 | | | Jl. Sawerigading I |
| 193 | | | Jl. Sentra Bisnis 1 |
| 194 | | | Jl. Sentra Bisnis 2 |
| 195 | | | Jl. Sentra Bisnis Masamba |
| 196 | | | Jl. Setia Budi |
| 197 | | | Jl. Simpursiang |
| 198 | | | Jl. Simpursiang - Lingkar Selatan |
| 199 | | | Jl. Simpursiang I |
| 200 | | | Jl. Simpursiang Kel. Kasimbong |
| 201 | | | Jl. Syuhada |
| 202 | | | Jl. Taman Siswa |
| 203 | | | Jl. Tentara Pelajar |
| 204 | | | Jl. Terminal Masamba |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 205 | | | Jl. Tomakakka |
| 206 | | | Kamiri - Baloli |
| 207 | | | Kapuna - Taman Siswa |
| 208 | | | Kasambi - Lingkar Selatan |
| 209 | | | Lorong Bugis |
| 210 | | | Lorong Jawa |
| 211 | | | Lrg. 1 Desa Pandak |
| 212 | | | Lrg. 2 Desa Pandak |
| 213 | | | Lrg. 3 Desa Pandak |
| 214 | | | Lrg. 4 Desa Pandak |
| 215 | | | Lrg. 5 Desa Pandak |
| 216 | | | Pandak - Jl. Tani |
| 217 | | | Pandak - Lingkar Selatan |
| 218 | | | Pasar Lama - Sa'pek |
| 219 | | Kecamatan Rampi | Lorong 1 Desa Onondoa |
| 220 | | | Lorong 2 Desa Onondoa |
| 221 | | | Onondoa - Kantor Camat Rampi |
| 222 | | Kecamatan Rongkong | Boronglewa - Paranta |
| 223 | | | Boronglewa - Polegen |
| 224 | | | Limbong - Luarang |
| 225 | | | Polegen - Luarang |
| 226 | | | Salutallang - Boronglewa |
| 227 | | Salutallang - Limbong | |
| 228 | | Kecamatan Sabbang | Bakka - Kadundung |
| 229 | | | Jl. Andi Kampasu |
| 230 | | | Jl. Andi Mappasele |
| 231 | | | Jl. Pendidikan |
| 232 | | | Jl. Salulimbong 1 |
| 233 | | | Jl. Salulimbong 2 |
| 234 | | | Salassa - Kebun Kakao |
| 235 | | | Jl. Bitue |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas | |
|-----|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 236 | | Kecamatan Seko | Jl. Garuda | |
| 237 | | | Jl. Kambuno | |
| 238 | | | Jl. Ma'aru Tanning | |
| 239 | | | Jl. Patarang Keang | |
| 240 | | | Jl. Punghuloi | |
| 241 | | | Jl. Talamia | |
| 242 | | | Jl. Tangkudo | |
| 243 | | | Jl. Tarahoang | |
| 244 | | | Jl. Taratang | |
| 245 | | | Jl. Tasa'pa | |
| 246 | | | Jl. Tatidung | |
| 247 | | | Jl. Veteran | |
| 248 | | | Kecamatan Sukamaju | Jalan Samping Pasar Sukamaju |
| 249 | | | | Jalan Utara Lapangan Sukamaju |
| 250 | | Lorong 1 A Desa Sukamaju | | |
| 251 | | Lorong 1 B Desa Sukamaju | | |
| 252 | | Lorong 10 A Desa Sukamaju | | |
| 253 | | Lorong 10 B Desa Sukamaju | | |
| 254 | | Lorong 11 Desa Sukamaju | | |
| 255 | | Lorong 2 A Desa Sukamaju | | |
| 256 | | Lorong 2 B Desa Sukamaju | | |
| 257 | | Lorong 3 A Desa Sukamaju | | |
| 258 | | Lorong 3 B Desa Sukamaju | | |
| 259 | | Lorong 4 A Desa Sukamaju | | |
| 260 | | Lorong 5 A Desa Sukamaju | | |
| 261 | | Lorong 5 B Desa Sukamaju | | |
| 262 | | Lorong 7 A Desa Sukamaju | | |
| 263 | | Lorong 7 B Desa Sukamaju | | |
| 264 | | Lorong 8 A Desa Sukamaju | | |
| 265 | | Lorong 8 B Desa Sukamaju | | |
| 266 | | Lorong 9 A Desa Sukamaju | | |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|----------------------|--------------------------|
| 267 | | | Lorong 9 B Desa Sukamaju |
| 268 | | | Ruas I Desa Sukamaju |
| 269 | | | Ruas II Desa Sukamaju |
| 270 | | | Ruas III Desa Sukamaju |
| 271 | | | Ruas IV Desa Sukamaju |
| 272 | | Ruas V Desa Sukamaju | |
| 273 | | Kecamatan Tana Lili | Lorong 1 Ds. Sumberdadi |
| 274 | | | Lorong 3 Ds. Sumberdadi |
| 275 | | | Lorong 4 Ds. Sumberdadi |
| 276 | | | Lorong 5 Ds. Sumberdadi |
| 277 | | | Lorong 6 Ds. Sumberdadi |

Jalan Lingkungan Kabupaten Luwu Utara

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|----|-------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Jalan Lingkungan Primer | Kecamatan Baebunta Selatan | Lorong 4 Ds. Mekarsari Jaya |
| 2 | | | Pondan - Sumpira |
| 3 | | Kecamatan Bone Bone | Jl. Saluran Irigasi - Jl. Muktisari |
| 4 | | | Muktisari - Jembatan Gantung |
| 5 | | | Rante Malona - Dsn. Banyusari |
| 6 | | Kecamatan Malangke | Birue - Padang |
| 7 | | | Lorong 1 Desa Tingkara |
| 8 | | | Lorong 3 Desa Tingkara |
| 9 | | | Malangke Kecil - Cappasolo |
| 10 | | | Pattimang - BPP. Malangke |
| 11 | | | Pince Pute - Tokke |
| 12 | | | Sumberagung - Trans-AL |
| 13 | | Kecamatan Malangke Barat | Baku-Baku - SMPN 3 Malangke Barat |
| 14 | | | Bakung - Waelawi |
| 15 | | | Labbu - Waelawi |
| 16 | | | Lawewe - Limbong Wara |
| 17 | | Kecamatan Mappedeceng | Lorong 9 A Desa Cendana Putih I |
| 18 | | | Tarra Tallu - Kebun Coklat |
| 19 | | | To'naka - Cendana Putih I |
| 20 | | Kecamatan Masamba | Jl. Nangka I |
| 21 | | Kecamatan Sabbang Selatan | Lorong 4 Ds. Mekarsari Jaya |
| 22 | | | To'borung - To'katimbang |
| 23 | | | Torpedo Jaya -Rambakulu |
| 24 | | Kecamatan Seko | Jl. Punghuloi |
| 25 | | Kecamatan Sukamaju | Buntu - Jemb. S. Lampuawa |
| 26 | | | Lorong 1 Saptamarga - Kebun Kelapa Sawit |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas | |
|----|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 27 | Jalan Lingkungan Sekunder | Kecamatan Sukamaju Selatan | Lorong 10 Saptamarga - Kebun | |
| 28 | | | Lorong 2 B Desa Ketulungan | |
| 29 | | | Lorong 2 Desa Wonosari | |
| 30 | | | Lorong 9 Saptamarga - Dusun Tamboke | |
| 31 | | | Lorong A Dusun Tamboke | |
| 32 | | | Lorong B - Dusun Tamboke | |
| 33 | | | Mulyasari - Sidoraharjo | |
| 34 | | | Mulyasari - Sukadamai | |
| 35 | | | Sukamukti - Jalan Pertanian | |
| 36 | | | Tolangi - Sidoraharjo | |
| 37 | | | Kecamatan Tana Lili | Ladongi - Mesjid Latireng |
| 38 | | | | Lino - Cappabatana |
| 39 | | | | Lino - Ujung Timur |
| 40 | | | | Mulyasari - Sidoraharjo |
| 41 | | Sidoraharjo - Banyuwangi | | |
| 42 | | Sidoraharjo - Mulyorejo | | |
| 43 | | Sukamukti - Jalan Pertanian | | |
| 44 | | Tolangi - Sidoraharjo | | |
| 45 | | Kecamatan Baebunta | | Bungadidi - SMPN 3 Bungadidi |
| 46 | | | | Perum BTN Citra Patila |
| 1 | | Kecamatan Baebunta | Jl. Lingkungan 1 Desa Baebunta | |
| 2 | | | Jl. Lingkungan 2 Desa Baebunta | |
| 3 | | | Jl. Lingkungan 3 Desa Baebunta | |
| 4 | | | Jl. Lingkungan 4 Desa Baebunta | |
| 5 | | | Jl. Lingkungan 5 Desa Baebunta | |
| 6 | | | Jl. Puang Mataena | |
| 7 | | | Lorong 5 Desa Putemata | |
| 8 | | | Ruas Desa Sassa | |
| 9 | | | Dsn. Melati - Ktr. Desa B. Jaya | |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|----|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 10 | | Kecamatan Baebunta Selatan | Jl. Abadi Desa Muktijaya |
| 11 | | | Jl. Andi Jemma Desa Muktijaya |
| 12 | | | Jl. Binturu Desa Muktijaya |
| 13 | | | Jl. Datuk Sulaiman Desa Muktijaya |
| 14 | | | Jl. Gunungsari Desa Muktijaya |
| 15 | | | Jl. Harapan Desa Muktijaya |
| 16 | | | Jl. Jayaprana Desa Muktijaya |
| 17 | | | Jl. Kemakmuran Desa Muktijaya |
| 18 | | | Jl. Ngurah Rai Desa Muktijaya |
| 19 | | | Jl. Pandanwangi Desa Muktijaya |
| 20 | | | Jl. Panimbu Desa Muktijaya |
| 21 | | | Jl. Rawasari Desa Muktijaya |
| 22 | | | Jl. Santana Desa Muktijaya |
| 23 | | | Jl. Sawerigading Desa Muktijaya |
| 24 | | | Jl. Segeri Desa Muktijaya |
| 25 | | | Jl. Setiatani Desa Muktijaya |
| 26 | | | Jl. Sidodadi Desa Muktijaya |
| 27 | | | Jl. Sidomakmur Desa Muktijaya |
| 28 | | | Jl. Sidomuncul Desa Muktijaya |
| 29 | | | Jl. Sidorukun Desa Muktijaya |
| 30 | | | Jl. Sipatunru Desa Muktijaya |
| 31 | | | Jl. Sukatani Desa Muktijaya |
| 32 | | | Jl. Sultan Hasanuddin Desa Muktijaya |
| 33 | | | Jl. Tanimurni Desa Muktijaya |
| 34 | | | Jl. Transmigrasi Desa Muktijaya |
| 35 | | | Jl. Veteran Desa Muktijaya |
| 36 | | | Jl. Wiratani Desa Muktijaya |
| 37 | | | Jl. Wirausaha Desa Muktijaya |
| 38 | | | Jl. Wonogiri Desa Muktijaya |
| 39 | | | Ktr. Desa B. Jaya - Dsn. Mawar |
| 40 | | | Lorong 1 Ds. Mekarsari Jaya |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|----|--------------|--------|-------------------------------------|
| 41 | | | Lorong 2 Ds. Mekarsari Jaya |
| 42 | | | Lorong 3 Ds. Mekarsari Jaya |
| 43 | | | Lorong 4 Ds. Mekarsari Jaya |
| 44 | | | Lorong 5 Ds. Mekarsari Jaya |
| 45 | | | Lrg. 1 - 5 Dsn. Anggrek |
| 46 | | | Lrg. 1 Dsn. Anggrek |
| 47 | | | Lrg. 1 Dsn. Mawar |
| 48 | | | Lrg. 1 Dsn. Resi |
| 49 | | | Lrg. 1A - 7A Dusun Karya Mulya |
| 50 | | | Lrg. 1A Dsn. Campao |
| 51 | | | Lrg. 1A Dsn. Cempaka I |
| 52 | | | Lrg. 1A Dsn. Cempaka II |
| 53 | | | Lrg. 1A Dsn. Melati |
| 54 | | | Lrg. 1A Dsn. Mengkaluso |
| 55 | | | Lrg. 1A Dsn. Seruni |
| 56 | | | Lrg. 1A Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 57 | | | Lrg. 1B - 7B Dusun Karya Mulya |
| 58 | | | Lrg. 1B Dsn. Campao |
| 59 | | | Lrg. 1B Dsn. Cempaka I |
| 60 | | | Lrg. 1B Dsn. Kalidong |
| 61 | | | Lrg. 1B Dsn. Seruni |
| 62 | | | Lrg. 1B Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 63 | | | Lrg. 2 - 4 Dsn. Cempaka I |
| 64 | | | Lrg. 2 Dsn. Anggrek |
| 65 | | | Lrg. 2 Dsn. Mawar |
| 66 | | | Lrg. 2 Dsn. Resi |
| 67 | | | Lrg. 2A Dsn. Campao |
| 68 | | | Lrg. 2A Dsn. Cempaka II |
| 69 | | | Lrg. 2A Dsn. Melati |
| 70 | | | Lrg. 2A Dsn. Mengkaluso |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|----|--------------|--------|-------------------------------------|
| 71 | | | Lrg. 2A Dsn. Seruni |
| 72 | | | Lrg. 2A Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 73 | | | Lrg. 2B Dsn. Campao |
| 74 | | | Lrg. 2B Dsn. Kalidong |
| 75 | | | Lrg. 2B Dsn. Melati |
| 76 | | | Lrg. 2B Dsn. Seruni |
| 77 | | | Lrg. 2B Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 78 | | | Lrg. 3 Dsn Cempaka I |
| 79 | | | Lrg. 3 Dsn. Mawar |
| 80 | | | Lrg. 3 Dsn. Resi |
| 81 | | | Lrg. 3A Dsn. Campao |
| 82 | | | Lrg. 3A Dsn. Cempaka II |
| 83 | | | Lrg. 3A Dsn. Mengkaluso |
| 84 | | | Lrg. 3A Dsn. Seruni |
| 85 | | | Lrg. 3A Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 86 | | | Lrg. 3B Dsn. Campao |
| 87 | | | Lrg. 3B Dsn. Kalidong |
| 88 | | | Lrg. 3B Dsn. Seruni |
| 89 | | | Lrg. 3B Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 90 | | | Lrg. 4 Dsn Cempaka I |
| 91 | | | Lrg. 4 Dsn. Anggrek |
| 92 | | | Lrg. 4 Dsn. Mawar |
| 93 | | | Lrg. 4A Dsn. Campao |
| 94 | | | Lrg. 4A Dsn. Mengkaluso |
| 95 | | | Lrg. 4A Dsn. Seruni |
| 96 | | | Lrg. 4A Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 97 | | | Lrg. 4B Dsn. Campao |
| 98 | | | Lrg. 4B Dsn. Kalidong |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------|
| 99 | | | Lrg. 4B Dsn. Seruni |
| 100 | | | Lrg. 5 Dsn. Mawar |
| 101 | | | Lrg. 5A Dsn. Mengkaluso |
| 102 | | | Lrg. 5A Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 103 | | | Lrg. 5B Dsn. Kalidong |
| 104 | | | Lrg. 5B Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 105 | | | Lrg. 6A Dsn. Mengkaluso |
| 106 | | | Lrg. 6A Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 107 | | | Lrg. 6B Dsn. Kalidong |
| 108 | | | Lrg. 6B Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 109 | | | Lrg. 7A Dsn. Mengkaluso |
| 110 | | | Lrg. 7A Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 111 | | | Lrg. 7B Dsn. Kalidong |
| 112 | | | Lrg. 7B Dusun Karya Mulya Desa Lara |
| 113 | | | Lrg. 8B Dsn. Kalidong |
| 114 | | | Muktitama - Campao |
| 115 | | | Muktitama - Lrg. 3B Campao |
| 116 | | | Bone-Bone - SMK 1 Bone-Bone |
| 117 | | | Bone-Bone - SMPN 3 |
| 118 | | | Dusun Sangalla - Jl. Tani |
| 119 | | | Jalan Samping Tanggul Sidomakmur |
| 120 | | | Jl. A. Yani |
| 121 | | | Jl. Anggrek |
| 122 | | | Jl. Badak |
| 123 | | | Jl. Bangau |
| 124 | | | Jl. Battileng - Tambak/Empang |
| 125 | | | Jl. Bosi-Bosi Dsn. Sepakat |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--------------------------------|
| 126 | | | Jl. Depan Mesjid Al-Ikhlash |
| 127 | | | Jl. Durian |
| 128 | | | Jl. Elang |
| 129 | | | Jl. Garuda |
| 130 | | | Jl. Imam Bonjol |
| 131 | | | Jl. Jeruk |
| 132 | | | Jl. Kakaktua |
| 133 | | | Jl. Kalawang Dsn. Sepakat |
| 134 | | | Jl. Kasuari |
| 135 | | | Jl. Kelapa |
| 136 | | | Jl. Kelinci |
| 137 | | | Jl. Lanipa - Tambak/Empang |
| 138 | | | Jl. Lapangan |
| 139 | | | Jl. Lingkar Lapangan Sidomukti |
| 140 | | | Jl. Madarasah Ibtidaiyah |
| 141 | | | Jl. Mekar Jaya |
| 142 | | | Jl. Melati |
| 143 | | | Jl. Merpati |
| 144 | | | Jl. Mesjid Nurul Huda |
| 145 | | | Jl. Nangka |
| 146 | | | Jl. Patimura |
| 147 | | | Jl. Pekuburan |
| 148 | | | Jl. Penggilingan Padi |
| 149 | | | Jl. Rabat Beton |
| 150 | | | Jl. Rajawali |
| 151 | | | Jl. Rambutan |
| 152 | | | Jl. Rambutan - Jl. Kelapa |
| 153 | | | Jl. Rambutan (Tugu) |
| 154 | | | Jl. Rusa (Makam) |
| 155 | | | Jl. Sangalla |
| 156 | | | Jl. Singa |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 157 | | | Jl. Sungai Ba' |
| 158 | | | Jl. Tambak |
| 159 | | | Jl. Teratai |
| 160 | | | Lanjutan Jl. Kelapa |
| 161 | | | Lanjutan Lorong 4 B Dsn. Sidodadi |
| 162 | | | Lorong 1 - Lorong 6 Utara Ds. Patila |
| 163 | | | Lorong 1 A - Lorong 8. A |
| 164 | | | Lorong 1 A Dsn. Sidodadi |
| 165 | | | Lorong 1 B Dsn. Sidodadi |
| 166 | | | Lorong 1 Banyu Urip |
| 167 | | | Lorong 1 Kamp. Jawa- Jl.Poros Sidomakmur |
| 168 | | | Lorong 1 Kampung Bali |
| 169 | | | Lorong 1 Kampung Jawa |
| 170 | | | Lorong 1 Pembasean Ds. Patila |
| 171 | | | Lorong 1 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 172 | | | Lorong 10 A. Banyu Urip |
| 173 | | | Lorong 10 B. Banyu Urip |
| 174 | | | Lorong 12 Banyu Urip |
| 175 | | | Lorong 2 A Dsn. Sidodadi |
| 176 | | | Lorong 2 B Dsn. Sidodadi |
| 177 | | | Lorong 2 Banyu Urip |
| 178 | | | Lorong 2 Kampung Jawa |
| 179 | | | Lorong 2 Pembasean Ds. Patila |
| 180 | | | Lorong 2 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 181 | | | Lorong 3 A Dsn. Sidodadi |
| 182 | | | Lorong 3 B Dsn. Sidodadi |
| 183 | | | Lorong 3 Banyu Urip |
| 184 | | | Lorong 3 Kampung Jawa |
| 185 | | | Lorong 3 Pembasean Ds. Patila |
| 186 | | | Lorong 3 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 187 | | | Lorong 4 A Dsn. Sidodadi |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 188 | | | Lorong 4 B Dsn. Sidodadi |
| 189 | | | Lorong 4 Banyu Urip |
| 190 | | | Lorong 4 Pembasean Ds. Patila |
| 191 | | | Lorong 4 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 192 | | | Lorong 5 A Dsn. Sidodadi |
| 193 | | | Lorong 5 B Dsn. Sidodadi |
| 194 | | | Lorong 5 Banyu Urip |
| 195 | | | Lorong 5 Pembasean Ds. Patila |
| 196 | | | Lorong 5 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 197 | | | Lorong 6 - Lorong 1 Pembasean Ds. Patila |
| 198 | | | Lorong 6 A Dsn. Sidodadi |
| 199 | | | Lorong 6 Banyu Urip |
| 200 | | | Lorong 6 Pembasean Ds. Patila |
| 201 | | | Lorong 6 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 202 | | | Lorong 7 A Dsn. Sidodadi |
| 203 | | | Lorong 7 B Dsn. Sidodadi |
| 204 | | | Lorong 7 Banyu Urip |
| 205 | | | Lorong 7 Pembasean Ds. Patila |
| 206 | | | Lorong 7 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 207 | | | Lorong 8 A Dsn. Sidodadi |
| 208 | | | Lorong 8 B Dsn. Sidodadi |
| 209 | | | Lorong 8 Banyu Urip |
| 210 | | | Lorong 8 Pembasean Ds. Patila |
| 211 | | | Lorong 9 Banyu Urip |
| 212 | | | Lorong I |
| 213 | | | Lorong I Dsn. Cinta Mulia |
| 214 | | | Lorong I. B Muktisari/ Jl. Mawar |
| 215 | | | Lorong II |
| 216 | | | Lorong II Dsn. Cinta Mulia |
| 217 | | | Lorong III |
| 218 | | | Lorong III A Muktisari |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------|
| 219 | | | Lorong III Dsn. Cinta Mulia |
| 220 | | | Lorong III Sukaraya |
| 221 | | | Lorong IV |
| 222 | | | Lorong IV A Muktisari |
| 223 | | | Lorong IV B Muktisari - Persawahan |
| 224 | | | Lorong IV Dsn. Cinta Mulia |
| 225 | | | Lorong IV. B Muktisari |
| 226 | | | Lorong Tengah Banyu Urip |
| 227 | | | Lorong V - Jemb. Pongko |
| 228 | | | Lorong V Dsn. Cinta Mulia |
| 229 | | | Lorong VI Dsn. Cinta Mulia |
| 230 | | | Lorong VI. A Muktisari / Jl. Pinang |
| 231 | | | Lorong VI. B/ Jl. Teratai |
| 232 | | | Lorong VII. A Muktisari |
| 233 | | | Lr. 0 Sukaraya - DI. Bone-Bone |
| 234 | | | Lr. 8 Sukaraya - DI. Bone-Bone |
| 235 | | | Girikusuma - Unit 80 |
| 236 | | | Jl. Desa Girikusuma |
| 237 | | | Lorong 1 Desa Girikusuma |
| 238 | | | Lorong 2 Desa Girikusuma |
| 239 | | | Lorong 3 Desa Girikusuma |
| 240 | | | Lorong 4 Desa Girikusuma |
| 241 | | | Lorong A Desa Girikusuma |
| 242 | | | Lorong B Desa Girikusuma |
| 243 | | | Lorong C Desa Girikusuma |
| 244 | | | Perumahan Trans. AL Lorong 1 |
| 245 | | | Perumahan Trans. AL Lorong 2 |
| 246 | | | Perumahan Trans. AL Lorong 3 |
| 247 | | | Perumahan Trans. AL Lorong 4 |
| 248 | | | Perumahan Trans. AL Lorong 5 |
| 249 | | | Perumahan Trans. AL Lorong Tengah |

Kecamatan
Malangke

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 250 | | | Perumahan Trans. AL Lorong Utara |
| 251 | | | Tolada - Salekoe |
| 252 | | Kecamatan Malangke Barat | Jl. Hidayatullah |
| 253 | | | Kalitata - Panimbu |
| 254 | | | Lrg. 1 A. - 5 A Putemata |
| 255 | | | Lrg. 1 A. Putemata |
| 256 | | | Lrg. 1 B. - 5 B Putemata |
| 257 | | | Lrg. 1 B. Putemata |
| 258 | | | Lrg. 1 Desa Kalitata |
| 259 | | | Lrg. 1 Pembuniang |
| 260 | | | Lrg. 2 A. Putemata |
| 261 | | | Lrg. 2 B. Putemata |
| 262 | | | Lrg. 2 Pembuniang |
| 263 | | | Lrg. 3 A. Putemata |
| 264 | | | Lrg. 3 B. Putemata |
| 265 | | | Lrg. 3 Desa Kalitata |
| 266 | | | Lrg. 3 Pembuniang |
| 267 | | | Lrg. 4 A. Putemata |
| 268 | | | Lrg. 4 B. Putemata |
| 269 | | | Lrg. 4 Pembuniang |
| 270 | | | Lrg. 5 A. Putemata |
| 271 | | | Lrg. 5 B. Putemata |
| 272 | | | Lrg. 5 Pembuniang |
| 273 | | | Lrg. A Pembuniang |
| 274 | | | Lrg. B Pembuniang |
| 275 | | | Lrg. C Pembuniang |
| 276 | | Kecamatan Mappedeceng | Batas CP - Poros Kapidi Tolada |
| 277 | | | Cendana Putih - Jalan Tani 1 |
| 278 | | | Cendana Putih - Jalan Tani 2 |
| 279 | | | CP. I - Jembatan Gantung Swakarsa |
| 280 | | | Dsn. Mertasari Ds. CP - Jalan Tani |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|-----------------------------------|
| 281 | | | Dusun Harapan - Kebun Sawit |
| 282 | | | Gang 1 Barat Desa Cendana Putih I |
| 283 | | | Gang 1 Desa Benteng |
| 284 | | | Gang 1 Timur Desa Cendana Putih |
| 285 | | | Gang 1 Timur Desa Cendana Putih I |
| 286 | | | Gang 1 Utara Desa Cendana Putih I |
| 287 | | | Gang 2 Barat Desa Cendana Putih |
| 288 | | | Gang 2 Barat Desa Cendana Putih I |
| 289 | | | Gang 2 Desa Benteng |
| 290 | | | Gang 2 Timur Desa Cendana Putih |
| 291 | | | Gang 2 Timur Desa Cendana Putih I |
| 292 | | | Gang 2 Utara Desa Cendana Putih I |
| 293 | | | Gang 2 Utara Ds. Cendana Putih I |
| 294 | | | Gang 3 A Desa Benteng |
| 295 | | | Gang 3 B Desa Benteng |
| 296 | | | Gang 3 Barat Desa Cendana Putih |
| 297 | | | Gang 3 Desa Benteng |
| 298 | | | Gang 3 Timur Desa Cendana Putih |
| 299 | | | Gang 4 A Timur Desa Cendana Putih |
| 300 | | | Gang 4 Barat Desa Cendana Putih |
| 301 | | | Gang 4 Desa Benteng |
| 302 | | | Gang 4 Timur Desa Cendana Putih |
| 303 | | | Gang 5 Barat Desa Cendana Putih |
| 304 | | | Gang 5 Desa Benteng |
| 305 | | | Gang 6 A Timur Ds. Cendana Putih |
| 306 | | | Gang 6 Barat Ds. Cendana Putih |
| 307 | | | Gang 6 Timur Ds. Cendana Putih |
| 308 | | | Gang A Desa Sumber Harum |
| 309 | | | Gang B Desa Sumber Harum |
| 310 | | | Gang C Desa Sumber Harum |
| 311 | | | Gang D Desa Sumber Harum |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 312 | | | Gang E Desa Sumber Harum |
| 313 | | | Gang F Desa Sumber Harum |
| 314 | | | Jalan Kantor Desa Harapan |
| 315 | | | Jalan Likudengen - Batas Desa Harapan |
| 316 | | | Jalan Salugori Uraso - Kampung Baru |
| 317 | | | Jalan Samping Lapangan Desa Harapan |
| 318 | | | Jalan Samping Mesjid Desa Harapan |
| 319 | | | Jl. Antar Lr. 1 - Lr. 2 Dsn. Labeka |
| 320 | | | Jl. Depan Kantor Desa Sepakat - Jembatan Gantung |
| 321 | | | Jl. Dusun Sumberase Kapidi |
| 322 | | | Jl. Pendidikan - Jembatan Gantung |
| 323 | | | Jl. Pendidikan Sepakat |
| 324 | | | Jl. Poros Kapidi Tolada - Lorong 7 B |
| 325 | | | Jl. Samping Lapangan Sepakat |
| 326 | | | Jl. SMPN Desa Sepakat |
| 327 | | | Jl.. Poros Kapidi Tolada - Lorong 7 B |
| 328 | | | Jln. Antar Lrg. 3 - Lrg. 5 Desa Benteng |
| 329 | | | Jln. Lingkar Barat Desa Mekar Jaya |
| 330 | | | Jln. Penghubung Lrg. 0 B - 4 B Desa Mekar Jaya |
| 331 | | | Jln. Penghubung Lrg. 7 B - Lrg. 12 B |
| 332 | | | Jln. Poros Kapidi Tolada - Lorong 7 B |
| 333 | | | Lorong 0 A Desa Mekar Jaya |
| 334 | | | Lorong 0 B Desa Mekar Jaya |
| 335 | | | Lorong 0 Barat Desa Benteng |
| 336 | | | Lorong 0 Desa Benteng |
| 337 | | | Lorong 0 Dsn. Mertasari Ds. Cendana Putih |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|---|
| 338 | | | Lorong 1 A Desa Cendana Putih |
| 339 | | | Lorong 1 A Desa Cendana Putih I |
| 340 | | | Lorong 1 A Desa Mekar Jaya |
| 341 | | | Lorong 1 A Desa Sumber Harum |
| 342 | | | Lorong 1 B Desa Cendana Putih |
| 343 | | | Lorong 1 B Desa Cendana Putih I |
| 344 | | | Lorong 1 B Desa Mekar Jaya |
| 345 | | | Lorong 1 B Desa Sumber Harum |
| 346 | | | Lorong 1 Desa Benteng |
| 347 | | | Lorong 1 Dsn Kapidi |
| 348 | | | Lorong 1 Dsn. Beringin Desa Mappedeceng |
| 349 | | | Lorong 1 Dsn. Mertasari Ds. Cendana Putih |
| 350 | | | Lorong 10 A Desa Cendana Putih I |
| 351 | | | Lorong 10 B Desa Cendana Putih I |
| 352 | | | Lorong 10 B Desa Hasanah |
| 353 | | | Lorong 10 T Desa Hasanah |
| 354 | | | Lorong 11 B Desa Hasanah |
| 355 | | | Lorong 11 T Desa Hasanah |
| 356 | | | Lorong 12 T Desa Hasanah |
| 357 | | | Lorong 2 A Desa Cendana Putih |
| 358 | | | Lorong 2 A Desa Cendana Putih I |
| 359 | | | Lorong 2 A Desa Mekar Jaya |
| 360 | | | Lorong 2 B Desa Cendana Putih |
| 361 | | | Lorong 2 B Desa Cendana Putih I |
| 362 | | | Lorong 2 B Desa Mekar Jaya |
| 363 | | | Lorong 2 Desa Sumber Harum |
| 364 | | | Lorong 2 Dsn Kapidi |
| 365 | | | Lorong 2 Dsn. Beringin Desa Mappedeceng |
| 366 | | | Lorong 2 Dsn. Mertasari Ds. Cendana Putih |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 367 | | | Lorong 3 A Desa Cendana Putih |
| 368 | | | Lorong 3 A Desa Cendana Putih I |
| 369 | | | Lorong 3 A Desa Mekar Jaya |
| 370 | | | Lorong 3 A Desa Sumber Harum |
| 371 | | | Lorong 3 B Desa Cendana Putih I |
| 372 | | | Lorong 3 B Desa Mekar Jaya |
| 373 | | | Lorong 3 B Desa Sumber Harum |
| 374 | | | Lorong 3 Desa Benteng |
| 375 | | | Lorong 3 Dsn Kapidi |
| 376 | | | Lorong 4 A Desa Cendana Putih |
| 377 | | | Lorong 4 A Desa Cendana Putih I |
| 378 | | | Lorong 4 A Desa Mekar Jaya |
| 379 | | | Lorong 4 A Desa Sumber Harum |
| 380 | | | Lorong 4 A Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih |
| 381 | | | Lorong 4 B Desa Cendana Putih I |
| 382 | | | Lorong 4 B Desa Mekar Jaya |
| 383 | | | Lorong 4 B Desa Sumber Harum |
| 384 | | | Lorong 4 B Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih |
| 385 | | | Lorong 4 Desa Benteng |
| 386 | | | Lorong 4 Dsn Kapidi |
| 387 | | | Lorong 5 A Desa Cendana Putih I |
| 388 | | | Lorong 5 A Desa Mekar Jaya |
| 389 | | | Lorong 5 A Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih |
| 390 | | | Lorong 5 B Desa Cendana Putih I |
| 391 | | | Lorong 5 B Desa Mekar Jaya |
| 392 | | | Lorong 5 B Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih |
| 393 | | | Lorong 5 Dsn Kapidi |
| 394 | | | Lorong 6 A Desa Cendana Putih I |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 395 | | | Lorong 6 A Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih |
| 396 | | | Lorong 6 B Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih |
| 397 | | | Lorong 6 Dsn Kapidi |
| 398 | | | Lorong 7 A Desa Cendana Putih I |
| 399 | | | Lorong 7 A Dsn. Mertasari Ds Cendana Putih |
| 400 | | | Lorong 7 B Desa Cendana Putih I |
| 401 | | | Lorong 7 B Desa Hasanah |
| 402 | | | Lorong 7 Dsn Kapidi |
| 403 | | | Lorong 7 T Desa Hasanah |
| 404 | | | Lorong 8 B Desa Cendana Putih I |
| 405 | | | Lorong 8 B Desa Hasanah |
| 406 | | | Lorong 8 T Desa Hasanah |
| 407 | | | Lorong 9 A Desa Cendana Putih I |
| 408 | | | Lorong 9 B Desa Cendana Putih I |
| 409 | | | Lorong 9 B Desa Hasanah |
| 410 | | | Lorong 9 T Desa Hasanah |
| 411 | | | Lorong Batas Desa CP. I - Desa Kapidi |
| 412 | | | Lorong Tengah Mekar Jaya - Hasanah |
| 413 | | | Lrg. 1 Dsn. Labeka Ds. Kapidi |
| 414 | | | Lrg. 1 Dsn. Sumberase Ds. Kapidi |
| 415 | | | Lrg. 2 Dsn. Labeka Ds. Kapidi |
| 416 | | | Lrg. 2 Dsn. Sumberase Ds. Kapidi |
| 417 | | | Lrg. 3 Dsn. Sumberase Ds. Kapidi |
| 418 | | | Lrg. 5 Dsn. Sumberase Ds. Kapidi |
| 419 | | | Lrg. Batas Desa CP I-Kapidi |
| 420 | | | Mappedeceng - Empang |
| 421 | | | Mappedeceng - Jln. Belakang SMK 1 Masamba |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|---|
| 422 | | | Mappedeceng - Jln. Pertanian |
| 423 | | | Poros Mappedeceng - Lorong 1 Desa Benteng |
| 424 | | | Ruas 1 Desa Sepakat |
| 425 | | | Ruas 1 Desa Sumberwangi |
| 426 | | | Ruas 1 Dsn. Tambaksari Desa Harapan |
| 427 | | | Ruas 1 Dusun Kampung Adil Desa Harapan |
| 428 | | | Ruas 1 Dusun Nanna Desa Mappedeceng |
| 429 | | | Ruas 2 Desa Sepakat |
| 430 | | | Ruas 2 Desa Sumberwangi |
| 431 | | | Ruas 2 Dsn. Tambaksari Desa Harapan |
| 432 | | | Ruas 2 Dusun Kampung Adil Desa Harapan |
| 433 | | | Ruas 2 Dusun Nanna Desa Mappedeceng |
| 434 | | | Ruas 3 Desa Sepakat |
| 435 | | | Ruas 3 Desa Sumberwangi |
| 436 | | | Ruas 3 Dsn. Tambaksari Desa Harapan |
| 437 | | | Ruas 3 Dusun Kampung Adil Desa Harapan |
| 438 | | | Ruas 3 Dusun Nanna Desa Mappedeceng |
| 439 | | | Ruas 4 Desa Sepakat |
| 440 | | | Ruas 4 Desa Sumberwangi |
| 441 | | | Ruas 4 Dsn. Tambaksari Desa Harapan |
| 442 | | | Ruas 4 Dusun Kampung Adil Desa Harapan |
| 443 | | | Ruas 5 Desa Sepakat |
| 444 | | | Ruas 6 Desa Sepakat |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|---------------------------|--|
| 445 | | | Ruas 7 Desa Sepakat |
| 446 | | | SDN. Mappedeceng - Nanna |
| 447 | | Kecamatan Masamba | Jl. Depan Kantor Desa Sepakat - Jembatan Gantung |
| 448 | | | Jl. Kel. Baliase VII |
| 449 | | | Jl. Kemajuan |
| 450 | | | Jl. Ling. 1 Desa Rompu |
| 451 | | | Jl. Ling. 2 Desa Rompu |
| 452 | | | Jl. Ling. 3 Desa Rompu |
| 453 | | | Jl. Lingkungan Baliase 9 |
| 454 | | | Jl. Lingkungan Desa Rompu |
| 455 | | | Kecamatan Sabbang |
| 456 | | | Lorong 1 Ds. Mekarsari Jaya |
| 457 | | Kecamatan Sabbang Selatan | Lorong 1 Ds. Mekarsari Jaya |
| 458 | | | Lorong 2 Ds. Mekarsari Jaya |
| 459 | | | Lorong 5 Ds. Mekarsari Jaya |
| 460 | | Kecamatan Sukamaju | Balete - Jalan Pertanian |
| 461 | | | CP. I - Jembatan Gantung Swakarsa |
| 462 | | | Dusun Torape - Makam |
| 463 | | | Jalan Dusun Balete |
| 464 | | | Jalan Dusun Kalatiri I |
| 465 | | | Jalan Dusun Kalatiri II |
| 466 | | | Jalan Flamboyan Desa Mulyasari |
| 467 | | | Jalan Mawar Desa Mulyasari |
| 468 | | | Jalan Pelita Desa Ketulungan |
| 469 | | | Jalan Samping Saluran Pengairan |
| 470 | | | Jalan TPA Al-Furqan Desa Mulyasari |
| 471 | | | Jl. Asoka Desa Mulyasari |
| 472 | | | Jl. B. Hamsir |
| 473 | | | Jl. Lalo Mamase Desa Lampuawa |
| 474 | | | Jl. Nilam Dusun Balete Desa Tolangi |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 475 | | | Jl. Rambutan Dusun Balete Desa Tolangi |
| 476 | | | Jl. Samping Hotel Simpati |
| 477 | | | Jl. Samping Mesjid Taruk Durian |
| 478 | | | Lorong 0 A Desa Ketulungan |
| 479 | | | Lorong 0 Desa Ketulungan |
| 480 | | | Lorong 0 Desa Tulung Sari |
| 481 | | | Lorong 1 A Desa Sukadamai |
| 482 | | | Lorong 1 A Desa Ketulungan |
| 483 | | | Lorong 1 B Desa Ketulungan |
| 484 | | | Lorong 1 B Desa Sukadamai |
| 485 | | | Lorong 1 Desa Tulung Sari |
| 486 | | | Lorong 1 Desa Wonosari |
| 487 | | | Lorong 1 Dusun Harapan |
| 488 | | | Lorong 10 A Desa Tulung Indah |
| 489 | | | Lorong 10 B Desa Tulung Indah |
| 490 | | | Lorong 11 A Desa Tulung Indah |
| 491 | | | Lorong 11 B Desa Tulung Indah |
| 492 | | | Lorong 11 Desa Tulung Sari |
| 493 | | | Lorong 12 A Desa Tulung Indah |
| 494 | | | Lorong 12 B Desa Tulung Indah |
| 495 | | | Lorong 13 A Desa Tulung Indah |
| 496 | | | Lorong 13 B Desa Tulung Indah |
| 497 | | | Lorong 14 I Desa Tulung Indah |
| 498 | | | Lorong 14 A Desa Tulung Indah |
| 499 | | | Lorong 14 B Desa Tulung Indah |
| 500 | | | Lorong 14 C Desa Tulung Indah |
| 501 | | | Lorong 14 D Desa Tulung Indah |
| 502 | | | Lorong 14 E Desa Tulung Indah |
| 503 | | | Lorong 14 F Desa Tulung Indah |
| 504 | | | Lorong 14 G Desa Tulung Indah |
| 505 | | | Lorong 14 H Desa Tulung Indah |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|---|
| 506 | | | Lorong 2 A Desa Ketulungan |
| 507 | | | Lorong 2 A Desa Sukadamai |
| 508 | | | Lorong 2 B Desa Ketulungan |
| 509 | | | Lorong 2 Desa Tulung Sari |
| 510 | | | Lorong 2 Desa Wonosari |
| 511 | | | Lorong 2 Dusun Harapan |
| 512 | | | Lorong 3 A Desa Ketulungan |
| 513 | | | Lorong 3 A Desa Sukadamai |
| 514 | | | Lorong 3 B - 4 B Desa Sukamaju |
| 515 | | | Lorong 3 B Desa Ketulungan |
| 516 | | | Lorong 3 B Desa Sukadamai |
| 517 | | | Lorong 3 Desa Tulung Sari |
| 518 | | | Lorong 3 Desa Wonosari |
| 519 | | | Lorong 3 Dusun Harapan |
| 520 | | | Lorong 3 Saptamarga - Kebun |
| 521 | | | Lorong 4 Desa Wonosari |
| 522 | | | Lorong 4 B Desa Ketulungan |
| 523 | | | Lorong 4 Desa Sukadamai |
| 524 | | | Lorong 4 Desa Tulung Sari |
| 525 | | | Lorong 4 Dusun Harapan |
| 526 | | | Lorong 4 Saptamarga - Kebun |
| 527 | | | Lorong 4 Saptamarga - Lorong 3 |
| 528 | | | Lorong 5 A Desa Ketulungan |
| 529 | | | Lorong 5 Desa Sukadamai |
| 530 | | | Lorong 5 Desa Tulung Sari |
| 531 | | | Lorong 5 Desa Wonosari |
| 532 | | | Lorong 5 Dusun Harapan |
| 533 | | | Lorong 5 Saptamarga - Makam |
| 534 | | | Lorong 5 Saptamarga - Tambang/Sungai |
| 535 | | | Lorong 6 (Batas Desa Sukamukti - Sukadamai) |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|---|
| 536 | | | Lorong 6 A Desa Ketulungan |
| 537 | | | Lorong 6 B Desa Ketulungan |
| 538 | | | Lorong 6 Desa Tulung Sari |
| 539 | | | Lorong 6 Desa Wonosari |
| 540 | | | Lorong 6 dusun Harapan |
| 541 | | | Lorong 6 Saptamarga - Lorong 5 |
| 542 | | | Lorong 7 A Desa Ketulungan |
| 543 | | | Lorong 7 B Desa Ketulungan |
| 544 | | | Lorong 7 Desa Sukamukti |
| 545 | | | Lorong 7 Desa Tulung Sari |
| 546 | | | Lorong 7 Desa Wonosari |
| 547 | | | Lorong 7 Saptamarga - Kebun |
| 548 | | | Lorong 8 A Desa Tulung Indah (Batas Desa) |
| 549 | | | Lorong 8 B Desa Tulung Indah (Batas Desa) |
| 550 | | | Lorong 8 Desa Sukamukti |
| 551 | | | Lorong 8 Desa Tulung Sari |
| 552 | | | Lorong 8 Desa Wonosari |
| 553 | | | Lorong 8 Saptamarga - Matirowalie |
| 554 | | | Lorong 9 A Desa Tulung Indah |
| 555 | | | Lorong 9 B Desa Tulung Indah |
| 556 | | | Lorong 9 Desa Tulung Sari |
| 557 | | | Lorong 9 Desa Wonosari |
| 558 | | | Lorong SDN. Salulemo- Dusun Harapan |
| 559 | | | Lorong SDN. Saptamarga |
| 560 | | | Lorong Tengah I Desa Ketulungan |
| 561 | | | Lorong Tengah II Desa Ketulungan |
| 562 | | | Lorong Tengah III Desa Ketulungan |
| 563 | | | Lorong Tengah IV Desa Ketulungan |
| 564 | | | Lorong Tengah Tulung Indah - Ketulungan |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 565 | | | Lrg. I (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. 8 Sukamukti) |
| 566 | | | Lrg. II (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. 8 Sukamukti) |
| 567 | | | Lrg. III (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. III 7 Sukamukti) |
| 568 | | | Mulyasari - Batas Desa |
| 569 | | | Mulyasari - Kebun |
| 570 | | | Mulyasari - Makam |
| 571 | | | Mulyasari - Sukadamai |
| 572 | | | Ruas I Desa Mulyasari |
| 573 | | | Ruas I Desa Wonosari |
| 574 | | | Ruas I Dusun Balete Desa Kaluku |
| 575 | | | Ruas I Dusun Tombang Biru |
| 576 | | | Ruas II Desa Wonosari |
| 577 | | | Ruas II Dusun Balete Desa Kaluku |
| 578 | | | Ruas II Dusun Tombang Biru |
| 579 | | | Ruas III Desa Wonosari |
| 580 | | | Ruas IV Desa Wonosari |
| 581 | | | Salulemo - Lorong 1 Sukamaju |
| 582 | | | Salulemo - Poros Kaluku Subur |
| 583 | | | Setia Darma - Pura |
| 584 | | | Capna - Paomacang |
| 585 | | | Ladongi - Lummu |
| 586 | | | Lanjutan Lorong 7 A Desa Mulyorejo |
| 587 | | | Lino - Gereja |
| 588 | | | Lino - Lummu |
| 589 | | | Lino - Lumu |
| 590 | | | Lino - Ujung Timur |
| 591 | | | Lorong 1 A - Lorong 10 A Desa Wonokerto |
| 592 | | | Lorong 1 A - Lorong 7 A |
| 593 | | | Lorong 1 A Desa Mulyorejo |

Kecamatan
Sukamaju
Selatan

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 594 | | | Lorong 1 A Desa Rawamangun |
| 595 | | | Lorong 1 A Desa Subur |
| 596 | | | Lorong 1 A Desa Sumber Baru (Batas) |
| 597 | | | Lorong 1 A Desa Wonokerto |
| 598 | | | Lorong 1 A Mulyorejo - Rawamangun |
| 599 | | | Lorong 1 B - Lorong 7 B Desa Subur |
| 600 | | | Lorong 1 B Desa Mulyorejo |
| 601 | | | Lorong 1 B Desa Rawamangun |
| 602 | | | Lorong 1 B Desa Subur |
| 603 | | | Lorong 1 B Desa Sumber Baru (Batas) |
| 604 | | | Lorong 1 B Desa Wonokerto - Banyuwangi |
| 605 | | | Lorong 1 B Mulyorejo - Lrg. 3 A Rawamangun |
| 606 | | | Lorong 1 Desa Banyuwangi |
| 607 | | | Lorong 10 A - Lorong 13 A Desa Wonokerto |
| 608 | | | Lorong 10 A Desa Mulyorejo |
| 609 | | | Lorong 10 B Ds. Wonokerto - Sumber Baru |
| 610 | | | Lorong 11 A Desa Wonokerto |
| 611 | | | Lorong 11 B Ds. Wonokerto - Sumber Baru |
| 612 | | | Lorong 12 A Desa Wonokerto |
| 613 | | | Lorong 12 B Ds. Wonokerto - Sumber Baru |
| 614 | | | Lorong 13 A Desa Wonokerto |
| 615 | | | Lorong 13 B Desa Wonokerto |
| 616 | | | Lorong 2 A Desa Mulyorejo |
| 617 | | | Lorong 2 A Desa Rawamangun |
| 618 | | | Lorong 2 A Desa Subur |
| 619 | | | Lorong 2 A Desa Sumber Baru |

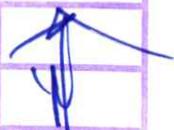
| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 620 | | | Lorong 2 A Desa Wonokerto |
| 621 | | | Lorong 2 B Desa Mulyorejo |
| 622 | | | Lorong 2 B Desa Rawamangun |
| 623 | | | Lorong 2 B Desa Subur |
| 624 | | | Lorong 2 B Desa Sumber Baru |
| 625 | | | Lorong 2 B Desa Wonokerto |
| 626 | | | Lorong 2 Desa Banyuwangi |
| 627 | | | Lorong 2 Desa Sidoraharjo |
| 628 | | | Lorong 3 A - 5 A (Samping SMPN 2 Sukamaju) |
| 629 | | | Lorong 3 A Desa Banyuwangi |
| 630 | | | Lorong 3 A Desa Mulyorejo |
| 631 | | | Lorong 3 A Desa Rawamangun |
| 632 | | | Lorong 3 A Desa Subur |
| 633 | | | Lorong 3 A Desa Sumber Baru |
| 634 | | | Lorong 3 A Desa Wonokerto |
| 635 | | | Lorong 3 B Desa Banyuwangi |
| 636 | | | Lorong 3 B Desa Mulyorejo |
| 637 | | | Lorong 3 B Desa Rawamangun |
| 638 | | | Lorong 3 B Desa Subur |
| 639 | | | Lorong 3 B Desa Sumber Baru |
| 640 | | | Lorong 3 B Desa Wonokerto |
| 641 | | | Lorong 3 Desa Sidoraharjo |
| 642 | | | Lorong 4 A - Lorong 1 Desa Banyuwangi |
| 643 | | | Lorong 4 A - Sungai Uraso |
| 644 | | | Lorong 4 A (Lanjutan) Desa Rawamangun |
| 645 | | | Lorong 4 A Desa Banyuwangi |
| 646 | | | Lorong 4 A Desa Rawamangun |
| 647 | | | Lorong 4 A Desa Sumber Baru |
| 648 | | | Lorong 4 A Desa Wonokerto |

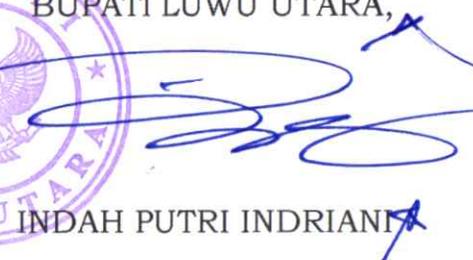
| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 649 | | | Lorong 4 A Mulyorejo - Rawamangun (Sawah) |
| 650 | | | Lorong 4 A Mulyorejo - Ruas Rawamangun Paomacang |
| 651 | | | Lorong 4 B Desa Banyuwangi |
| 652 | | | Lorong 4 B Desa Mulyorejo |
| 653 | | | Lorong 4 B Desa Rawamangun |
| 654 | | | Lorong 4 B Desa Subur |
| 655 | | | Lorong 4 B Desa Sumber Baru |
| 656 | | | Lorong 4 B Desa Wonokerto |
| 657 | | | Lorong 4 Desa Sidoraharjo |
| 658 | | | Lorong 5 - Lorong 8 Desa Sukamukti |
| 659 | | | Lorong 5 A Desa Mulyorejo |
| 660 | | | Lorong 5 A Desa Rawamangun |
| 661 | | | Lorong 5 A Desa Sumber Baru |
| 662 | | | Lorong 5 A Desa Wonokerto |
| 663 | | | Lorong 5 B Desa Mulyorejo |
| 664 | | | Lorong 5 B Desa Rawamangun |
| 665 | | | Lorong 5 B Desa Subur |
| 666 | | | Lorong 5 B Desa Sumber Baru |
| 667 | | | Lorong 5 B Desa Wonokerto |
| 668 | | | Lorong 5 Desa Sidoraharjo |
| 669 | | | Lorong 5 Desa Sukamukti |
| 670 | | | Lorong 6 A Desa Mulyorejo |
| 671 | | | Lorong 6 A Desa Rawamangun |
| 672 | | | Lorong 6 A Desa Subur |
| 673 | | | Lorong 6 A Desa Sumber Baru |
| 674 | | | Lorong 6 A Desa Wonokerto |
| 675 | | | Lorong 6 A Mulyorejo - Rawamangun |
| 676 | | | Lorong 6 B Desa Mulyorejo |
| 677 | | | Lorong 6 B Desa Rawamangun |
| 678 | | | Lorong 6 B Desa Subur |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 679 | | | Lorong 6 B Desa Wonokerto |
| 680 | | | Lorong 6 Batas Desa Sukamukti-Sukadamai |
| 681 | | | Lorong 6 Desa Sidoraharjo |
| 682 | | | Lorong 7 A Desa Mulyorejo |
| 683 | | | Lorong 7 A Desa Rawamangun |
| 684 | | | Lorong 7 A Desa Subur |
| 685 | | | Lorong 7 A Desa Wonokerto |
| 686 | | | Lorong 7 A. Desa Sukamukti |
| 687 | | | Lorong 7 B Desa Mulyorejo |
| 688 | | | Lorong 7 B Desa Rawamangun |
| 689 | | | Lorong 7 B Desa Subur |
| 690 | | | Lorong 7 B Ds. Wonokerto - Sumber Baru |
| 691 | | | Lorong 7 Desa Sidoraharjo |
| 692 | | | Lorong 8 A Desa Mulyorejo |
| 693 | | | Lorong 8 A Desa Rawamangun |
| 694 | | | Lorong 8 A Desa Wonokerto |
| 695 | | | Lorong 8 A. Desa Sukamukti |
| 696 | | | Lorong 8 B Desa Mulyorejo |
| 697 | | | Lorong 8 Desa Sukamukti |
| 698 | | | Lorong 9 A Desa Mulyorejo |
| 699 | | | Lorong 9 A Desa Wonokerto |
| 700 | | | Lorong 9 B Desa Mulyorejo |
| 701 | | | Lorong 9 B Ds. Wonokerto - Sumber Baru |
| 702 | | | Lorong 9 Desa Sukamukti |
| 703 | | | Lorong Belakang Pasar Spontan |
| 704 | | | Lorong Makam Desa Rawamangun |
| 705 | | | Lorong SMAN 2 Sukamaju - Rawamangun |
| 706 | | | Lrg. I (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. 8 Sukamukti) |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|---------------------|--|
| 707 | | | Lrg. II (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. 8 Sukamukti) |
| 708 | | | Lrg. III (Lrg. 1 Sukadamai - Lrg. III 7 Sukamukti) |
| 709 | | | Mulyorejo - Saluran Pembuang |
| 710 | | | Mulyorejo - Wonokerto (Jalan Lingkar Luar Desa) |
| 711 | | | Ruas I Desa Sidoraharjo |
| 712 | | | Ruas II Desa Sidoraharjo |
| 713 | | | Sapana - Lino |
| 714 | | | SMAN 2 Sukamaju - Rawamangun |
| 715 | | | Subur - Kebun Kelapa Sawit |
| 716 | | | Wonokerto - Subur |
| 717 | | Kecamatan Tana Lili | Jl. Balana |
| 718 | | | Jl. Balana- Jl. Dermaga |
| 719 | | | Jl. Cakalang |
| 720 | | | Jl. Dermaga Desa Munte |
| 721 | | | Jl. Ketupat |
| 722 | | | Karondang - Jl. Empang |
| 723 | | | Lorong 1 A |
| 724 | | | Lorong 1 B |
| 725 | | | Lorong 1 Sidobinangun |
| 726 | | | Lorong 1 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 727 | | | Lorong 2 Kampung Bali |
| 728 | | | Lorong 2 Sidobinangun |
| 729 | | | Lorong 2 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 730 | | | Lorong 3 Kampung Bali |
| 731 | | | Lorong 3 Sidobinangun |
| 732 | | | Lorong 3 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 733 | | | Lorong 4 Kampung Bali |
| 734 | | | Lorong 4 Sidobinangun |
| 735 | | | Lorong 4 Tulung Rejo Ds. Patila |

| No | Fungsi Jalan | Lokasi | Nama Ruas |
|-----|--------------|--------|--|
| 736 | | | Lorong 5 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 737 | | | Lorong 6 Sidobinangun |
| 738 | | | Lorong 6 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 739 | | | Lorong 7 Sidobinangun |
| 740 | | | Lorong 7 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 741 | | | Lorong 8 Sidobinangun |
| 742 | | | Lorong 8 Tulung Rejo Ds. Patila |
| 743 | | | Lorong Patila - Tulung Rejo Ds. Patila |
| 744 | | | Lorong Pinggir Sidobinangun |
| 745 | | | Lorong Tengah (Tugu) Sidobinangun |
| 746 | | | Poreang - Kebun Sawit |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM |  |


 BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

JEMBATAN KABUPATEN LUWU UTARA

| No | Nama Jembatan | Lokasi |
|----|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | Jembatan 1 Arusu | Kecamatan Malangke Barat |
| 2 | Jembatan 1 Baku-Baku | Kecamatan Malangke Barat |
| 3 | Jembatan 1 Cenning | Kecamatan Malangke Barat |
| 4 | Jembatan 1 D.1.Kanjiro | Kecamatan Sukamaju |
| 5 | Jembatan 1 Desa Pongko | Kecamatan Bone Bone |
| 6 | Jembatan 1 Desa Rampoang | Kecamatan Malangke |
| 7 | Jembatan 1 Pao Macam | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 8 | Jembatan 1 Pongko | Kecamatan Bone Bone |
| 9 | Jembatan 1 Sidobinangun | Kecamatan Bone Bone |
| 10 | Jembatan 1 Sukaraya | Kecamatan Bone Bone |
| 11 | Jembatan 1 Sungai Kali Beni | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 12 | Jembatan 1 Sungai Masamba | Kecamatan Masamba |
| 13 | Jembatan 1 Sungai Sumber Harum | Kecamatan Mappedeceng |
| 14 | Jembatan 1 Tamuku | Kecamatan Bone Bone |
| 15 | Jembatan 1 Tandung | Kecamatan Malangke Barat |
| 16 | Jembatan 1 Urukumpang | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 17 | Jembatan 1 Waetuo | Kecamatan Malangke Barat |
| 18 | Jembatan 12 Sungai Baliase | Kecamatan Malangke |
| 19 | Jembatan 2 Arusu | Kecamatan Malangke Barat |

| No | Nama Jembatan | Lokasi |
|----|-----------------------------------|----------------------------|
| 20 | Jembatan 2 Baku-Baku | Kecamatan Malangke Barat |
| 21 | Jembatan 2 Rampoang | Kecamatan Tana Lili |
| 22 | Jembatan 2 Sidobinangun | Kecamatan Bone Bone |
| 23 | Jembatan 2 Sungai Bantimurung | Kecamatan Bone Bone |
| 24 | Jembatan 2 Sungai Masamba | Kecamatan Baebunta |
| 25 | Jembatan 2 Sungai Sumber Harum | Kecamatan Mappedeceng |
| 26 | Jembatan 2 Tandung | Kecamatan Malangke Barat |
| 27 | Jembatan 2 Wara | Kecamatan Malangke Barat |
| 28 | Jembatan 3 Arusu | Kecamatan Malangke Barat |
| 29 | Jembatan 3 Rampoang | Kecamatan Tana Lili |
| 30 | Jembatan 3 Sungai Bantimurung | Kecamatan Bone Bone |
| 31 | Jembatan 3 Sungai Masamba | Kecamatan Masamba |
| 32 | Jembatan 3 Sungai Radda | Kecamatan Baebunta |
| 33 | Jembatan 3 Wara | Kecamatan Malangke Barat |
| 34 | Jembatan 4 Sungai Lampuawa | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 35 | Jembatan 5 Sungai Lampuawa | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 36 | Jembatan 5 Sungai Lantang Tallang | Kecamatan Masamba |
| 37 | Jembatan 8 Sungai Baliase | Kecamatan Masamba |
| 38 | Jembatan 9 Desa Batang Tangka | Kecamatan Bone Bone |
| 39 | Jembatan Bana I | Kecamatan Seko |

| No | Nama Jembatan | Lokasi |
|----|--------------------------------------|----------------------------|
| 40 | Jembatan Beton Hanghulo | Kecamatan Seko |
| 41 | Jembatan Dalam Kota Limbong I | Kecamatan Rongkong |
| 42 | Jembatan Dalam Kota Limbong II | Kecamatan Rongkong |
| 43 | Jembatan Desa Mari-mari | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 44 | Jembatan Ds Mekar Sari Jaya I | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 45 | Jembatan Ds. Kariango I | Kecamatan Baebunta |
| 46 | Jembatan Ds. Tarobok | Kecamatan Baebunta |
| 47 | Jembatan Ds. Tarobok I | Kecamatan Baebunta |
| 48 | Jembatan Dsn. To'woddi | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 49 | Jembatan Dusun Panimbu I | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 50 | Jembatan Eks. S. Rongkong | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 51 | Jembatan Eno - Singkalong I | Kecamatan Seko |
| 52 | Jembatan Gantung 1 Sungai Bone -Bone | Kecamatan Bone Bone |
| 53 | Jembatan Gantung Lengkong I | Kecamatan Seko |
| 54 | Jembatan Gantung S. Kalena | Kecamatan Sabbang |
| 55 | Jembatan Gantung S. Rongkong | Kecamatan Sabbang |
| 56 | Jembatan Kadundung | Kecamatan Sabbang |
| 57 | Jembatan Kampung Baru - Lengkong I | Kecamatan Seko |
| 58 | Jembatan Limbong II | Kecamatan Rongkong |
| 59 | Jembatan Makarate - Minanga | Kecamatan Rongkong |
| 60 | Jembatan Rambakulu | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 61 | Jembatan Ruas Eno - Tanete I | Kecamatan Seko |
| 62 | Jembatan Ruas Eno - Tanete II | Kecamatan Seko |
| 63 | Jembatan Ruas Eno - Tanete III | Kecamatan Seko |
| 64 | Jembatan Ruas Lasumba - Muktitama I | Kecamatan Baebunta |
| 65 | Jembatan S. Lodang I | Kecamatan Seko |
| 66 | Jembatan S. Aropi | Kecamatan Rampi |

| No | Nama Jembatan | Lokasi |
|----|------------------------------|----------------------------|
| 67 | Jembatan S. Baebunta I | Kecamatan Baebunta |
| 68 | Jembatan S. Baebunta II | Kecamatan Baebunta |
| 69 | Jembatan S. Bahulu I | Kecamatan Seko |
| 70 | Jembatan S. Bakka I | Kecamatan Sabbang |
| 71 | Jembatan S. Bakka II | Kecamatan Sabbang |
| 72 | Jembatan S. Bakka III | Kecamatan Sabbang |
| 73 | Jembatan S. Batu Alang | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 74 | Jembatan S. Betue | Kecamatan Seko |
| 75 | Jembatan S. Burase | Kecamatan Seko |
| 76 | Jembatan S. Dendelu | Kecamatan Baebunta |
| 77 | Jembatan S. Dodolo | Kecamatan Rampi |
| 78 | Jembatan S. Dusun Kontara I | Kecamatan Rampi |
| 79 | Jembatan S. Dusun Kontara II | Kecamatan Rampi |
| 80 | Jembatan S. Engkokie | Kecamatan Rampi |
| 81 | Jembatan S. Eno I | Kecamatan Seko |
| 82 | Jembatan S. Kanandede I | Kecamatan Rongkong |
| 83 | Jembatan S. Kanandede II | Kecamatan Rongkong |
| 84 | Jembatan S. Kanandede III | Kecamatan Rongkong |
| 85 | Jembatan S. Kanandede IV | Kecamatan Rongkong |
| 86 | Jembatan S. Kanan-Kanan I | Kecamatan Seko |
| 87 | Jembatan S. Kariango | Kecamatan Baebunta |
| 88 | Jembatan S. Kariango I | Kecamatan Baebunta |
| 89 | Jembatan S. Kariango II | Kecamatan Baebunta |
| 90 | Jembatan S. Kariango III | Kecamatan Baebunta |
| 91 | Jembatan S. Kariango IV | Kecamatan Baebunta |
| 92 | Jembatan S. Kotedebukolu | Kecamatan Rampi |
| 93 | Jembatan S. Kotoa | Kecamatan Rampi |
| 94 | Jembatan S. Laelae | Kecamatan Baebunta |
| 95 | Jembatan S. Lara | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 96 | Jembatan S. Lassa I | Kecamatan Rongkong |
| 97 | Jembatan S. Lasumba I | Kecamatan Baebunta |

| No | Nama Jembatan | Lokasi |
|-----|-----------------------------|----------------------------|
| 98 | Jembatan S. Lasumba II | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 99 | Jembatan S. Lasumba IV | Kecamatan Baebunta |
| 100 | Jembatan S. Liawong | Kecamatan Seko |
| 101 | Jembatan S. Limbong Wara I | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 102 | Jembatan S. Limbong Wara II | Kecamatan Malangke Barat |
| 103 | Jembatan S. Lodang | Kecamatan Seko |
| 104 | Jembatan S. Lodang I | Kecamatan Seko |
| 105 | Jembatan S. Lodang II | Kecamatan Seko |
| 106 | Jembatan S. Lore I | Kecamatan Seko |
| 107 | Jembatan S. Lore II | Kecamatan Seko |
| 108 | Jembatan S. Makumpa | Kecamatan Baebunta |
| 109 | Jembatan S. Mamore | Kecamatan Rampi |
| 110 | Jembatan S. Mampa I | Kecamatan Seko |
| 111 | Jembatan S. Marobo IV | Kecamatan Sabbang |
| 112 | Jembatan S. Masarang | Kecamatan Sabbang |
| 113 | Jembatan S. Matanonna | Kecamatan Seko |
| 114 | Jembatan S. Minanga I | Kecamatan Rongkong |
| 115 | Jembatan S. Mohutu | Kecamatan Rampi |
| 116 | Jembatan S. Mui | Kecamatan Rampi |
| 117 | Jembatan S. Mukoka | Kecamatan Rampi |
| 118 | Jembatan S. Mukti Jaya I | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 119 | Jembatan S. Muktijaya | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 120 | Jembatan S. Ohi | Kecamatan Rampi |
| 121 | Jembatan S. Padang Raya I | Kecamatan Seko |
| 122 | Jembatan S. Padangsare | Kecamatan Sabbang |
| 123 | Jembatan S. Padangsare II | Kecamatan Sabbang |
| 124 | Jembatan S. Paraduluan I | Kecamatan Baebunta |
| 125 | Jembatan S. Parahaleang I | Kecamatan Seko |
| 126 | Jembatan S. Pare-Pare | Kecamatan Sabbang Selatan |

| No | Nama Jembatan | Lokasi |
|-----|-------------------------------|----------------------------|
| 127 | Jembatan S. Pengairan | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 128 | Jembatan S. Pompaniki | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 129 | Jembatan S. Pungkabulo | Kecamatan Baebunta |
| 130 | Jembatan S. Rante Bone | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 131 | Jembatan S. Rante Kasumong I | Kecamatan Seko |
| 132 | Jembatan S. Rante Kasumong II | Kecamatan Seko |
| 133 | Jembatan S. Rante Pasang | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 134 | Jembatan S. Rantepaccu | Kecamatan Baebunta |
| 135 | Jembatan S. Rantepaccu I | Kecamatan Baebunta |
| 136 | Jembatan S. Rongkong I | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 137 | Jembatan S. Rongkong II | Kecamatan Rongkong |
| 138 | Jembatan S. Rongkong III | Kecamatan Rongkong |
| 139 | Jembatan S. Roto | Kecamatan Rampi |
| 140 | Jembatan S. Sabbang Loang | Kecamatan Baebunta |
| 141 | Jembatan S. Sabbang Loang I | Kecamatan Baebunta |
| 142 | Jembatan S. SAE | Kecamatan Seko |
| 143 | Jembatan S. Salu Bae I | Kecamatan Baebunta |
| 144 | Jembatan S. Salubone | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 145 | Jembatan S. Salukanan I | Kecamatan Rongkong |
| 146 | Jembatan S. Salukanan II | Kecamatan Rongkong |
| 147 | Jembatan S. Salulimbong | Kecamatan Sabbang |
| 148 | Jembatan S. Sapine I | Kecamatan Seko |
| 149 | Jembatan S. Sarembo | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 150 | Jembatan S. Singkalong I | Kecamatan Seko |
| 151 | Jembatan S. Singkalong II | Kecamatan Seko |
| 152 | Jembatan S. Sumpira | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 153 | Jembatan S. Talampung | Kecamatan Seko |

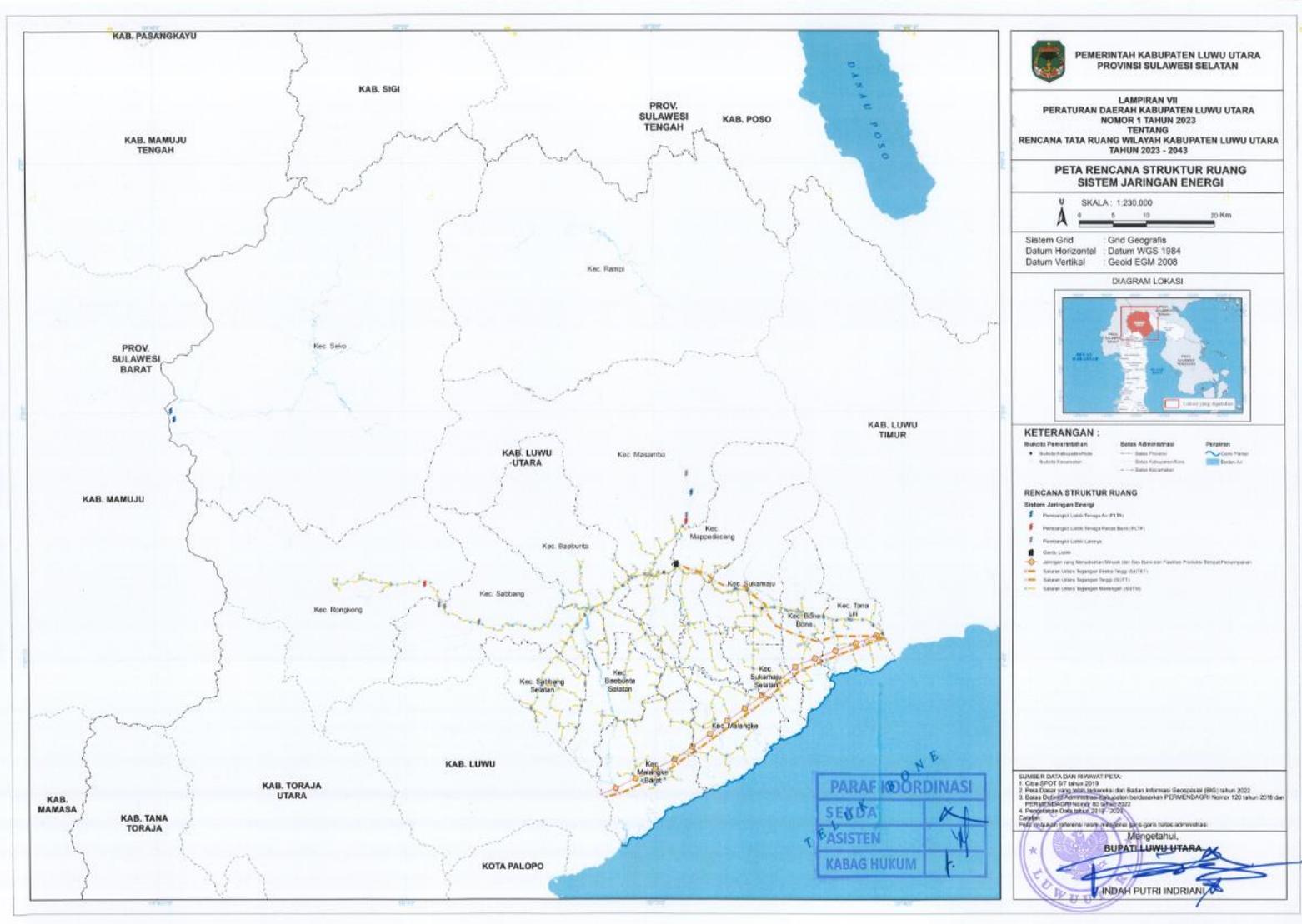
| No | Nama Jembatan | Lokasi |
|-----|-----------------------------|----------------------------|
| 154 | Jembatan S. Tanangkae | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 155 | Jembatan S. Tanangkae 1 | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 156 | Jembatan S. Tanterang I | Kecamatan Seko |
| 157 | Jembatan S. Tanterang II | Kecamatan Seko |
| 158 | Jembatan S. Tedeboe I | Kecamatan Rampi |
| 159 | Jembatan S. Tedeboe II | Kecamatan Rampi |
| 160 | Jembatan S. Tete Induk I | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 161 | Jembatan S. Tobaro | Kecamatan Rampi |
| 162 | Jembatan S. To'bebesuk | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 163 | Jembatan S. To'Boru | Kecamatan Rampi |
| 164 | Jembatan S. Tomahi | Kecamatan Rampi |
| 165 | Jembatan S. Totaba | Kecamatan Rampi |
| 166 | Jembatan S. Tulang-Tulang I | Kecamatan Rongkong |
| 167 | Jembatan S. Uro | Kecamatan Seko |
| 168 | Jembatan S. Waerini | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 169 | Jembatan S. Waerinni I | Kecamatan Malangke Barat |
| 170 | Jembatan S. Waerinni II | Kecamatan Malangke Barat |
| 171 | Jembatan S. Waerinni III | Kecamatan Malangke Barat |
| 172 | Jembatan S. Waerinni IV | Kecamatan Malangke Barat |

| No | Nama Jembatan | Lokasi |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 173 | Jembatan S. Walu - Walu I | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 174 | Jembatan S. Walu - Walu II | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 175 | Jembatan S. Walu - Walu III | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 176 | Jembatan S. Walu - Walu IV | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 177 | Jembatan S. Walu - Walu V | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 178 | Jembatan S. Walu - Walu VI | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 179 | Jembatan S. Walu - Walu VII | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 180 | Jembatan S. Walu - Walu VIII | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 181 | Jembatan S. Wongkupa | Kecamatan Rampi |
| 182 | Jembatan Tandung - Salupaku I | Kecamatan Sabbang |
| 183 | Jembatan Tanete I | Kecamatan Seko |



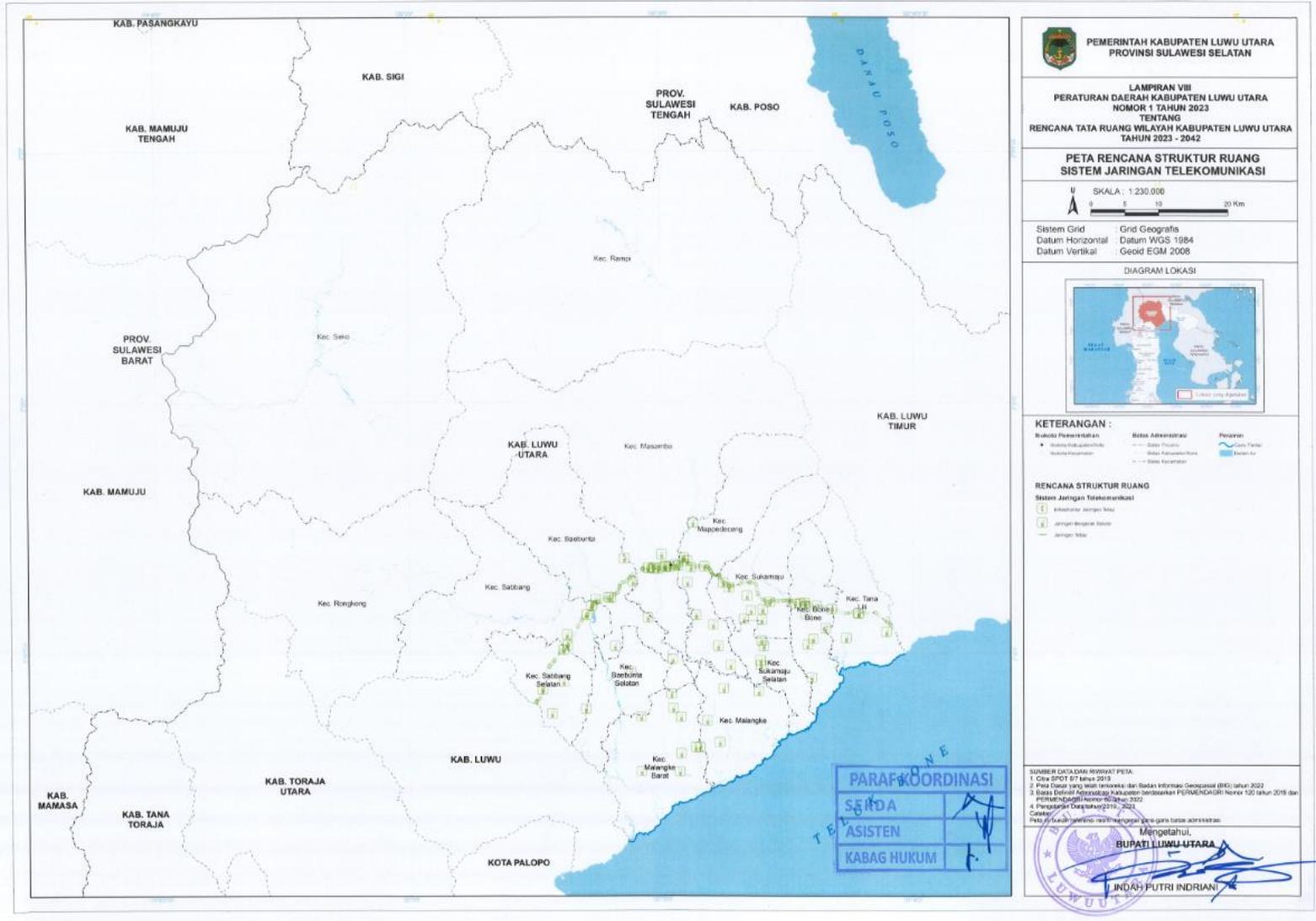
LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI KABUPATEN LUWU UTARA



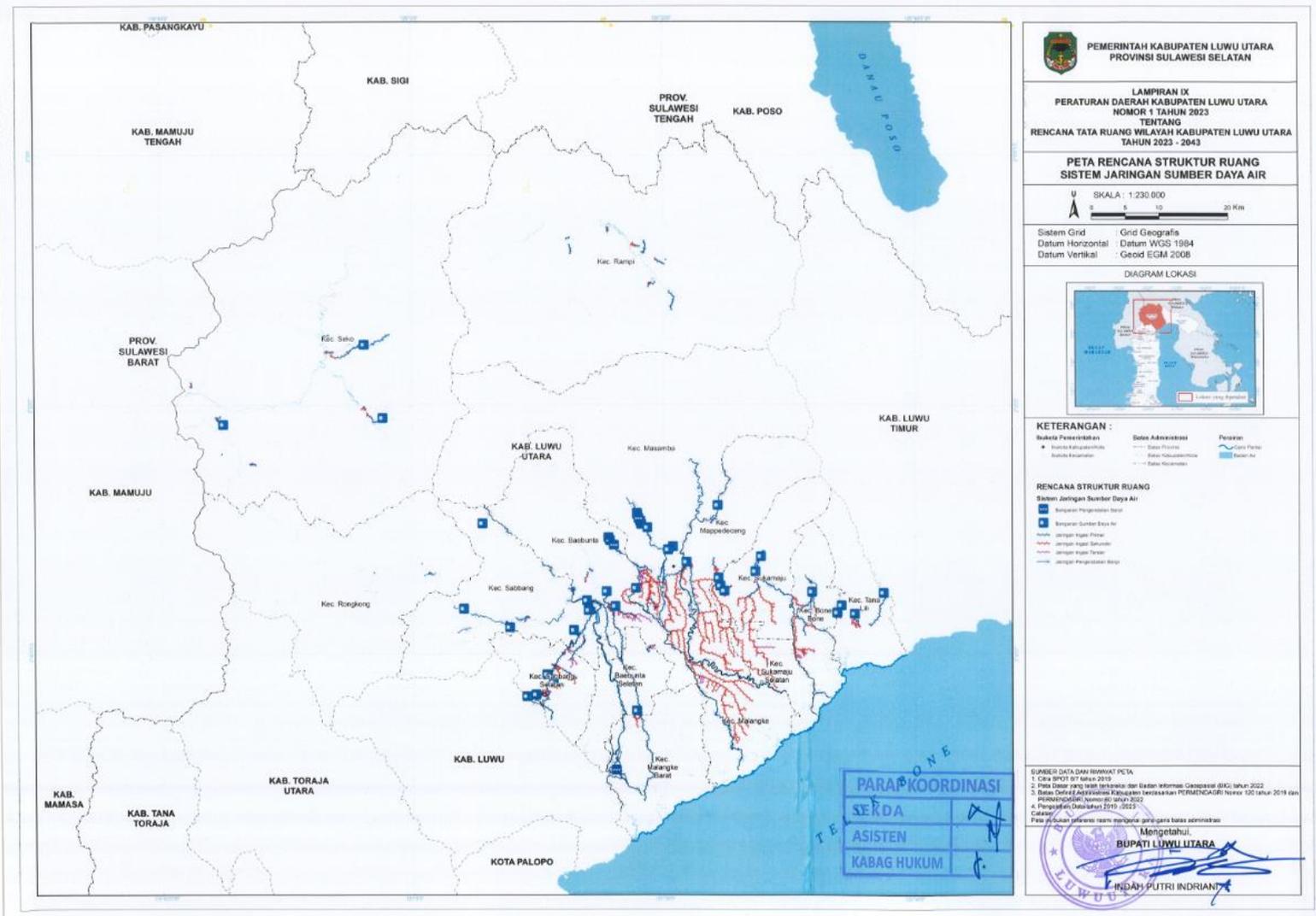
LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

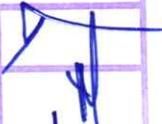
SISTEM JARINGAN IRIGASI KABUPATEN LUWU UTARA

| No | Sistem Jaringan Irigasi | Nama Daerah Irigasi | Lokasi | Status |
|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | Jaringan Irigasi Primer | D.I. Baliase | Kecamatan Mappedeceng | Rencana |
| | | D.I. Rongkong | Kecamatan Sabbang | |
| | | | Kecamatan Malangke Barat | |
| | | | Kecamatan Baebunta | |
| | | | Kecamatan Baebunta Selatan | |
| | | D.I. Baebunta | Kecamatan Sabbang | Eksisting |
| | | | Kecamatan Baebunta | |
| | | D.I. Balambangi | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Baliase | Kecamatan Masamba | |
| | | D.I. Bebesuk | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Beroppa | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Bobure | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Bungadidi | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Embona Tana | Kecamatan Tana Lili | |
| | | D.I. Eno | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Hono Lodang | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Hoyame | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Kalawin | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Kaluku | Kecamatan Sabbang | |
| | | D.I. Kamassi | Kecamatan Masamba | |
| | | D.I. Kanandede | Kecamatan Rongkong | |
| | | D.I. Kanjiro Bone-Bone | Kecamatan Bone Bone | |
| | | | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Kappuna Lebannu | Kecamatan Masamba | |
| | | D.I. Komba | Kecamatan Rongkong | |
| | | D.I. Kuau | Kecamatan Masamba | |
| | | D.I. Kuri-Kuri Kasambi | Kecamatan Masamba | |
| | | D.I. Laiya | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Lamo | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Lampuawa II | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Lampuawa III | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Lampuawa IV | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Lapapa | Kecamatan Masamba | |
| | | D.I. Lero Maipi | Kecamatan Masamba | |
| D.I. Lodang | Kecamatan Seko | | | |
| D.I. Lodang II | Kecamatan Seko | | | |
| D.I. Makawu | Kecamatan Sabbang | | | |
| D.I. Makumpa | Kecamatan Baebunta | | | |
| D.I. Malalin | Kecamatan Sabbang | | | |
| D.I. Maleku | Kecamatan Sabbang Selatan | | | |
| D.I. Malimbu Binuang | Kecamatan Sabbang | | | |
| D.I. Malimongan | Kecamatan Seko | | | |
| D.I. Malombu | Kecamatan Sabbang Selatan | | | |
| D.I. Marru | Kecamatan Rampi | | | |
| D.I. Meli | Kecamatan Baebunta | | | |

| No | Sistem Jaringan Irigasi | Nama Daerah Irigasi | Lokasi | Status |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| | | D.I. Mina Patiai | Kecamatan Tana Lili | |
| | | D.I. Mobu | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Ompala | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Onondoa | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Pabonsea | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Paburirian | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Padang Balua | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Palandan | Kecamatan Baebunta | |
| | | | Kecamatan Baebunta Selatan | |
| | | D.I. Parara Uasa | Kecamatan Sabbang | |
| | | D.I. Patila I | Kecamatan Tana Lili | |
| | | D.I. Patila II | Kecamatan Bone Bone | |
| | | | Kecamatan Tana Lili | |
| | | D.I. Pompalangi | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Radda Lebannu | Kecamatan Masamba | |
| | | D.I. Ramba Kulu | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Salu Ete | Kecamatan Sabbang | |
| | | D.I. Salulemo | Kecamatan Baebunta | |
| | | D.I. Salumasapi | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Salutabaro | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Sassa | Kecamatan Baebunta | |
| | | D.I. Sepakat | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Taloto | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Tamuku | Kecamatan Bone Bone | |
| | | D.I. Tanangkae | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Tarobok | Kecamatan Sabbang | |
| | | | Kecamatan Baebunta | |
| | | | Kecamatan Baebunta Selatan | |
| | | D.I. Timo Oni | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Tubu Ampak | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Ulu Salu | Kecamatan Bone Bone | |
| | | D.I. Urukumpang | Kecamatan Malangke Barat | |
| Kecamatan Baebunta Selatan | | | | |
| D.I. Walu-walu | Kecamatan Sabbang | | | |
| | Kecamatan Sabbang Selatan | | | |
| 2 | Jaringan Irigasi Sekunder | D.I. Baliase | Kecamatan Malangke | Rencana |
| | | | Kecamatan Masamba | |
| | | | Kecamatan Sukamaju | |
| | | | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | | Kecamatan Baebunta | |
| | | | Kecamatan Sukamaju Selatan | |
| | | D.I. Balambang | Kecamatan Sukamaju | Eksisting |
| | | D.I. Baliase | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Bebesuk | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Bobure | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Embona Tana | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Eno | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Hoyame | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Kaluku | Kecamatan Sabbang | |
| D.I. Kanjiro Bone-Bone | Kecamatan Bone Bone | | | |
| | Kecamatan Sukamaju | | | |
| | Kecamatan Sukamaju Selatan | | | |
| D.I. Kuau | Kecamatan Masamba | | | |

| No | Sistem Jaringan Irigasi | Nama Daerah Irigasi | Lokasi | Status |
|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| | | D.I. Laiya | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Lamo | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Lampuawa II | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Lampuawa III | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Lampuawa IV | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Lapapa | Kecamatan Masamba | |
| | | D.I. Lero Maipi | Kecamatan Masamba | |
| | | D.I. Lodang | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Lodang II | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Makawu | Kecamatan Sabbang | |
| | | D.I. Makumpa | Kecamatan Baebunta | |
| | | D.I. Malalin | Kecamatan Sabbang | |
| | | D.I. Maleku | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Malimbu Binuang | Kecamatan Sabbang | |
| | | D.I. Malimongan | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Malombu | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Meli | Kecamatan Baebunta | |
| | | D.I. Mina Patiai | Kecamatan Tana Lili | |
| | | D.I. Mobu | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Onondoa | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Pabonse | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Padang Balua | Kecamatan Seko | |
| | | D.I. Palandan | Kecamatan Baebunta | |
| | | | Kecamatan Baebunta Selatan | |
| | | D.I. Patila I | Kecamatan Tana Lili | |
| | | D.I. Patila II | Kecamatan Tana Lili | |
| | | D.I. Radda Lebannu | Kecamatan Masamba | |
| | | D.I. Ramba Kulu | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Salulemo | Kecamatan Baebunta | |
| | | D.I. Salumasapi | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Salutabaro | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Sassa | Kecamatan Baebunta | |
| | | D.I. Taloto | Kecamatan Seko | |
| D.I. Tamuku | Kecamatan Bone Bone | | | |
| D.I. Tanangkae | Kecamatan Sabbang Selatan | | | |
| D.I. Timo Oni | Kecamatan Rampi | | | |
| D.I. Ulu Salu | Kecamatan Bone Bone | | | |
| D.I. Urukumpang | Kecamatan Malangke Barat | | | |
| | Kecamatan Baebunta Selatan | | | |
| D.I. Walu-walu | Kecamatan Sabbang | | | |
| | Kecamatan Sabbang Selatan | | | |
| 3 | Jaringan Irigasi Tersier | D.I. Baliase | Kecamatan Malangke | Rencana |
| | | | Kecamatan Masamba | |
| | | | Kecamatan Baebunta | |
| | | D.I. Baebunta | Kecamatan Sabbang | Eksisting |
| | | | Kecamatan Baebunta | |
| | | D.I. Balambang | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Bebesuk | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Hono Lodang | Kecamatan Seko | |
| D.I. Kalawin | Kecamatan Mappedeceng | | | |
| D.I. Kamassi | Kecamatan Masamba | | | |
| D.I. Kanjiro Bone-Bone | Kecamatan Bone Bone | | | |
| | Kecamatan Sukamaju | | | |

| No | Sistem Jaringan Irigasi | Nama Daerah Irigasi | Lokasi | Status |
|----|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| | | | Kecamatan Sukamaju Selatan | |
| | | D.I. Kappuna Lebannu | Kecamatan Masamba | |
| | | D.I. Lamo | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Lampuawa II | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Lampuawa III | Kecamatan Sukamaju | |
| | | D.I. Makumpa | Kecamatan Baebunta | |
| | | D.I. Mina Patiai | Kecamatan Tana Lili | |
| | | D.I. Onondoa | Kecamatan Rampi | |
| | | D.I. Palandan | Kecamatan Baebunta | |
| | | | Kecamatan Baebunta Selatan | |
| | | D.I. Patila I | Kecamatan Tana Lili | |
| | | D.I. Salu Ete | Kecamatan Sabbang | |
| | | D.I. Salulemo | Kecamatan Baebunta | |
| | | D.I. Salutabaro | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Sepakat | Kecamatan Mappedeceng | |
| | | D.I. Tamuku | Kecamatan Bone Bone | |
| | | D.I. Tanangkae | Kecamatan Sabbang Selatan | |
| | | D.I. Urukumpang | Kecamatan Malangke Barat | |
| | | | Kecamatan Baebunta Selatan | |

| | |
|-------------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM |  |


 BUPATI LUWU UTARA

 INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA KABUPATEN LUWU UTARA

| No | Nama | Lokasi |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| Jalur Evakuasi Bencana | | |
| 1 | Ampolo - Salurante | Kecamatan Rongkong |
| 2 | Arusu - Kalitata | Kecamatan Malangke Barat |
| 3 | Awo-Awo - Tolibukang | Kecamatan Baebunta |
| 4 | Babue - Putemata | Kecamatan Baebunta |
| 5 | Baebunta - Dadeko | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 6 | Baebunta - Salulemo | Kecamatan Baebunta |
| 7 | Bakka - Pengkendekan | Kecamatan Sabbang |
| 8 | Baku-Baku - Katonantana | Kecamatan Malangke Barat |
| 9 | Bakung - Pembuniang | Kecamatan Malangke Barat |
| 10 | Baliase - Pombakka | Kecamatan Masamba |
| 11 | Baliase Radda (Lingkar Selatan) | Kecamatan Masamba |
| 12 | Banyu Urip - Muktisari | Kecamatan Bone Bone |
| 13 | Batualang - Bone Subur | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 14 | Birue - Malangke Kecil | Kecamatan Malangke |
| 15 | Bone-Bone - Tamuku | Kecamatan Bone Bone |
| 16 | Boronglewa - Polegen | Kecamatan Rongkong |
| 17 | Bts. Kab. Luwu - Masamba | Kecamatan Baebunta |
| 18 | Bts. Kab. Luwu - Masamba | Kecamatan Masamba |
| 19 | Bts. Kab. Luwu - Masamba | Kecamatan Sabbang |
| 20 | Bts. Kab. Luwu - Masamba | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 21 | Bts. Kota Palopo - Bts. Kab. Luwu Utara | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 22 | Bundaran Desa Salulemo | Kecamatan Baebunta |
| 23 | Bungadidi - Poreang | Kecamatan Tana Lili |
| 24 | Bungadidi - Salusappang | Kecamatan Tana Lili |
| 25 | Bungadidi - Tanete | Kecamatan Tana Lili |
| 26 | Bungadidi - Ujungtanah | Kecamatan Tana Lili |
| 27 | Cendana Putih I - Kapidi | Kecamatan Mappedeceng |
| 28 | Cendana Putih II - Jalan Pertanian | Kecamatan Mappedeceng |
| 29 | Dadeko - Lawewe | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 30 | Dandang - Teteuri | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 31 | Dandang - Teteuri | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 32 | Dsn. Melati - Ktr. Desa B. Jaya | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 33 | Eno - Tanete | Kecamatan Seko |
| 34 | Gang D Desa Sumber Harum | Kecamatan Mappedeceng |
| 35 | Hoyane - Patahe | Kecamatan Seko |
| 36 | Indokoro - Pongo | Kecamatan Masamba |
| 37 | Jalan Samping SMP CP.I | Kecamatan Mappedeceng |
| 38 | Jalan Samping Tanggul Sidomakmur | Kecamatan Bone Bone |
| 39 | Masamba - Batas Mamuju (Eno - Tanete) | Kecamatan Seko |
| 40 | Masamba - Batas Mamuju (Masamba - Pincara) | Kecamatan Masamba |
| 41 | Masamba - Batas Mamuju (Onondoa - Tede'boe) | Kecamatan Rampi |
| 42 | Masamba - Batas Mamuju (Sae - Bts. Sulbar) | Kecamatan Seko |

2

| No | Nama | Lokasi |
|----|--|----------------------------|
| 43 | Masamba - Batas Mamuju (Saluseba - Onondoa) | Kecamatan Rampi |
| 44 | Masamba - Batas Mamuju (Singkalong - Lore) | Kecamatan Seko |
| 45 | Masamba - Batas Mamuju (Sodangan - Eno) | Kecamatan Seko |
| 46 | Masamba - Batas Mamuju (Tallang - Sae) | Kecamatan Seko |
| 47 | Masamba - Batas Mamuju (Tede'boe - Lore) | Kecamatan Rampi |
| 48 | Masamba - Batas Mamuju (Tede'boe - Lore) | Kecamatan Seko |
| 49 | Sabbang - Talang - Sae - Kaluku | Kecamatan Rongkong |
| 50 | Eno (Seko) - Parahaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Bone - Parahaleang) | Kecamatan Seko |
| 51 | Eno (Seko) - Parahaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Eno - Tanete) | Kecamatan Seko |
| 52 | Jalan Lingkar Luar | Kecamatan Malangke Barat |
| 53 | Jalan Lingkar Luar (Amassangan - Cenning) | Kecamatan Malangke Barat |
| 54 | Jalan Lingkar Luar (Baebunta - Dadeko) | Kecamatan Baebunta |
| 55 | Jalan Lingkar Luar (Baebunta - Dadeko) | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 56 | Jalan Lingkar Luar (Baebunta - Dadeko) | Kecamatan Sabbang |
| 57 | Jalan Lingkar Luar (Bungadidi - Poreang) | Kecamatan Tana Lili |
| 58 | Jalan Lingkar Luar (Cenning - Kalitata) | Kecamatan Malangke Barat |
| 59 | Jalan Lingkar Luar (Kaluku - Subur) | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 60 | Jalan Lingkar Luar (Kapidi - To'lada) | Kecamatan Mappedeceng |
| 61 | Jalan Lingkar Luar (Lara - Kalitata) | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 62 | Jalan Lingkar Luar (Lara - Kalitata) | Kecamatan Malangke Barat |
| 63 | Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Amasangan) | Kecamatan Malangke |
| 64 | Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Amasangan) | Kecamatan Malangke Barat |
| 65 | Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Malangke) | Kecamatan Malangke |
| 66 | Jalan Lingkar Luar (Malangke - Makitta) | Kecamatan Malangke |
| 67 | Jalan Lingkar Luar (Mario - Tolada) | Kecamatan Malangke |
| 68 | Jalan Lingkar Luar (Mario - Tolada) | Kecamatan Mappedeceng |
| 69 | Jalan Lingkar Luar (Patila - Munte) | Kecamatan Tana Lili |
| 70 | Jalan Lingkar Luar (Pondan - Lara) | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 71 | Jalan Lingkar Luar (Pongko-Lino) | Kecamatan Bone Bone |
| 72 | Jalan Lingkar Luar (Pongko-Lino) | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 73 | Jalan Lingkar Luar (Poreang - Karondang) | Kecamatan Tana Lili |
| 74 | Jalan Lingkar Luar (Salulemo-Lara I) | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 75 | Jalan Lingkar Luar (Spontan - Lino) | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 76 | Jalan Lingkar Luar (Sumberwangi - Spontan) | Kecamatan Mappedeceng |
| 77 | Jalan Lingkar Luar (Sumberwangi - Spontan) | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 78 | Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Pongko) | Kecamatan Bone Bone |
| 79 | Jalan Lingkar Luar (To'lada - Rampoang) | Kecamatan Malangke |
| 80 | Jl. Bosi-Bosi Dsn. Sepakat | Kecamatan Bone Bone |
| 81 | Jl. Depan Mesjid Al-Ikhlas | Kecamatan Bone Bone |
| 82 | Jl. Dermaga Desa Munte | Kecamatan Tana Lili |
| 83 | Jl. Desa Girikusuma | Kecamatan Malangke |
| 84 | Jl. Desa Girikusuma - Kambisa - Tolada | Kecamatan Malangke |
| 85 | Jl. Durian | Kecamatan Bone Bone |
| 86 | Jl. Kalawang Dsn. Sepakat | Kecamatan Bone Bone |
| 87 | Jl. Mujahidin | Kecamatan Masamba |
| 88 | Jl. Perum. Simpursiang | Kecamatan Masamba |
| 89 | Jl. Simpursiang | Kecamatan Masamba |
| 90 | Jl. Simpursiang - Lingkar Selatan | Kecamatan Masamba |
| 91 | Jl. Simpursiang Kel. Kasimbong | Kecamatan Masamba |
| 92 | Jl. Syuhada | Kecamatan Masamba |

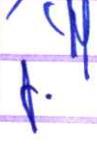
| No | Nama | Lokasi |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
| 93 | Jl. Taman Siswa | Kecamatan Masamba |
| 94 | Kalotok - Batualang | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 95 | Kalukku - Wonokerto | Kecamatan Sukamaju |
| 96 | Kalukku - Wonokerto | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 97 | Kaluku - Subur | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 98 | Kaluku - Tamboke | Kecamatan Sukamaju |
| 99 | Kambisa - Girikusuma | Kecamatan Malangke |
| 100 | Kambisa - Girikusuma | Kecamatan Malangke Barat |
| 101 | Kambisa - Lettekang | Kecamatan Malangke |
| 102 | Kambisa - Lettekang | Kecamatan Malangke Barat |
| 103 | Kampung Baru - Lengkong | Kecamatan Seko |
| 104 | Kanandede - Balanalu | Kecamatan Rongkong |
| 105 | Kanandede - Uri | Kecamatan Rongkong |
| 106 | Kantor Desa Pengkendekan - Tinimpong | Kecamatan Sabbang |
| 107 | Kapidi - Laira | Kecamatan Mappedeceng |
| 108 | Kapidi - Laira | Kecamatan Masamba |
| 109 | Kapidi - To'lada | Kecamatan Mappedeceng |
| 110 | Kapidi - Ujung Matajang | Kecamatan Mappedeceng |
| 111 | Kapuna - Taman Siswa | Kecamatan Masamba |
| 112 | Ktr. Desa B. Jaya - Dsn. Mawar | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 113 | Lampuawa - Salubuah | Kecamatan Sukamaju |
| 114 | Lawewe - Limbong Wara | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 115 | Lawewe - Limbong Wara | Kecamatan Malangke Barat |
| 116 | Lawewe - To'Galingsgang | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 117 | Limbong - Luarang | Kecamatan Rongkong |
| 118 | Lino - Cappabatana | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 119 | Lino - Ladongi | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 120 | Lino - Ujung Timur | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 121 | Lodang - Padang Raya | Kecamatan Seko |
| 122 | Longa - Pohayaang | Kecamatan Seko |
| 123 | Lorong 1 A Desa Sumber Harum | Kecamatan Mappedeceng |
| 124 | Lorong 1 Desa Cendana Putih II | Kecamatan Mappedeceng |
| 125 | Lorong 1 Desa Onondoa | Kecamatan Rampi |
| 126 | Lorong 3 A Desa Mulyorejo | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 127 | Lorong 3 Kampung Bali | Kecamatan Tana Lili |
| 128 | Lorong 3 Kampung Jawa | Kecamatan Bone Bone |
| 129 | Lorong 4 B Desa Subur | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 130 | Lorong 4 Desa Cendana Putih II | Kecamatan Mappedeceng |
| 131 | Lorong 4 Desa Girikusuma | Kecamatan Malangke |
| 132 | Lorong 4 Ds. Mekarsari Jaya | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 133 | Lorong 4 Ds. Mekarsari Jaya | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 134 | Lorong 5 Ds. Mekarsari Jaya | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 135 | Lorong 5 Ds. Mekarsari Jaya | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 136 | Lorong 5 Pembasean Ds. Patila | Kecamatan Bone Bone |
| 137 | Lorong 6 B Desa Rawamangun | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 138 | Lorong 8 Desa Sukamukti | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 139 | Lorong A Desa Cendana Putih II | Kecamatan Mappedeceng |
| 140 | Lorong A Desa Girikusuma | Kecamatan Malangke |
| 141 | Lorong IV B Muktisari - Persawahan | Kecamatan Bone Bone |
| 142 | Lorong SMAN 2 Sukamaju - Rawamangun | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 143 | Lorong Tengah (Tugu) Sidobinangun | Kecamatan Tana Lili |
| 144 | Lorong V - Jemb. Pongko | Kecamatan Bone Bone |

| No | Nama | Lokasi |
|-----|---|----------------------------|
| 145 | Lrg. 2 Dsn. Mawar | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 146 | Makarate - Minanga | Kecamatan Rongkong |
| 147 | Makitta - Salekoe | Kecamatan Malangke |
| 148 | Malangke - Makitta | Kecamatan Malangke |
| 149 | Mappedeceng - Kapidi | Kecamatan Mappedeceng |
| 150 | Mappedeceng - Kapidi - Mekarjaya - Sumber Wangi | Kecamatan Mappedeceng |
| 151 | Mari-Mari - To'Borung | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 152 | Mario - Polewali | Kecamatan Baebunta |
| 153 | Mario - Polewali | Kecamatan Masamba |
| 154 | Mario - Tolada | Kecamatan Baebunta |
| 155 | Mario - Tolada | Kecamatan Malangke |
| 156 | Mario - Tolada | Kecamatan Masamba |
| 157 | Masamba - Bts. Kab. Luwu Timur | Kecamatan Bone Bone |
| 158 | Masamba - Bts. Kab. Luwu Timur | Kecamatan Mappedeceng |
| 159 | Masamba - Bts. Kab. Luwu Timur | Kecamatan Masamba |
| 160 | Masamba - Bts. Kab. Luwu Timur | Kecamatan Sukamaju |
| 161 | Masamba - Bts. Kab. Luwu Timur | Kecamatan Tana Lili |
| 162 | Masamba - Kambisa | Kecamatan Baebunta |
| 163 | Masamba - Kambisa | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 164 | Masamba - Kambisa | Kecamatan Malangke Barat |
| 165 | Masamba - Kambisa | Kecamatan Masamba |
| 166 | Masarang - Tumandi | Kecamatan Sabbang |
| 167 | Minanga Tallu - Kampung Bali | Kecamatan Sukamaju |
| 168 | Minna - Patiai | Kecamatan Tana Lili |
| 169 | Minna - Sumberdadi | Kecamatan Tana Lili |
| 170 | Muktijaya - Bringin Jaya (Lara I) | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 171 | Muktisari - Landung | Kecamatan Bone Bone |
| 172 | Muktitama - Lara | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 173 | Onondoa - Kantor Camat Rampi | Kecamatan Rampi |
| 174 | Padang Raya - Bengke | Kecamatan Seko |
| 175 | Padang Sarre - Tinimpong | Kecamatan Sabbang |
| 176 | Panasae - Arusu | Kecamatan Malangke Barat |
| 177 | Paomacang - Lino | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 178 | Patila - Makowong | Kecamatan Bone Bone |
| 179 | Patila - Makowong | Kecamatan Tana Lili |
| 180 | Patila - Munte | Kecamatan Tana Lili |
| 181 | Patila - Sidobinangun | Kecamatan Bone Bone |
| 182 | Patila - Sidobinangun | Kecamatan Tana Lili |
| 183 | Patimang - Girikusuma | Kecamatan Malangke |
| 184 | Patoloan - Muktisari | Kecamatan Bone Bone |
| 185 | Pattimang - Pincepute | Kecamatan Malangke |
| 186 | Pengkendekan -Tinimpong | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 187 | Pengkendekan -Tinimpong | Kecamatan Sabbang |
| 188 | Perumahan Trans. AL Lorong Utara | Kecamatan Malangke |
| 189 | Petalandung - Girikusuma | Kecamatan Malangke |
| 190 | Petalandung - Girikusuma | Kecamatan Malangke Barat |
| 191 | Pincepute - Tokke | Kecamatan Malangke |
| 192 | Pokapaang - Hoyane | Kecamatan Seko |
| 193 | Pokapaang - Poak-Poak | Kecamatan Seko |
| 194 | Polegen - Luarang | Kecamatan Rongkong |
| 195 | Polejiwa - To'bolu | Kecamatan Malangke Barat |

| No | Nama | Lokasi |
|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 196 | Pompaniki - To'ngangka | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 197 | Pongko - Batang Tongka | Kecamatan Bone Bone |
| 198 | Pongo - Bolumpore | Kecamatan Masamba |
| 199 | Pongo - Jemb. Gantung Pongo | Kecamatan Masamba |
| 200 | Radda - Baliase (Lingkar Utara) | Kecamatan Masamba |
| 201 | Radda - Meli | Kecamatan Baebunta |
| 202 | Radda - TPA Meli | Kecamatan Baebunta |
| 203 | Rambakulu - Sarembo | Kecamatan Sabbang |
| 204 | Rambakulu - Sarembo | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 205 | Rampoang - Sumber Agung | Kecamatan Malangke |
| 206 | Rante Malona - Dsn. Banyusari | Kecamatan Bone Bone |
| 207 | Rawamangun - Paomacang | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 208 | Rinding Allo - Manganan | Kecamatan Rongkong |
| 209 | Rompu - To'radda | Kecamatan Masamba |
| 210 | Rura Baru - To' Rea | Kecamatan Baebunta |
| 211 | Rura Baru - To' Rea | Kecamatan Masamba |
| 212 | Salu Tallang - Ampollo | Kecamatan Rongkong |
| 213 | Saluampak - To'Katimbang | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 214 | Salulemo-Lara I | Kecamatan Baebunta |
| 215 | Salulemo-Lara I | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 216 | Salulimbong - Masarang | Kecamatan Sabbang |
| 217 | Salutallang - Boronglewa | Kecamatan Rongkong |
| 218 | Salutallang - Limbong | Kecamatan Rongkong |
| 219 | Salutallang - Uri | Kecamatan Rongkong |
| 220 | Sapana - Lino | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 221 | Sarembo-Mekarsari Jaya | Kecamatan Sabbang |
| 222 | Sarembo-Mekarsari Jaya | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 223 | Sidobinangun - Sidomakmur | Kecamatan Bone Bone |
| 224 | Sidobinangun - Sidomakmur | Kecamatan Tana Lili |
| 225 | Sidomakmur - Kembangmakmur | Kecamatan Bone Bone |
| 226 | Sidomakmur - Kembangmakmur | Kecamatan Tana Lili |
| 227 | Sidomakmur - Sidorukun | Kecamatan Bone Bone |
| 228 | Sidomukti - Sidomakmur | Kecamatan Bone Bone |
| 229 | Sidomukti - Sidomakmur | Kecamatan Tana Lili |
| 230 | Sidoraharjo - Malengko | Kecamatan Sukamaju |
| 231 | Sidoraharjo - Malengko | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 232 | Singkalong - Lore | Kecamatan Seko |
| 233 | Sodangan - Lodang | Kecamatan Seko |
| 234 | Sukadamai - Sidoraharjo | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 235 | Sukamaju - Sukadamai | Kecamatan Sukamaju |
| 236 | Sukamukti - Jalan Pertanian | Kecamatan Sukamaju |
| 237 | Sukamukti - Jalan Pertanian | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 238 | Sukaraya - Sadar | Kecamatan Bone Bone |
| 239 | Sumber Agung Utara - To'Awo | Kecamatan Malangke |
| 240 | Sumberagung - Trans-AL | Kecamatan Malangke |
| 241 | Talesse - Muktitama | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 242 | Taman Siswa - Lingkar Selatan | Kecamatan Masamba |
| 243 | Tamuku - Pongko | Kecamatan Bone Bone |
| 244 | Tandung - Kalitata | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 245 | Tandung - Kalitata | Kecamatan Malangke Barat |
| 246 | Tandung - Putemata | Kecamatan Baebunta |
| 247 | Tandung - Putemata | Kecamatan Malangke Barat |

| No | Nama | Lokasi |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| 248 | Tanete - Bana | Kecamatan Seko |
| 249 | Tarobok - Kadundung | Kecamatan Baebunta |
| 250 | Tarobok - Kadundung | Kecamatan Sabbang |
| 251 | Tarobok - Kariango | Kecamatan Baebunta |
| 252 | Tarobok - Kariango | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 253 | Tarobok - Teteinduk | Kecamatan Baebunta |
| 254 | Tarobok - Teteinduk | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 255 | Tarue - Rante Bone | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 256 | Teteuri - Batualang | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 257 | Teteuri - Batualang | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 258 | To'bebesuk - Mekarsari Jaya | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 259 | To'borung - Batualang | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 260 | To'borung - To'katimbang | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 261 | To'lada - Benteng | Kecamatan Malangke |
| 262 | To'lada - Girikusuma | Kecamatan Malangke |
| 263 | To'lada - Lumu-Lumu | Kecamatan Malangke |
| 264 | To'lada - Sumber Agung | Kecamatan Malangke |
| 265 | Tolangi - Landung | Kecamatan Bone Bone |
| 266 | Tolangi - Landung | Kecamatan Sukamaju |
| 267 | To'Ledan - Tinimpong | Kecamatan Sabbang |
| 268 | To'Ledan - Tinimpong | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 269 | Tompe - Waelawi | Kecamatan Malangke Barat |
| 270 | To'tallang - Dondo | Kecamatan Malangke Barat |
| 271 | Transad - Sukadamai | Kecamatan Mappedeceng |
| 272 | Transad - Sukadamai | Kecamatan Sukamaju |
| 273 | Ujung Matajang - Cendana Putih | Kecamatan Mappedeceng |
| 274 | Ujung Matajang - Galinggang | Kecamatan Mappedeceng |
| 275 | Waelawi - TPI Waelawi | Kecamatan Malangke Barat |
| 276 | Wonokerto - Subur | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| Tempat Evakuasi Bencana | | |
| 1 | Alun-alun Desa Lara | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 2 | Gereja Katolik St. Maria Bunda Allah Stasi Kapipe | Kecamatan Tana Lili |
| 3 | Gereja Katolik Stasi Teteuri | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 4 | Gereja Kibaid Jemaat Rambakulu | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 5 | Gereja Kibaid Jemaat Teteinduk | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 6 | Gereja Masehi Advent Desa Marante Kec. Seko | Kecamatan Seko |
| 7 | Gereja Poakpoak | Kecamatan Seko |
| 8 | Gereja Toraja Jemaat Rante Bone | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 9 | Kantor Disporabudpar Luwu Utara | Kecamatan Masamba |
| 10 | Lapangan Andi Lallo Gauna Lampuawa | Kecamatan Sukamaju |
| 11 | Lapangan Andi Masa Oputolellung Desa Kaluku | Kecamatan Sukamaju |
| 12 | Lapangan Desa Cendana Putih | Kecamatan Mappedeceng |
| 13 | Lapangan Desa Hoyane Kec. Seko | Kecamatan Seko |
| 14 | Lapangan Desa Salulemo | Kecamatan Sukamaju |
| 15 | Lapangan Desa Sidobinangun | Kecamatan Tana Lili |
| 16 | Lapangan Desa Wono | Kecamatan Seko |
| 17 | Lapangan Desa Wonokerto | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 18 | Lapangan Olahraga Kampung Baru | Kecamatan Mappedeceng |
| 19 | Lapangan Padang Baula Kec. Seko | Kecamatan Seko |
| 20 | Lapangan Sepak Bola Baebunta | Kecamatan Baebunta |

| No | Nama | Lokasi |
|----|---|----------------------------|
| 21 | Lapangan Sepak Bola Cendana Putih IV | Kecamatan Mappedeceng |
| 22 | Lapangan Sepak Bola Patila | Kecamatan Tana Lili |
| 23 | Lapangan Sepak Bola Sabbang | Kecamatan Sabbang |
| 24 | Masjid Al Muttaqien | Kecamatan Sukamaju |
| 25 | Masjid Al-Hikma | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 26 | Masjid Al-Ikhlas | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 27 | Masjid Istiqamah Cening | Kecamatan Malangke Barat |
| 28 | Masjid Jabal Nur | Kecamatan Bone Bone |
| 29 | Masjid Miftahul Jannah | Kecamatan Bone Bone |
| 30 | Masjid Miftahul Jannah Kambisa | Kecamatan Malangke Barat |
| 31 | Masjid Miftahul Khoir | Kecamatan Bone Bone |
| 32 | Masjid Nurul Amin (Desa Banyuurip, Kec. Bone-bone) | Kecamatan Bone Bone |
| 33 | Masjid Nurul Amin (Desa Cendana Putih II, Kec. Mappedeceng) | Kecamatan Mappedeceng |
| 34 | Masjid Nurul Amin (Desa Sadar, Kec. Bone-bone) | Kecamatan Bone Bone |
| 35 | Masjid Nurul Iman | Kecamatan Malangke Barat |
| 36 | Masjid Nurul Mukmin | Kecamatan Tana Lili |
| 37 | Masjid Nurul Ulum | Kecamatan Bone Bone |
| 38 | Masjid Nurul Yaqin | Kecamatan Sabbang |
| 39 | Puskesmas Limbong | Kecamatan Rongkong |
| 40 | Puskesmas Malangke | Kecamatan Malangke |
| 41 | SDN 046 Beringin Jaya | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 42 | SDN 050 Dadeko | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 43 | SDN 190 Muktisari | Kecamatan Bone Bone |
| 44 | SMA Negeri 2 Sabbang | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 45 | SMP Negeri 1 Seko Poyahaang | Kecamatan Seko |
| 46 | SMP Negeri 1 Sukamaju | Kecamatan Sukamaju |
| 47 | SMP Negeri 3 Malangke Timur | Kecamatan Malangke |
| 48 | SMP Negeri 4 Baebunta | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 49 | SMP Negeri 4 Masamba | Kecamatan Masamba |
| 50 | SMP Negeri 5 Sabbang | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 51 | SMP Negeri 6 Satu Atap | Kecamatan Bone Bone |
| 52 | SMPN Negeri 4 Tanalili | Kecamatan Tana Lili |
| 53 | Tempat Evakuasi Desa Radda | Kecamatan Baebunta |
| 54 | UPT SDN 011 Rante Pasang | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 55 | UPT SDN 075 Lambiri | Kecamatan Seko |

| | |
|-------------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM |  |

BUPATI LUWU UTARA,

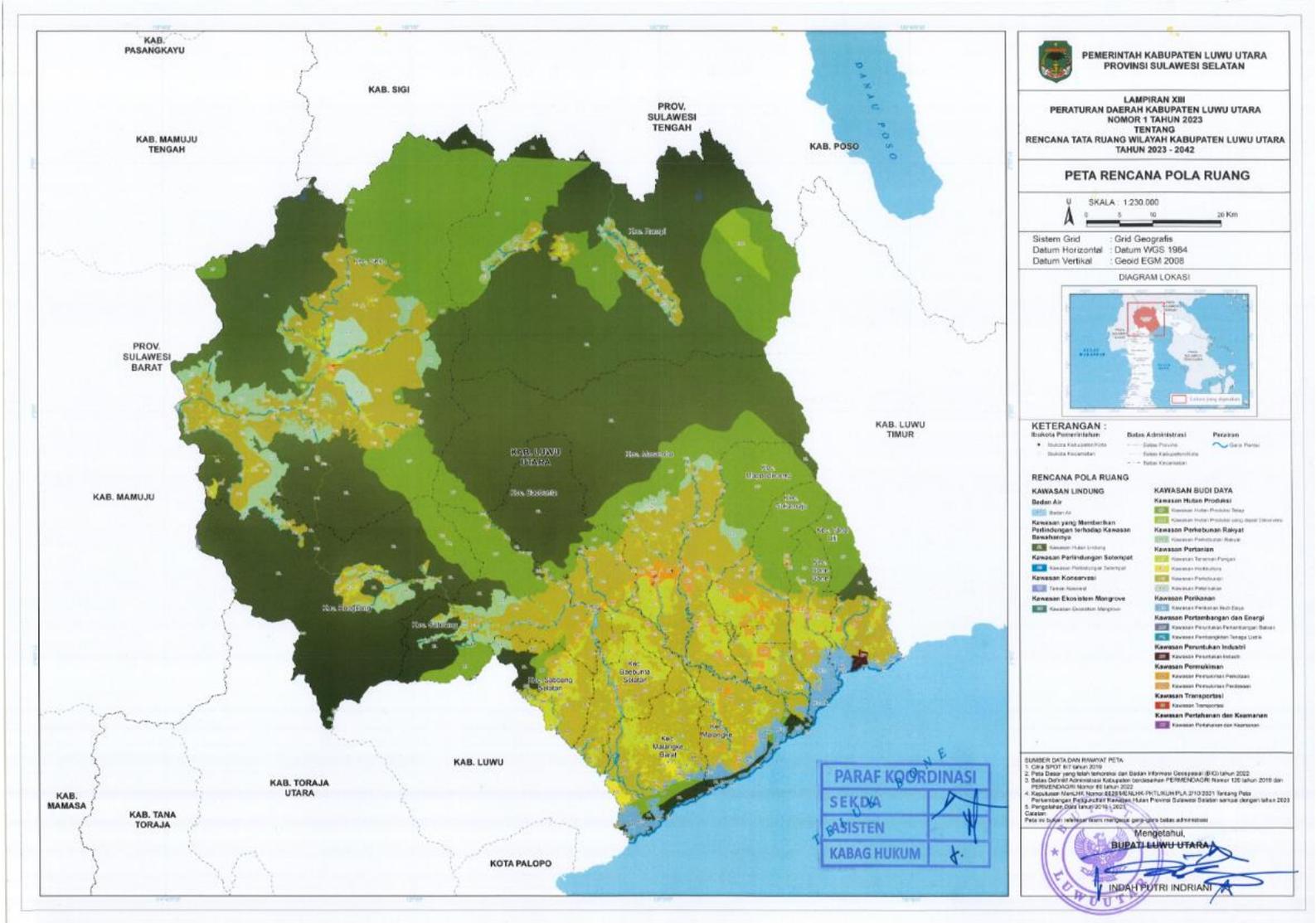




INDAH PUTRI INDRIANI

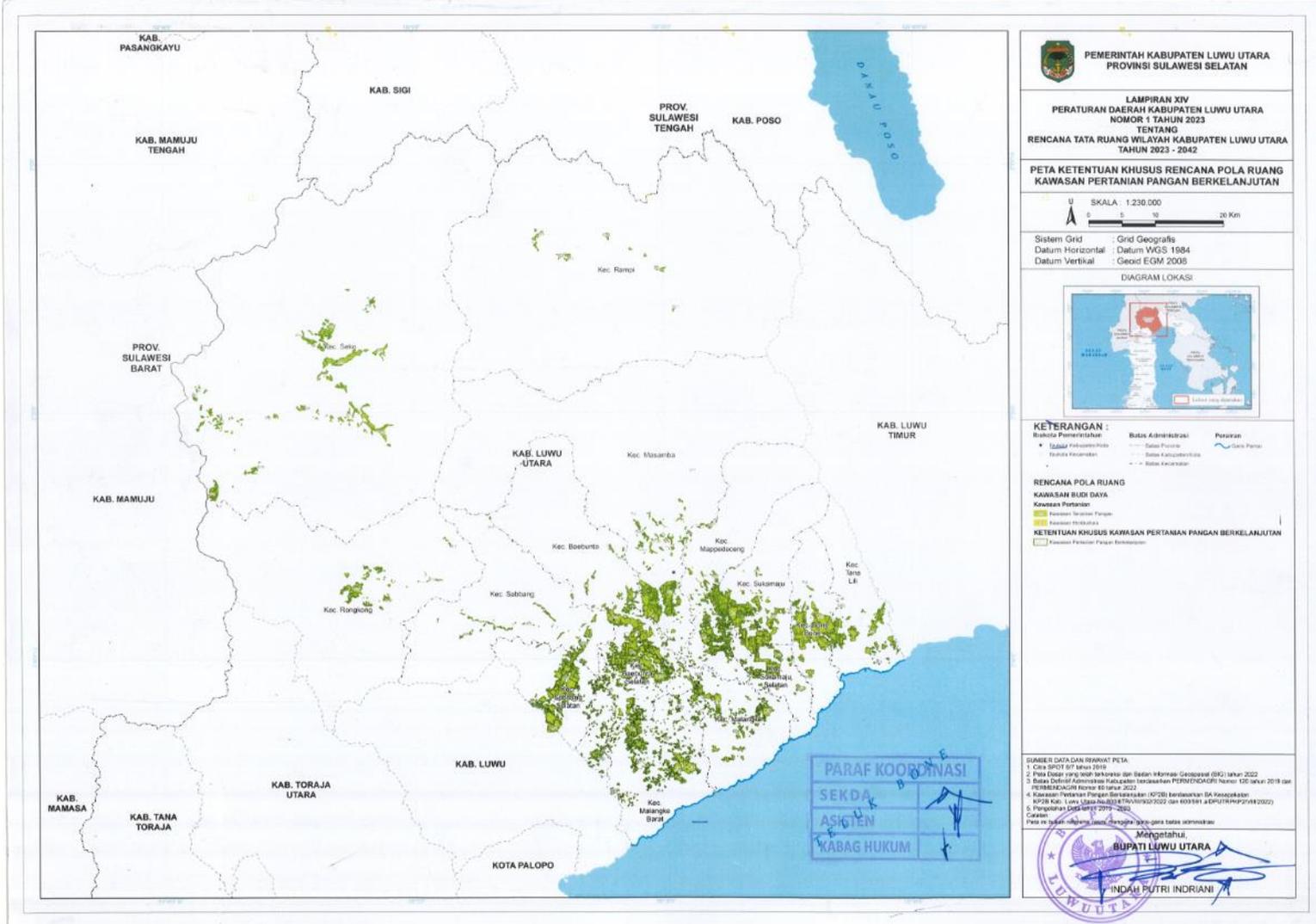
LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 KABUPATEN LUWU UTARA



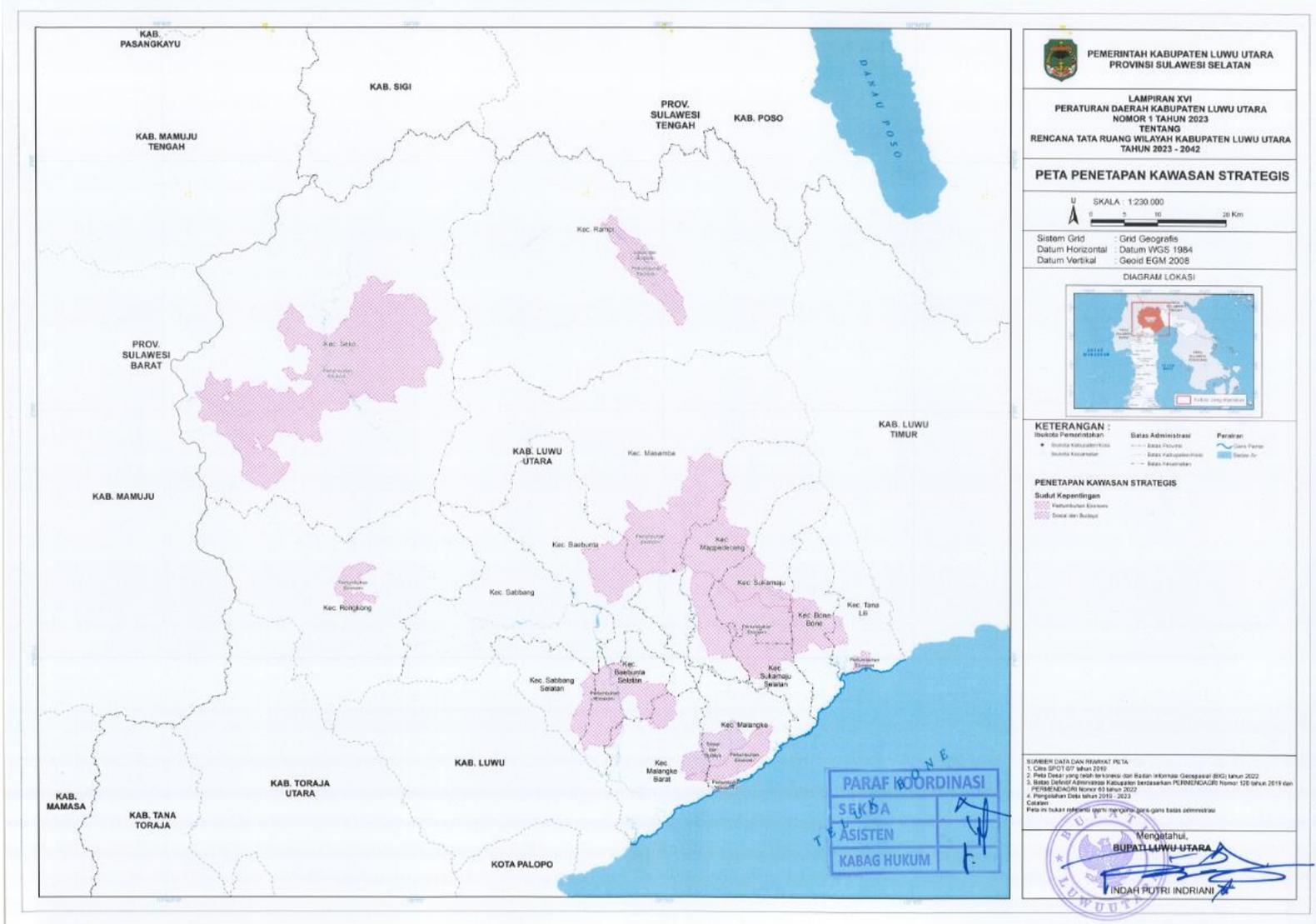
LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN EKSISTING
 KABUPATEN LUWU UTARA

| No. | Nama | Lokasi |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| TNI Angkatan Darat | | |
| 1 | Koramil 1403-08/Rongkong | Kecamatan Rongkong |
| 2 | Koramil 1403-09/Sabbang | Kecamatan Sabbang |
| 3 | Koramil 1403-10/Malangke | Kecamatan Malangke |
| 4 | Koramil 1403-11/Masamba | Kecamatan Masamba |
| 5 | Koramil 1403-12/Bone Bone | Kecamatan Bone Bone |
| TNI Angkatan Laut | | |
| 1 | Prokimal/Daerah Latihan | Kecamatan Malangke |
| 2 | Kantor Prokimal/Daerah Latihan | Kecamatan Malangke |
| 3 | Pos TNI AL Munte | Kecamatan Tana Lili |
| Kepolisian | | |
| 1 | Kepolisian Resort Luwu Utara | Kecamatan Masamba |
| 2 | Kepolisian Sektor Masamba | Kecamatan Masamba |
| 3 | Kepolisian Sektor Baebunta | Kecamatan Baebunta |
| 4 | Kepolisian Sektor Bone Bone | Kecamatan Bone Bone |
| 5 | Kepolisian Sektor Rongkong | Kecamatan Rongkong |
| 6 | Kepolisian Sektor Malangke | Kecamatan Malangke |
| 7 | Kepolisian Sektor Malangke Barat | Kecamatan Malangke Barat |
| 8 | Kepolisian Sektor Mappedeceng | Kecamatan Mappedeceng |
| 9 | Kepolisian Sektor Sabbang | Kecamatan Sabbang |
| 10 | Kepolisian Sektor Sukamaju | Kecamatan Sukamaju |
| 11 | Kepolisian Sektor Sukamaju Selatan | Kecamatan Sukamaju Selatan |
| 12 | Kepolisian Sektor Sabbang Selatan | Kecamatan Sabbang Selatan |
| 13 | Kepolisian Sektor Baebunta Selatan | Kecamatan Baebunta Selatan |
| 14 | Kepolisian Sektor Rampi | Kecamatan Rampi |
| 15 | Kepolisian Sektor Seko | Kecamatan Seko |
| 16 | Kepolisian Sektor Tana Lili | Kecamatan Tana Lili |
| 17 | Markas Brimob Batalyon D Pelopor | Kecamatan Baebunta |

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------------------------------|---|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | | TP-IV | | | | | TP-V | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| I | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Perwujudan Sistem Pusat Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Perkotaan Masamba | Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan prioritas Masamba | Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Penataan lingkungan kawasan kumuh perkotaan | Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR/ Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Peningkatan sarana pelayanan umum dan pemerintahan | Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | Pengembangan dan peningkatan kawasan pusat perdagangan dan jasa | Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | Pembangunan dan peningkatan RTH di kawasan perkotaan | Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng | APBD Kab./ Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------------------------|---|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | | TP-IV | | | | TP-V | | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| g | Pemeliharaan dan perawatan RTH di kawasan perkotaan | Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng | APBD Kab./ Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | Pengembangan rumah sakit umum tipe C | Kecamatan Masamba | APBD Kab./ Swasta | Dinas Kesehatan Kabupaten, RSUD A. Djemma/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i | Pengembangan dan peningkatan kawasan pendidikan | Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng | APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j | Penguatan sistem mitigasi bencana | Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Mappedeceng | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR, BNPB/ BPBD Provinsi/ BPBD Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyusunan rencana rinci perkotaan dan peraturan zonasi pusat-pusat pelayanan kawasan | Kawasan Perkotaan Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Kawasan Perkotaan Malangke di Kecamatan Malangke, Kawasan Perkotaan Marobo di Kecamatan Sabbang, Kawasan Perkotaan Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Kawasan Perkotaan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan dan peningkatan kawasan perdagangan dan jasa | Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Pengembangan dan peningkatan kawasan pendidikan | Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju | APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Pengembangan dan peningkatan fasilitas kesehatan | Bungapati di Kecamatan Tana Lili, | APBD Kab./ Swasta | Dinas Kesehatan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-------------------------------------|--|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | | | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| | | Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | Pengembangan infrastruktur lingkungan permukiman | Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | Pengembangan dan penataan RTH kawasan | Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju | APBD Kab./ Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g | Pemeliharaan dan perawatan RTH kawasan | Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju | APBD Kab./ Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | Penguatan sistem mitigasi bencana | Bungapati di Kecamatan Tana Lili, Malangke di Kecamatan Malangke, Marobo di Kecamatan Sabbang, Padang Balua di Kecamatan Seko, dan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR, BNPB/ BPBD Provinsi/ BPBD Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-------------------|---|---|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | | TP-II | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | TP-V | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | |
| A.3 | Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penataan ruang pusat-pusat pelayanan lingkungan | Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan fasilitas perekonomian skala lingkungan | Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------------------|--|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | | | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| | | Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan umum skala lingkungan | Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Peningkatan infrastruktur permukiman skala lingkungan | Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, | APBD Kab. / Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|--|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | | | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| | | Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | Pengembangan dan penataan RTH skala lingkungan | Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan | APBD Kab./ Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------------------------------------|---|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | TP-V | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | |
| | | Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | Pemeliharaan dan perawatan RTH skala lingkungan | Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta | APBD Kab./ Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g | Penguatan sistem mitigasi bencana | Pusat Permukiman Pedesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone, Pusat Permukiman Pedesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng, Pusat Permukiman Pedesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Limbong di Kecamatan Rongkong, | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. / Swasta | Kementerian PUPR, BNPB/ BPBD Provinsi/ BPBD Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-----------------------|---|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | |
| | | Pusat Permukiman Pedesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan, Pusat Permukiman Pedesaan Onondoa di Kecamatan Rampi, Pusat Permukiman Pedesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat, dan Pusat Permukiman Pedesaan Salassa di Kecamatan Baebunta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Perwujudan Sistem Prasarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1 | Sistem Jaringan Transportasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | Sistem Jaringan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1 | Jalan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1.1 | Jalan Arteri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1.1.1 | Jalan Arteri Primer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan arteri primer | ruas BTS. KAB. LUWU - MASAMBA, ruas BTS. KOTA PALOPO - BTS. KAB. LUWU UTARA, dan ruas MASAMBA - BTS. KAB. LUWU TIMUR. | APBN | Kementerian PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1.2 | Jalan Kolektor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1.2.1 | Jalan Kolektor Primer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan jalan kolektor primer | ruas Jalan Pesisir Teluk Bone | APBD Prov./ APBD Kab. | Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer | ruas Eno (Seko) - Parahaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Bone - Parahaleang), ruas Eno (Seko) - Parahaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Eno - Tanete), ruas Eno (Seko) - Parahaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Parahaleang - Batas Sul. Tengah), ruas Jalan Lingkar Luar, ruas Jalan Lingkar Luar (Amassangan - Cenning), | APBD Prov./ APBD Kab. | Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|------------------|--------------------|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | | TP-IV | | | | TP-V | | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| | | ruas Jalan Lingkar Luar (Baebunta - Dadeko), ruas Jalan Lingkar Luar (Bone-Bone - Tamuku), ruas Jalan Lingkar Luar (Bungadidi - Poreang), ruas Jalan Lingkar Luar (Cenning - Kalitata), ruas Jalan Lingkar Luar (Kaluku - Subur), ruas Jalan Lingkar Luar (Kapidi - To'lada), ruas Jalan Lingkar Luar (Lara - Kalitata), ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Amasangan), ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Malangke), ruas Jalan Lingkar Luar (Malangke - Makitta), ruas Jalan Lingkar Luar (Mario - Tolada), ruas Jalan Lingkar Luar (Patila - Munte), ruas Jalan Lingkar Luar (Pondan - Lara), ruas Jalan Lingkar Luar (Pongko-Lino), ruas Jalan Lingkar Luar (Poreang - Karondang), ruas Jalan Lingkar Luar (Salulemo-Lara I), ruas Jalan Lingkar Luar (Spontan - Lino), ruas Jalan Lingkar Luar (Sumberwangi - Spontan), ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Pongko), ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Tanah Takko'), ruas Jalan Lingkar Luar (To'lada - Rampoang), ruas Jalan Pesisir Teluk Bone, ruas Kalukku - Wonokerto, ruas Kambisa - Lettekang, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--------------------------|---|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | |
| | | ruas Kapidi - To'lada, ruas Mappedeceng - Kapidi, ruas Mappedeceng - Kapidi - Mekarjaya - Sumber Wangi, ruas Mario - To'lada, ruas Masamba - Batas Mamuju (Eno - Singkalong), ruas Masamba - Batas Mamuju (Eno - Tanete), ruas Masamba - Batas Mamuju (Lore - Tedeboe), ruas Masamba - Batas Mamuju (Masamba - Pincara), ruas Masamba - Batas Mamuju (Onondoa - Tede'boe), ruas Masamba - Batas Mamuju (Pincara - Saluseba), ruas Masamba - Batas Mamuju (Sae - Bts. Sulbar), ruas Masamba - Batas Mamuju (Saluseba - Onondoa), ruas Masamba - Batas Mamuju (Singkalong - Lore), ruas Masamba - Batas Mamuju (Sodangan - Eno), ruas Masamba - Batas Mamuju (Tallang - Sae), ruas Masamba - Kambisa, ruas Patila - Munte, dan ruas Sabbang - Talang - Sae - Kaluku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Rencana usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer ruas Masamba - Batas Mamuju (JKP-2) | ruas Sae - Bts. Sulbar (JKP-3), dan ruas Tallang - Sae (JKP-3) | APBD Prov./ APBD Kab. | Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Rencana usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer ruas Masamba - Batas Mamuju (JKP-2) | ruas Eno-Tanete (JKP-4), ruas Masamba-Pincara (JKP-4), ruas Onondoa-Tede'boe (JKP-4), ruas Pincara-Saluseba (JKP-4), ruas Saluseba-Onondoa (JKP-4), ruas Singkalong-Lore (JKP-4), ruas Sodangan-Eno (JKP-4), dan | APBD Prov./ APBD Kab. | Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--------------------------|---|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | |
| e | Rencana usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer ruas Eno (Seko) - Parahaleang - Batas Sulteng (Sigi) (JKP-3) | ruas Lore-Tedeboe (JKP-4). ruas Bone – Parahaleang (JKP-4), ruas Eno - Tanete (JKP-4), dan ruas Parahaleang - Batas Sul. Tengah (JKP-4) | APBD Prov./ APBD Kab. | Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1.2.2 | Jalan Kolektor Sekunder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan kolektor sekunder | ruas Baliase Radda (Lingkar Selatan), ruas Jl. Tamansiswa – Lingkar Utara, dan ruas Radda – Baliase (Lingkar Utara). | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1.3 | Jalan Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1.3.1 | Jalan Lokal Primer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan lokal primer | Seluruh kecamatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran V terkait Jalan Lokal Kabupaten Luwu Utara) | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1.3.2 | Jalan Lokal Sekunder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan lokal sekunder | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Tana Lili (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran V terkait Jalan Lokal Kabupaten Luwu Utara) | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1.4 | Jalan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1.4.1 | Jalan Lingkungan Primer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan lingkungan primer | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|--|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | |
| | | Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran V terkait Jalan Lingkungan Kabupaten Luwu Utara) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.1.4.2 | Jalan Lingkungan Sekunder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jalan lingkungan sekunder | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran V terkait Jalan Lingkungan Kabupaten Luwu Utara) | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.2 | Jalan Tol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan Ruas Jalan Tol Poso – Tindantana – Palopo | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Tana Lili | APBN/ Swasta | Kementerian PUPR/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.3 | Terminal Penumpang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.3.1 | Terminal Penumpang Tipe B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan terminal penumpang tipe B Terminal Masamba | Kecamatan Masamba | APBD Prov. | Dinas Perhubungan, Dinas PUTR Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.3.2 | Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembebasan lahan terminal penumpang tipe C | Terminal Bone Bone di Kecamatan Bone Bone, | APBD Kab. | Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Tata | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | | | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| | | Terminal Malangke di Kecamatan Malangke, Terminal Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat, Terminal Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng, Terminal Sabbang di Kecamatan Sabbang, Terminal Sabbang Selatan di Kecamatan Sabbang Selatan, Terminal Seko di Kecamatan Seko, dan Terminal Sukamaju di Kecamatan Sukamaju | | Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan terminal penumpang tipe C | Terminal Bone Bone di Kecamatan Bone Bone, Terminal Malangke di Kecamatan Malangke, Terminal Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat, Terminal Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng, Terminal Sabbang di Kecamatan Sabbang, Terminal Sabbang Selatan di Kecamatan Sabbang Selatan, Terminal Seko di Kecamatan Seko, dan Terminal Sukamaju di Kecamatan Sukamaju | APBD Kab. | Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.4 | Terminal Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembebasan lahan terminal barang | Terminal Barang Malangke di Kecamatan Malangke, Terminal Barang Sukamaju di Kecamatan Sukamaju, dan Terminal Barang Tana Lili di Kecamatan Tana Lili | APBD Prov./ APBD Kab. | Dinas Perhubungan, Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | pembangunan terminal barang | Terminal Barang Malangke di Kecamatan Malangke, Terminal Barang Sukamaju di Kecamatan Sukamaju, dan Terminal Barang Tana Lili di Kecamatan Tana Lili | APBD Prov./ APBD Kab. | Dinas Perhubungan, Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------|---|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | | TP-IV | | | | | TP-V | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| | | | | Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1.5 | Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan/atau pemeliharaan jembatan | Seluruh kecamatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran VI terkait Jembatan Kabupaten Luwu Utara) | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.2 | Sistem Jaringan Kereta Api | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.2.1 | Jaringan Jalur Kereta Api | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.2.1.1 | Jaringan Jalur Kereta Api Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.2.1.1.1 | Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembebasan lahan jaringan rel kereta api antarkota lintas Parepare – Belopa – Palopo – Masamba – Malili | Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone Bone, dan Kecamatan Tana Lili | APBN/ Swasta | Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan rel kereta api antarkota lintas Parepare – Belopa – Palopo – Masamba – Malili | Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone Bone, dan Kecamatan Tana Lili | APBN/ Swasta | Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.2.2 | Stasiun Kereta Api | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.2.2.1 | Stasiun Penumpang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembebasan lahan stasiun kereta api Stasiun Masamba | Kecamatan Mappedeceng | APBN/ Swasta | Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan stasiun kereta api Stasiun Masamba | Kecamatan Mappedeceng | APBN/ Swasta | Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.3 | Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.3.1 | Pelabuhan Penyeberangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.3.1.1 | Pelabuhan Penyeberangan Kelas III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan/atau pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Munte | Kecamatan Tana Lili | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Kementerian Perhubungan/Dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|--|---|------|-------|------|------|--------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | TP-III | | | TP-IV | | | TP-V | | | | | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | |
| | | | | Perhubungan Provinsi/ Dinas Perhubungan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.4 | Sistem Jaringan Transportasi Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.4.1 | Pelabuhan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.4.1.1 | Pelabuhan Pengumpan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.4.1.1.1 | Pelabuhan Pengumpan Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan Pelabuhan Cappasolo/Malangke yang dikenal dengan nama Pelabuhan Malangke | Kecamatan Malangke | APBN/ APBD Kab. | Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan dan/atau pemeliharaan Pelabuhan Laut Munte | Kecamatan Tana Lili | APBN/ APBD Prov. | Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Provinsi/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.4.1.2 | Terminal Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan/atau pemeliharaan Terminal Khusus Energi Luwu Utara | Kecamatan Tana Lili | Swasta | Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.4.1.3 | Pelabuhan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.4.1.3.1 | Pangkalan Pendaratan Ikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Malangke | Kecamatan Malangke | APBN/ APBD Kab. | Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan dan/atau pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan Bone-Bone | Kecamatan Tana Lili | APBN/ APBD Kab. | Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.5 | Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.5.1 | Bandar Udara Pengumpan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan/atau pemeliharaan Bandar Udara Andi Jemma | Kecamatan Masamba | APBN | Kementerian Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan dan/atau pemeliharaan Bandar Udara Rampi | Kecamatan Rampi | APBN | Kementerian Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Pengembangan dan/atau pemeliharaan Bandar Udara Seko | Kecamatan Seko | APBN | Kementerian Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | Sistem Jaringan Energi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1.1 | Jaringan Minyak dan Gas Bumi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1.1.1 | Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan jaringan menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan Jaringan Distribusi Gas Sengkang - Pomala | Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke, Kecamatan Sukamaju Selatan, | APBN | Kementerian ESDM, Kementerian PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | | | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| | | Kecamatan Bone Bone, dan Kecamatan Tana Lili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2 | Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.1 | Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.1.1 | Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan PLTA Baliase | Kecamatan Masamba | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan PLTA Salu Uro | Kecamatan Seko | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Pembangunan PLTA Seko 1 | Kecamatan Seko | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.1.2 | Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan PLTP Limbong | Kecamatan Rongkong | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan PLTP Pincara | Kecamatan Masamba | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.1.3 | Pembangkit Listrik Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Baliase | Kecamatan Masamba | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Baliase A | Kecamatan Masamba | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Rongkong | Kecamatan Sabbang | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Rongkong 2 | Kecamatan Sabbang | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Rongkong 3 | Kecamatan Sabbang | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.2 | Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.2.1 | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.2.1.1 | Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan/atau pemeliharaan SUTET Palopo – Wotu | Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Bone Bone, dan Kecamatan Tana Lili | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.2.1.2 | Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------------------------|--|---|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | |
| a | Pengembangan dan/atau pemeliharaan SUTT Wotu – Masamba | Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone Bone, dan Kecamatan Tana Lili | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.2.2 | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.2.2.1 | Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2.2.3 | Gardu Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan/atau pemeliharaan Gardu Induk Masamba | Kecamatan Mappedeceng | APBN/ Swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.3 | Sistem Jaringan Telekomunikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | Jaringan Tetap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Optimalisasi fungsi dan/atau pemeliharaan Infrastruktur jaringan tetap berupa <i>Stasiun Telepon Otomat (STO)</i> Luwu Utara | Kecamatan Masamba | APBN/ APBD Kab./ Swasta | Kementerian kominfo, PT. Telkom/ Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan tetap berupa jaringan kabel serat optik | Kecamatan Sabbang Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone Bone, dan Kecamatan Tana Lili | APBN/ Swasta | Kementerian kominfo, PT. Telkom/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.3.2 | Jaringan Bergerak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.3.2.1 | Jaringan Bergerak Seluler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan bergerak seluler berupa menara <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, | APBN/ APBD Kab./ Swasta | Kementerian kominfo, PT. Telkom/ Dinas Komunikasi, InDinas Komunikasi, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------------|--|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | | | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| | | Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan | | Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.4 | Sistem Jaringan Sumber Daya Air | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1 | Prasarana Sumber Daya Air | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1.1 | Sistem Jaringan Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1.1.1 | Jaringan Irigasi Primer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan dan/atau rehabilitasi D.I. Baliase | Kecamatan Mappedeceng | APBN | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan dan/atau rehabilitasi D.I. Rongkong | Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan | APBN | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Pengembangan, pengelolaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi primer pada daerah irigasi | Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran X terkait jaringan irigasi primer) | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan hortikultura Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1.1.2 | Jaringan Irigasi Sekunder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan dan/atau rehabilitasi D.I. Baliase | Kecamatan Malangke, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, | APBN | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------------|--|---|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | | TP-II | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | TP-V | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | |
| | | Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Sukamaju Selatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan, pengelolaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran X terkait jaringan irigasi sekunder) | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1.1.3 | Jaringan Irigasi Tersier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan dan/atau rehabilitasi D.I. Baliase | Kecamatan Malangke, Kecamatan Masamba, dan Kecamatan Baebunta | APBN | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan, pengelolaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran X terkait jaringan irigasi tersier) | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1.2 | Sistem Pengendalian Banjir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1.2.1 | Jaringan Pengendalian Banjir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | | | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| B.5.1.1.1 | Unit Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Perwujudan unit air baku | Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Sabbang Selatan | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan jaringan air baku | Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Sabbang Selatan | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan air baku | Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Baebunta | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Perawatan dan/atau pemeliharaan unit air baku intake | Intake Bukae di Kecamatan Masamba, Intake Bukae Lama di Kecamatan Masamba, Intake I Sepakat di Kecamatan Mappedeceng, Intake Sabbang di Kecamatan Sabbang, dan Intake Sassa di Kecamatan Baebunta | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.1.1.2 | Unit Produksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Perwujudan unit produksi | Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Tana Lili | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, PDAM/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------------------------------------|---|---|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | |
| | | Kecamatan Sabbang Selatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan SPAL | <p>Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Luwu Utara di</p> <p>Kecamatan Baebunta, SPAL Baebunta di Kecamatan Baebunta, SPAL Baebunta Selatan di Kecamatan Baebunta Selatan, SPAL Bone Bone di Kecamatan Bone Bone, SPAL Malangke di Kecamatan Malangke, SPAL Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng, SPAL Masamba di Kecamatan Masamba, SPAL Rampi di Kecamatan Rampi, SPAL Rongkong di Kecamatan Rongkong, SPAL Sabbang di Kecamatan Sabbang, SPAL Sabbang Selatan di Kecamatan Sabbang Selatan, SPAL Seko di Kecamatan Seko, SPAL Sukamaju di Kecamatan Sukamaju, dan SPAL Tana Lili di Kecamatan Tana Lili</p> | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Perawatan dan/atau pemeliharaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik SPAL | <p>SPAL Baebunta di Kecamatan Baebunta, SPAL Baebunta Selatan di Kecamatan Baebunta Selatan, SPAL Bone Bone di Kecamatan Bone Bone, SPAL Malangke di Kecamatan Malangke, SPAL Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng, SPAL Rampi di Kecamatan Rampi, SPAL Sabbang Selatan di Kecamatan Sabbang Selatan,</p> | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-------------------------------------|--|---|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | | TP-II | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | | | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| | | SPAL Seko di Kecamatan Seko, dan SPAL Tana Lili di Kecamatan Tana Lili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.3 | Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (SPL B3) Tana Lili | Kecamatan Tana Lili | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.4 | Sistem Jaringan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.4.1 | Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan TPS3R Sabbang | Kecamatan Sabbang | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas PUTR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan, dan/atau pemeliharaan TPS3R | TPS3R Bukit Indah Patoloan di Kecamatan Bone Bone, TPS3R KSM Bunga Masamba di Kecamatan Masamba, dan TPS3R Sukamaju di Kecamatan Sukamaju | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas PUTR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.4.2 | Tempat Penampungan Sementara (TPS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan TPS | TPS Baebunta di Kecamatan Baebunta, TPS Bone Bone di Kecamatan Bone Bone, TPS Malangke di Kecamatan Malangke, TPS Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat, | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas PUTR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------------------------|--|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | | TP-IV | | | | | TP-V | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| | | TPS Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng, TPS Rampi di Kecamatan Rampi, TPS Rongkong di Kecamatan Rongkong, TPS Sabbang di Kecamatan Sabbang, TPS Seko di Kecamatan Seko, TPS Sukamaju di Kecamatan Sukamaju, dan TPS Tana Lili di Kecamatan Tana Lili | | Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan dan/atau pemeliharaan TPS | TPS BTN Andi Djemma di Kecamatan Masamba, TPS Jl. A. Pattiware di Kecamatan Masamba, TPS Kantor Gabungan Dinas di Kecamatan Masamba, TPS Mako Brimob di Kecamatan Baebunta, TPS Pasar Sentral di Kecamatan Masamba, TPS Puri Fatimah Residen di Kecamatan Masamba, dan TPS RSUD Andi Djemma di Kecamatan Masamba. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.4.3 | Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan/atau pemeliharaan TPA Meli | Kecamatan Baebunta | APBN/ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.5 | Sistem Jaringan Evakuasi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.5.1 | Jalur Evakuasi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penetapan jalur evakuasi bencana | Seluruh kecamatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran XII terkait jalur evakuasi bencana) | APBD Kab. | BPBD Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan sarana dan prasarana jalur evakuasi bencana | Seluruh kecamatan (lebih lengkap dapat mengacu pada | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | BNPB/ BPBD Provinsi/ BPBD Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------------------------|--|---|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | | TP-II | | | | TP-III | | | TP-IV | | | TP-V | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | |
| | | Lampiran XII terkait jalur evakuasi bencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.5.2 | Tempat Evakuasi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Perwujudan dan penetapan tempat evakuasi bencana | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran XII terkait tempat evakuasi bencana) | APBD Kab. | BPBD Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan (lebih lengkap dapat mengacu pada Lampiran XII terkait tempat evakuasi bencana) | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | BNPB/ BPBD Provinsi/ BPBD Kabupate | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.6 | Sistem Drainase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.6.1 | Jaringan Drainase Primer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan, pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan drainase primer | Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Baebunta | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----------------------------|---|---|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | | TP-II | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | |
| | | | | Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.6.2 | Jaringan Drainase Sekunder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan, pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan drainase sekunder * | Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Baebunta | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Provinsi/ Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5.6.3 | Jaringan Drainase Tersier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan, pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan drainase tersier | Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Baebunta | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | PERWUJUDAN POLA RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Perwujudan Kawasan Lindung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | Badan Air (BA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Perlindungan Badan Air | Seluruh kecamatan | APBN/ APBD Kab. | Kementerian PUPR/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Penatagunaan Badan Air | Seluruh kecamatan | APBN/ APBD Kab. | Kementerian PUPR/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | Kawasan Hutan Lindung (HL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan | APBN/ APBD Prov. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | | TP-III | | | | | TP-IV | | | | | TP-V | | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | | | | |
| | | Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengendalian aktivitas masyarakat di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap berbasis perhutanan sosial | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan | APBN/ APBD Prov./ Swasta | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.2 | Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi | Kecamatan Rampi dan Kecamatan Tana Lili | APBN/ APBD Prov. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------------------------|--|---|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | | TP-II | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | |
| a | Penataan kawasan transmigrasi | Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, dan Kecamatan Seko | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi/ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi/ Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan dan pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan | Seluruh kecamatan | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Penyelenggaraan infrastruktur pada Kawasan Permukiman Perdesaan | Seluruh kecamatan | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Pengembangan perumahan dalam bentuk penyediaan, rehabilitasi dan/atau relokasi korban bencana | Seluruh kecamatan | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian PUPR dan BNPB/ Dinas PUTR, BPBD Provinsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, BPBD Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.8 | Kawasan Transportasi (TR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------------------------|--|---|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | | TP-II | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | |
| a | Peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan bandara | Kecamatan Masamba, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Rampi | APBN | Kementerian Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan pelabuhan | Kecamatan Tana Lili | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab. | Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Provinsi/ Dinas Perhubungan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.9 | Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pelestarian dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan | Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Sukamaju Selatan | APBN | Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | Perwujudan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | Kawasan Peternakan Sapi SERA (Seko-Rampi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Rehabilitasi, revitalisasi kawasan peternakan sapi | Kecamatan Seko | APBD Prov. | Dinas PUTR, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan peternakan sapi | Kecamatan Seko | APBD Prov. | Dinas PUTR, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1 | Perwujudan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | Kawasan Pesisir dan Minapolitan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyusunan dokumen rencana kawasan pesisir dan Minapolitan | Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan kawasan pesisir dan Minapolitan | Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.2 | Kawasan Pengembangan Agropolitan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyusunan dokumen rencana kawasan pengembangan Agropolitan perkebunan | Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|--|---|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | TP-II | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | |
| | | Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan kawasan pengembangan Agropolitan perkebunan | Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.3 | Kawasan Pengembangan Agropolitan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyusunan dokumen rencana kawasan pengembangan Agropolitan pertanian | Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Tana Lili, dan Kecamatan Sukamaju Selatan | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan kawasan pengembangan Agropolitan pertanian | Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Tana Lili, dan Kecamatan Sukamaju Selatan | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Peningkatan sarana distribusi perdagangan | Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Tana Lili, dan Kecamatan Sukamaju Selatan | APBD Kab./ Swasta | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.4 | Kawasan Industri Munte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyusunan dokumen rencana Kawasan Industri Munte | Kecamatan Tana Lili | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Luwu Utara (2023-2042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|--|---|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | TP-I | | | TP-II | | | | TP-III | | | | TP-IV | | | | TP-V | |
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | | |
| b | Pembangunan Kawasan Industri Munte | Kecamatan Tana Lili | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | Kawasan Budaya Rampi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyusunan dokumen rencana Kawasan Budaya Rampi | Kecamatan Rampi | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan Kawasan Budaya Rampi | Kecamatan Rampi | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2 | Kawasan Bersejarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyusunan dokumen rencana kawasan bersejarah | Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat | APBD Kab. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pembangunan kawasan bersejarah | Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat | APBD Kab./ Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/ Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM |  |



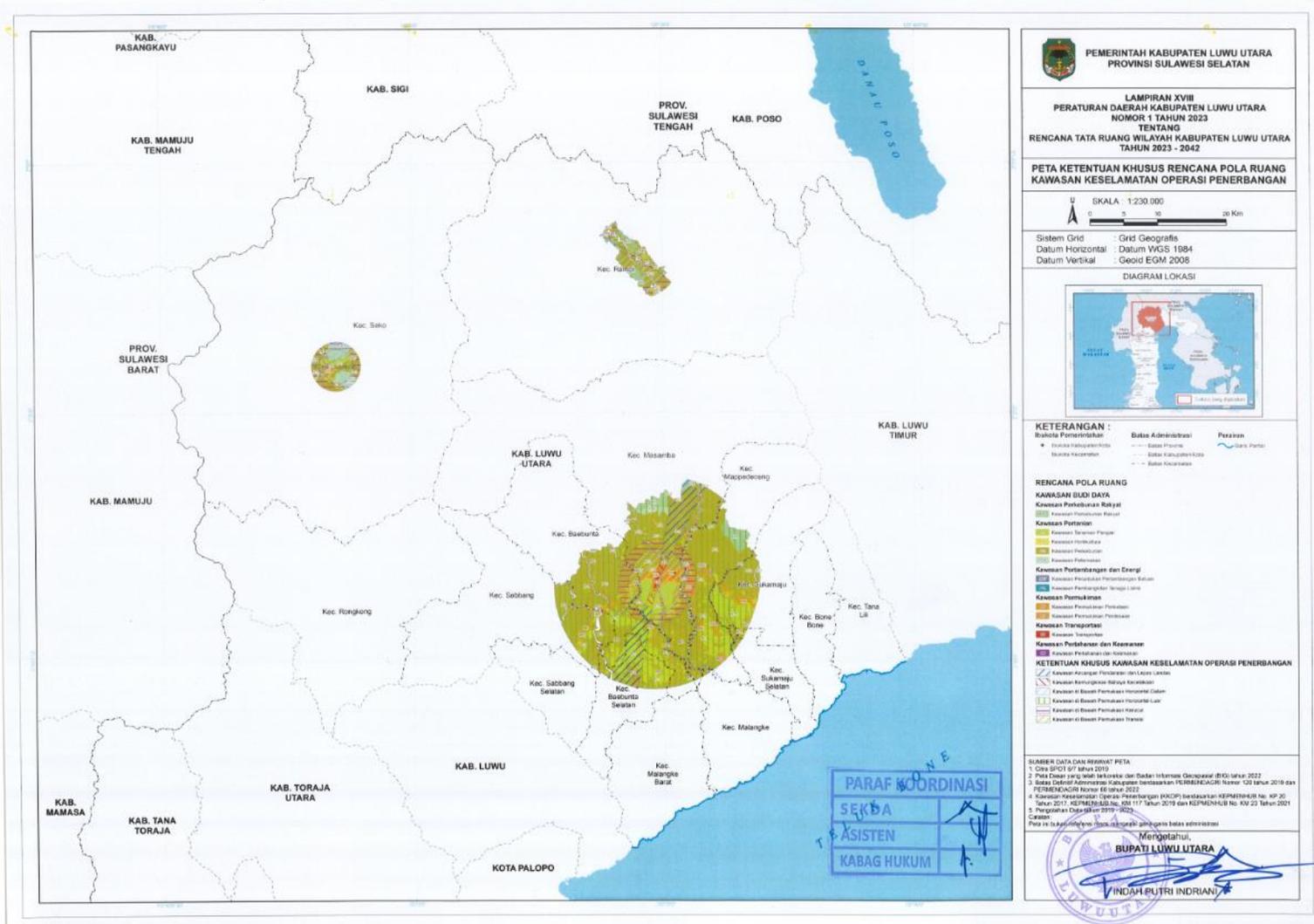
 BUPATI LUWU UTARA,



 INDAH PUTRI INDRIANI

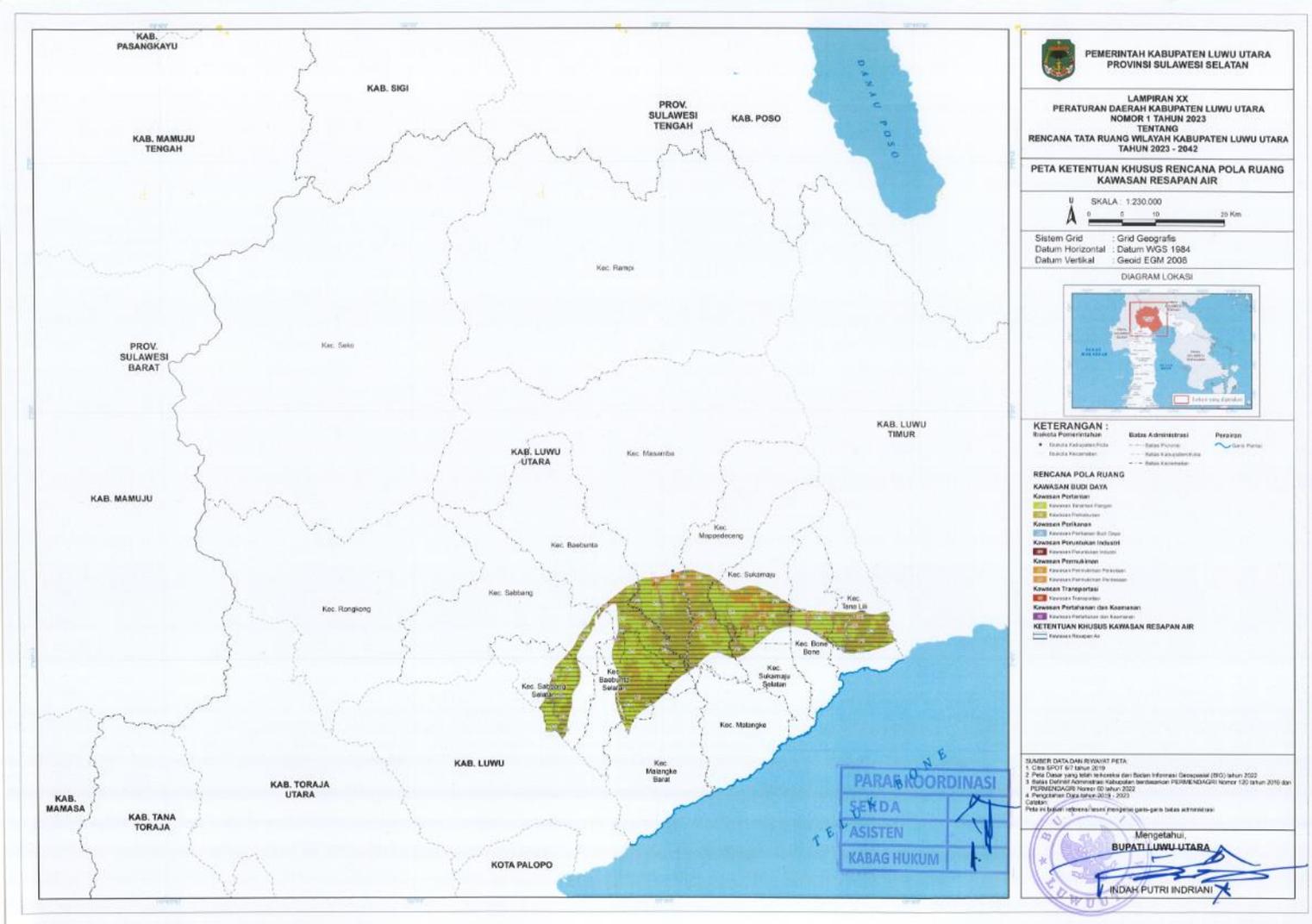
LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
 KABUPATEN LUWU UTARA



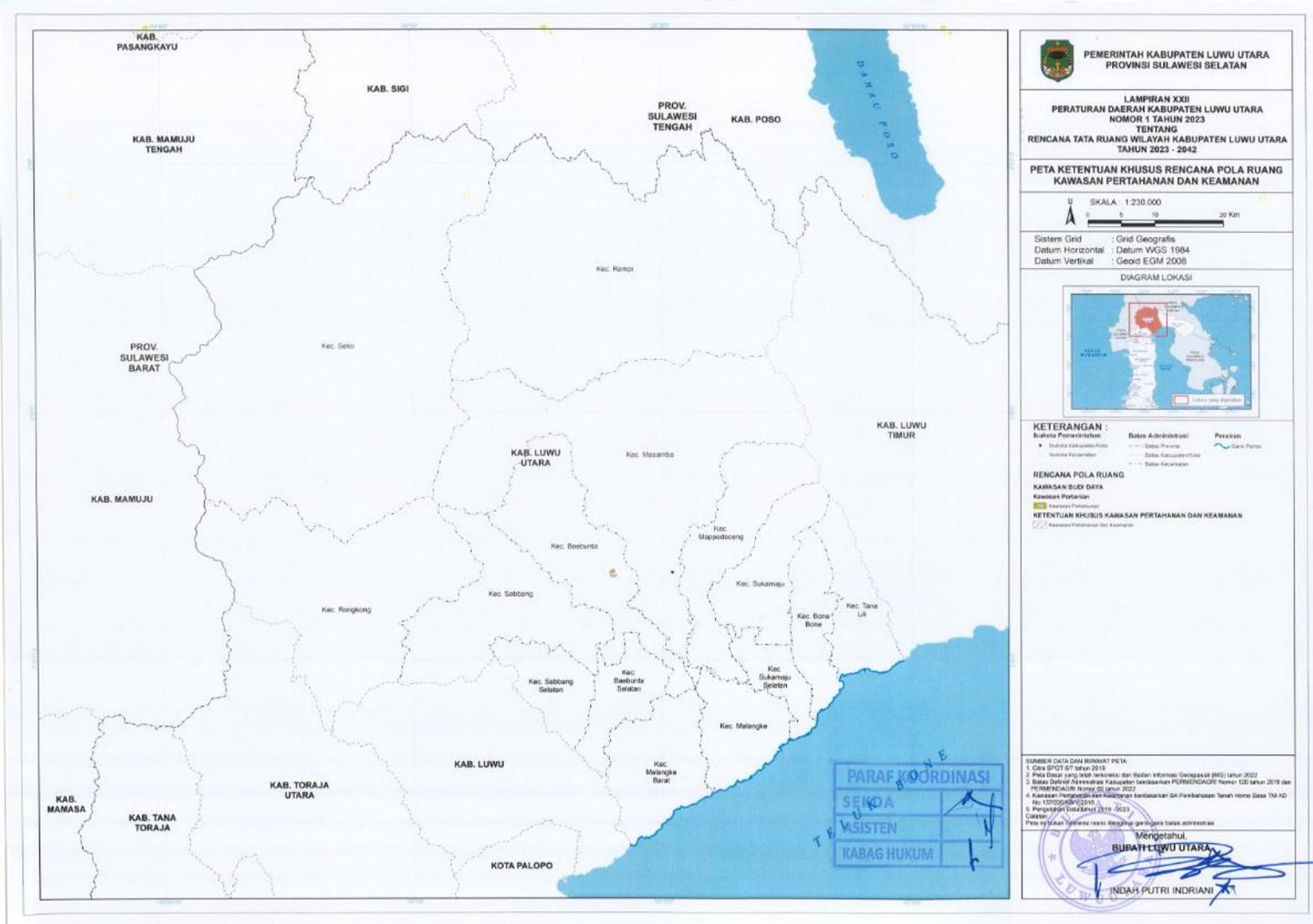
LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR
 KABUPATEN LUWU UTARA



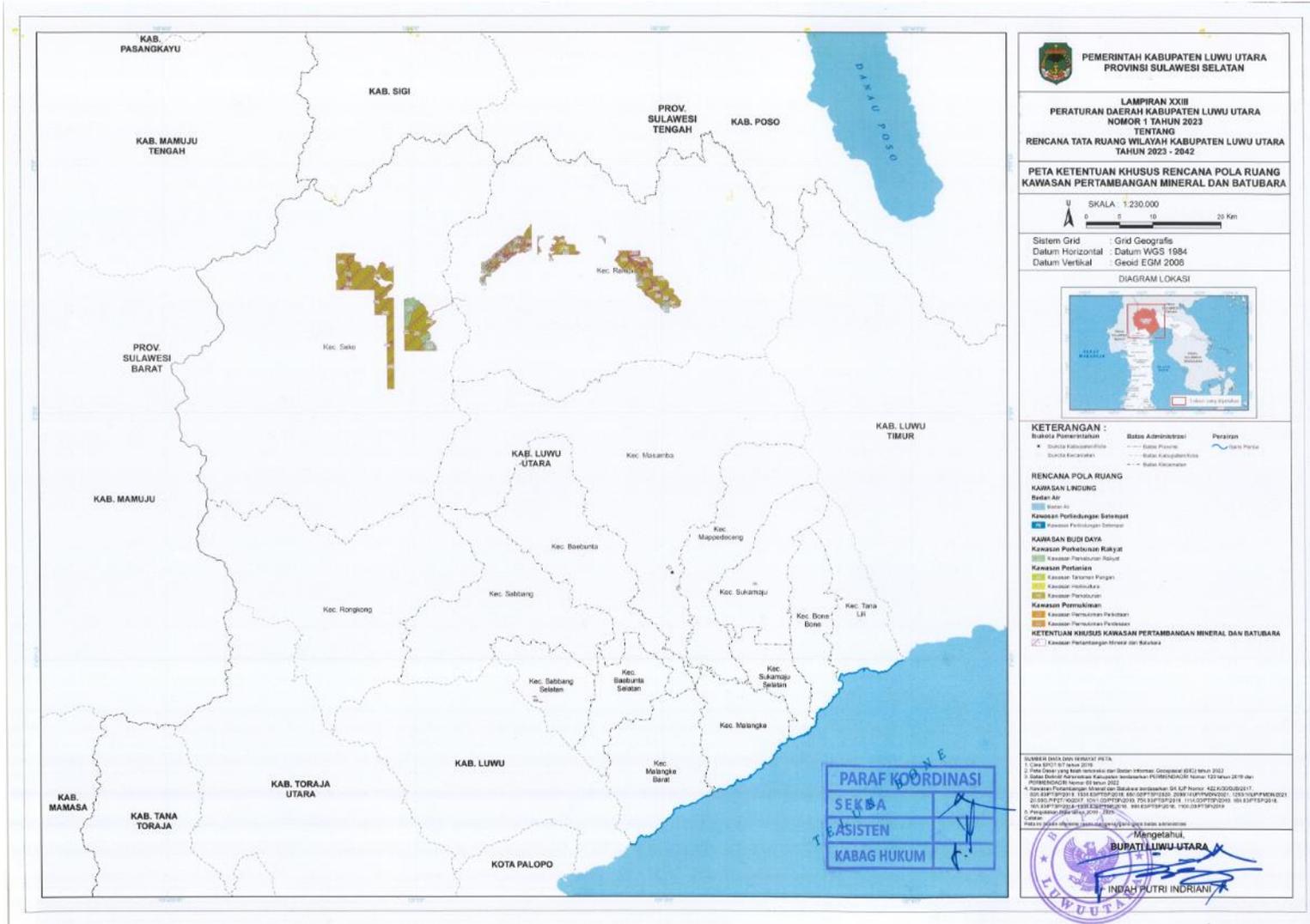
LAMPIRAN XXII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
 KABUPATEN LUWU UTARA



LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
 KABUPATEN LUWU UTARA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

T E N T A N G

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2023 – 2042

I. UMUM

Sesuai amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Pasal 17 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD), penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), penyusunan RDTR kabupaten, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi serta dasar untuk Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten kemudian disusun dengan harus memperhatikan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administrasi kabupaten dengan muatan substansi meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten, rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif disinsentif, serta arahan sanksi, kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten, dan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agropolitan dan minapolitan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara yang meliputi penetapan arahan fungsi perkotaan yang mendukung tujuan penataan ruang, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana



transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten, perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang berbasis agropolitan dan minapolitan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 742.241,8 ha (tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu koma delapan hektare)” adalah luasan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten” adalah terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten” adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah

kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana Pola Ruang wilayah kabupaten” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten” adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten” adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten meliputi ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yaitu wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi lokasi terminal penumpang dengan fungsi utama melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi dan dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan dan/atau angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Pasal 14

Ayat (1)



Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan lokal” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Ayat (4)

Jalan kolektor primer kewenangan provinsi adalah JKP-2 dan JKP 3, meliputi ruas jalan:

1. ruas Jalan Pesisir Teluk Bone;
2. ruas Masamba - Batas Mamuju (Eno - Tanete);
3. ruas Masamba - Batas Mamuju (Masamba - Pincara);
4. ruas Masamba - Batas Mamuju (Onondoa - Tede'boe);
5. ruas Masamba - Batas Mamuju (Pincara - Saluseba);
6. ruas Masamba - Batas Mamuju (Sae - Bts. Sulbar);

7. ruas Masamba - Batas Mamuju (Saluseba - Onondoa);
8. ruas Masamba - Batas Mamuju (Singkalong - Lore);
9. ruas Masamba - Batas Mamuju (Sodangan - Eno);
10. ruas Masamba - Batas Mamuju (Tallang - Sae);
11. ruas Masamba - Batas Mamuju (Tede'boe - Lore);
12. ruas Sabbang - Talang - Sae - Kaluku;
13. ruas Eno (Seko) - Paharaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Bone - Parahaleang);
14. ruas Eno (Seko) - Paharaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Eno - Tanete); dan
15. ruas Eno (Seko) - Paharaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Parahaleang - Batas Sul. Tengah).

Jalan kolektor primer kewenangan kabupaten adalah JKP-4, meliputi ruas jalan:

1. ruas Jalan Lingkar Luar;
2. ruas Jalan Lingkar Luar (Amassangan - Cening);
3. ruas Jalan Lingkar Luar (Baebunta - Dadeko);
4. ruas Jalan Lingkar Luar (Bone-Bone - Tamuku);
5. ruas Jalan Lingkar Luar (Bungadidi - Poreang);
6. ruas Jalan Lingkar Luar (Cening - Kalitata);
7. ruas Jalan Lingkar Luar (Kaluku - Subur);
8. ruas Jalan Lingkar Luar (Kapidi - To'lada);
9. ruas Jalan Lingkar Luar (Lara - Kalitata);
10. ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Amassangan);
11. ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Malangke);
12. ruas Jalan Lingkar Luar (Malangke - Makitta);
13. ruas Jalan Lingkar Luar (Mario - Tolada);
14. ruas Jalan Lingkar Luar (Patila - Munte);
15. ruas Jalan Lingkar Luar (Pondan - Lara);
16. ruas Jalan Lingkar Luar (Pongko-Lino);
17. ruas Jalan Lingkar Luar (Poreang - Karondang);
18. ruas Jalan Lingkar Luar (Salulemo-Lara I);
19. ruas Jalan Lingkar Luar (Spontan - Lino);
20. ruas Jalan Lingkar Luar (Sumberwangi - Spontan);
21. ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Pongko);
22. ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Tanah Takko');
dan
23. ruas Jalan Lingkar Luar (To'lada - Rampoang).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan lokal primer" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat

kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan,

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan lokal sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan primer” adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan sekunder” adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api umum” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api antarkota” adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “stasiun penumpang” adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan kelas III” adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan lokal” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah Laut.

Yang dimaksud dengan “jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan” adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah jaringan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan distribusi tenaga listrik” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik

dari system transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gardu listrik” adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “SUTET” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “SUTT” adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “SUTM” adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “gardu induk” adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan sub transmisi menjadi tegangan menengah.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak seluler” adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana sumber daya air” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian banjir” adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bangunan sumber daya air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daerah irigasi (D.I.)” adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi primer” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi sekunder” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi tersier” adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan pengendalian banjir” adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan pengendalian banjir” adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan evakuasi bencana” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang digunakan untuk evakuasi bila terjadi bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem drainase” adalah sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan perpipaan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unit air baku” adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unit produksi” adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit distribusi” adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan” adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pengelolaan air limbah domestik” adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “SPL B3” adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur evakuasi bencana” adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat evakuasi bencana” adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase primer” adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase sekunder” adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase tersier” adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan lindung” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan pelestarian alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan hutan produksi tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan tanaman pangan” adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hortikultura” adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan perkebunan” adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan peternakan” adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan budi daya” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan mineral” adalah kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pembangkitan tenaga listrik” adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertambangan batuan” adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perkotaan” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perdesaan” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan keselamatan operasi penerbangan” adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KP2B” adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana” adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan” adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai,

situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan mineral dan batubara” adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:

- 1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- 2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- 3) memiliki potensi ekspor;
- 4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- 5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- 6) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- 7) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- 8) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- 9) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- 10) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- 11) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- 12) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- 13) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria:

- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

- 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan KKPR” adalah ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam bentuk indikasi program utama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan” adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang” adalah menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu yang kemudian akan menghasilkan dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahun, dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahun.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, meliputi:

- 1) budidaya tanaman obat;
- 2) budidaya tanaman hias;
- 3) budidaya jamur;
- 4) budidaya lebah;
- 5) budidaya hijauan makanan ternak;
- 6) budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- 7) budidaya tanaman atsiri;
- 8) budidaya tanaman nira;
- 9) wana mina (*silvofishery*);
- 10) wana ternak (*silvopastura*);
- 11) tanam wana tani (*agroforestry*);
- 12) wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
- 13) penangkaran satwa liar; dan/atau
- 14) rehabilitasi satwa.

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
- 2) tidak menimbulkan dampak negative terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- 3) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
- 4) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.



kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, meliputi:

- 1) pemanfaatan aliran air;
- 2) pemanfaatan air;
- 3) wisata alam;
- 4) perlindungan keanekaragaman hayati;
- 5) pemulihan lingkungan; dan/atau
- 6) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
- 2) tidak mengubah bentang alam;
- 3) tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan
- 4) tidak dilakukan pada blok inti dan blok khusus.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung, berupa:

- 1) rotan;
- 2) madu;
- 3) getah;
- 4) buah;
- 5) biji;
- 6) jamur;
- 7) daun;
- 8) bunga;
- 9) sarang burung walet; dan/atau
- 10) hasil Hutan bukan kayu lainnya.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) hasil Hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi;
- 2) tidak merusak lingkungan;
- 3) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; dan
- 4) memungut hasil Hutan bukan kayu sesuai berat atau volume yang diizinkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam, dilakukan paling sedikit meliputi kegiatan:

- 1) budidaya tanaman obat;
- 2) budidaya tanaman hias;
- 3) budidaya jamur;
- 4) budidaya lebah;
- 5) penangkaran satwa liar;
- 6) budidaya sarang burung walet;
- 7) rehabilitasi satwa;
- 8) budidaya hijauan makanan ternak;
- 9) budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- 10) budidaya tanaman atsiri;
- 11) budidaya tanaman nira;
- 12) budidaya serat;
- 13) wana mina (*silvofishery*);
- 14) wana ternak (*silvopasfira*);
- 15) tanam wana tani (*agroforestry*);
- 16) wana tani ternak (*agrosilvopashtra*);
- 17) budidaya tanaman penghasil *biomassa* atau *bioenergy*; dan/atau
- 18) budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan produksi tetap tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tetap, dilakukan paling sedikit meliputi:

- 1) pemanfaatan jasa aliran air;
- 2) pemanfaatan air;
- 3) wisata alam;
- 4) perlindungan keanekaragaman hayati;



- 5) pemulihan lingkungan; dan/atau
 - 6) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tetap tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi tetap dilakukan melalui:

- 1) pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami; dan/atau
- 2) pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami meliputi kegiatan:

- 1) penebangan/pemanenan;
- 2) pengayaan;
- 3) pembibitan;
- 4) penanaman;
- 5) pemeliharaan;
- 6) pengamanan;
- 7) pengolahan; dan
- 8) pemasaran.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman, meliputi kegiatan:

- 1) penyiapan lahan;
- 2) pembibitan;
- 3) penanaman;
- 4) pemeliharaan;
- 5) pengamanan;
- 6) pemanenan;
- 7) pengolahan; dan
- 8) pemasaran.

tanaman yang dihasilkan dari perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman merupakan asset pemegang perizinan berusaha dan dapat dijadikan agunan sepanjang perizinan berusaha yang dipegang masih berlaku.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi tetap, paling sedikit berupa pemanfaatan:

- 1) rotan, sagu, nipah, aren, bambu;
- 2) getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu;
- 3) komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*); dan/atau



- 4) komoditas pengembangan tanaman pangan, yang meliputi kegiatan pengayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk kegiatan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*), hanya dapat dilakukan pada hutan produksi tetap yang tidak produktif.

kegiatan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi tetap, dilakukan untuk:

- 1) memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat; dan
- 2) memenuhi kebutuhan individu.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi tetap hanya boleh dilakukan oleh Masyarakat di sekitar Hutan.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi tetap dapat berupa:

- 1) rotan;
- 2) madu;
- 3) getah;
- 4) buah atau biji;
- 5) daun;
- 6) gaharu;
- 7) kulit kayu;
- 8) tanaman obat;
- 9) umbi-umbian; atau
- 10) hasil Hutan bukan kayu lainnya.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi tetap terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam, dilakukan paling sedikit meliputi kegiatan:

- 1) budidaya tanaman obat;
- 2) budidaya tanaman hias;
- 3) budidaya jamur;
- 4) budidaya lebah;
- 5) penangkaran satwa liar;
- 6) budidaya sarang burung walet;
- 7) rehabilitasi satwa;
- 8) budidaya hijauan makanan ternak;
- 9) budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- 10) budidaya tanaman atsiri;
- 11) budidaya tanaman nira;
- 12) budidaya serat;
- 13) wana mina (*silvofishery*);
- 14) wana ternak (*silvopasfira*);
- 15) tanam wana tani (*agroforestry*);
- 16) wana tani ternak (*agrosilvopastr*);
- 17) budidaya tanaman penghasil *biomassa* atau *bioenergy*; dan/atau
- 18) budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan produksi yang dapat dikonversi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi yang dapat dikonversi, dilakukan paling sedikit meliputi:

- 1) pemanfaatan jasa aliran air;
- 2) pemanfaatan air;
- 3) wisata alam;
- 4) perlindungan keanekaragaman hayati;
- 5) pemulihan lingkungan; dan/atau
- 6) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi yang dapat dikonversi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi dilakukan melalui:

- 1) pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami; dan/atau
- 2) pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami meliputi kegiatan:

- 1) penebangan/pemanenan;
- 2) pengayaan;
- 3) pembibitan;
- 4) penanaman;
- 5) pemeliharaan;
- 6) pengamanan;
- 7) pengolahan; dan
- 8) pemasaran.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman, meliputi kegiatan:

- 1) penyiapan lahan;
- 2) pembibitan;
- 3) penanaman;
- 4) pemeliharaan;
- 5) pengamanan;
- 6) pemanenan;
- 7) pengolahan; dan
- 8) pemasaran.

tanaman yang dihasilkan dari perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman merupakan asset pemegang perizinan berusaha dan dapat dijadikan agunan sepanjang perizinan berusaha yang dipegang masih berlaku.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi, paling sedikit berupa pemanfaatan:

- 1) rotan, sagu, nipah, aren, bambu;
- 2) getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu;
- 3) komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*); dan/atau
- 4) komoditas pengembangan tanaman pangan, yang meliputi kegiatan pengayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk kegiatan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*), hanya dapat



dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif.

kegiatan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi, dilakukan untuk:

- 1) memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat; dan
- 2) memenuhi kebutuhan individu.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi hanya boleh dilakukan oleh Masyarakat di sekitar Hutan. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi dapat berupa:

- 1) rotan;
- 2) madu;
- 3) getah;
- 4) buah atau biji;
- 5) daun;
- 6) gaharu;
- 7) kulit kayu;
- 8) tanaman obat;
- 9) umbi-umbian; atau
- 10) hasil Hutan bukan kayu lainnya.

kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang dapat dikonversi terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.

